



# Laporan Keuangan Pemerintah Daerah **LKPD**

**2019  
AUDITED**



- Laporan Realisasi Anggaran
- LPSAL
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

**Kabupaten Samosir Tahun 2020**  
*Negeri Indah Kepiangan Surga*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Audited).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Audited) menyajikan:

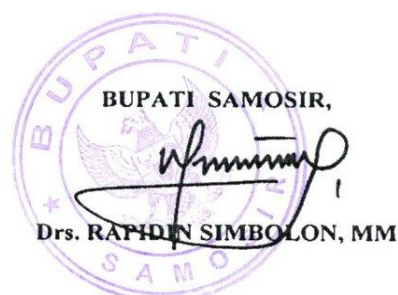
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini meliputi semua Laporan Keuangan, Entitas Pelaporan sebagaimana termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas 40 (empat puluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang laporan keuangannya telah diperiksa (audited) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah Tahun Anggaran 2018. Realisasi pendapatan adalah sebesar Rp802.686.254.059,36 (delapan ratus dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu lima puluh sembilan koma tiga puluh enam rupiah) atau 103,50% dari anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp775.520.026.980,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh koma nol nol rupiah), dan realisasi belanja daerah sebesar Rp664.127.057.315,00 (enam ratus enam puluh empat miliar seratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas koma nol nol rupiah) atau 94,95% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp699.423.944.108,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus delapan koma nol nol rupiah).
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 adalah sebesar Rp24.437.136.065,79 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu enam puluh lima koma tujuh puluh sembilan rupiah).
4. Laporan Operasional (LO) yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Surplus/(defisit)-LO Tahun 2018 yang menambah ekuitas sebesar Rp86.006.899.365,85 (delapan puluh enam miliar enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma delapan puluh lima rupiah).
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Ekuitas Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.461.638.959.550,33 (satu triliun empat ratus enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan

ribu lima ratus lima puluh koma tiga puluh tiga rupiah) sedangkan ekuitas akhir Tahun 2018 sebesar Rp1.549.460.434.496,07 (satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma nol tujuh rupiah).

6. Neraca menyajikan informasi tentang aset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir per 31 Desember 2018. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset sebesar Rp1.568.385.044.362,13 (satu triliun lima ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua koma tiga belas rupiah), kewajiban sebesar Rp18.924.609.866,06 (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam koma nol enam rupiah) dan ekuitas sebesar Rp1.549.460.434.496,07 (satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma nol tujuh rupiah).
7. Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasional, aktifitas investasi aset non keuangan, aktifitas pembiayaan dan aktifitas non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas per 31 Desember 2018 yang menghasilkan kenaikan atau penurunan kas. Pada Tahun 2018 Kabupaten Samosir mengalami penurunan sebesar Rp7.299.631.680,68 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh koma enam puluh delapan rupiah).
8. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pemerintah Kabupaten Samosir mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah Kabupaten Samosir menyadari bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 ini masih belum sempurna. Dengan kesadaran tersebut kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik membangun dari para pengguna (*stakeholders*) ini. Pemerintah Kabupaten Samosir akan berupaya untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).



## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

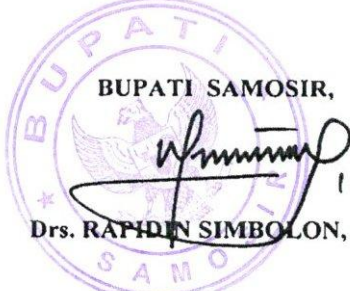
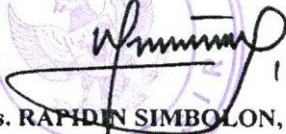


**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(dalam Rupiah)

KODE REKUNING	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	884.810.076.170,83	885.111.158.054,09	100,03	802.686.254.059,36
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	64.942.653.826,83	60.497.449.963,09	93,16	47.446.623.389,36
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	16.894.040.525,00	17.342.605.511,21	102,66	14.788.292.147,60
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.806.353.238,00	4.617.651.545,00	59,15	5.029.168.250,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.533.993.532,00	4.533.993.582,00	100,00	2.714.607.460,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	35.708.266.531,83	34.003.199.324,88	95,23	24.914.555.531,76
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	819.867.422.344,00	816.915.639.091,00	99,64	733.482.874.670,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	645.234.442.591,00	636.204.549.291,00	98,60	608.164.685.810,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	10.449.919.000,00	7.906.318.303,00	75,66	10.855.232.799,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.307.448.000,00	3.155.106.279,00	59,45	3.688.724.037,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	465.740.446.000,00	465.249.052.000,00	99,89	453.737.230.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK - LRA	89.314.498.555,00	87.280.462.603,00	97,72	72.561.043.227,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non FISIK - LRA	74.422.131.036,00	72.613.610.106,00	97,57	67.322.455.747,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	140.843.163.000,00	148.710.757.330,00	105,59	90.953.371.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	32.098.664.000,00	39.966.258.330,00	124,51	0,00
4.2.2.4	Dana Desa - LRA	108.744.499.000,00	108.744.499.000,00	100,00	90.953.371.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	33.789.816.753,00	32.000.332.470,00	94,70	16.539.591.307,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	33.789.816.753,00	32.000.332.470,00	94,70	16.539.591.307,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	17.825.226.553,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	17.825.226.553,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	0,00	7.698.069.000,00	0,00	21.756.756.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	7.698.069.000,00	0,00	21.756.756.000,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	745.492.028.996,62	695.293.860.942,00	93,27	664.127.057.315,00
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	563.976.155.317,62	530.227.925.563,00	94,02	476.333.825.413,00
5.1.1	Belanja Pegawai	353.652.505.945,62	345.162.973.031,00	97,60	311.222.108.400,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.225.049.372,00	176.239.715.532,00	88,02	158.554.370.923,00
5.1.5	Belanja Hibah	6.798.600.000,00	5.646.012.000,00	83,05	5.268.996.090,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.300.000.000,00	3.179.225.000,00	96,34	1.288.350.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	179.775.873.679,00	164.093.834.379,00	91,28	186.281.849.902,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	7.500.000.000,00	6.359.404.776,00	84,79	1.213.201.921,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.167.930.482,00	12.359.799.372,00	93,86	24.336.358.579,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan	24.799.461.480,00	23.742.137.936,00	95,74	19.130.112.671,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
	Bangunan				
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	124.497.170.952,00	113.030.134.184,00	90,79	128.756.927.067,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.811.310.765,00	8.602.358.111,00	87,68	12.845.249.664,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	1.740.000.000,00	972.101.000,00	55,87	1.511.382.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1.740.000.000,00	972.101.000,00	55,87	1.511.382.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFER</b>	159.755.183.240,00	159.719.329.538,00	99,98	139.756.664.418,00
<b>6.1</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	2.128.407.540,00	2.128.407.540,00	100,00	1.257.915.000,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah	2.128.407.540,00	2.128.407.540,00	100,00	1.257.915.000,00
<b>6.2</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	157.626.775.700,00	157.590.921.998,00	99,98	138.498.749.418,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	157.076.775.700,00	157.076.775.700,00	100,00	137.953.008.600,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	550.000.000,00	514.146.298,00	93,48	545.740.818,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(20.437.136.065,79)	30.097.967.574,09	(147,27)	(1.197.467.673,64)
<b>7</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>7.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	24.437.136.065,79	24.437.136.065,79	100,00	32.001.197.011,43
7.1.1	Penggunaan SilPA	24.437.136.065,79	24.437.136.065,79	100,00	32.001.197.011,43
<b>7.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	6.366.593.272,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	6.366.593.272,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	20.437.136.065,79	20.437.136.065,79	100,00	25.634.603.739,43
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	50.535.103.639,88	0,00	24.437.136.065,79

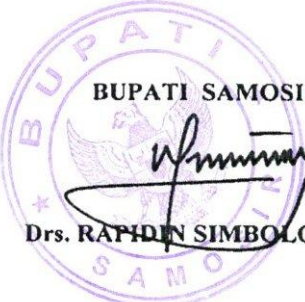
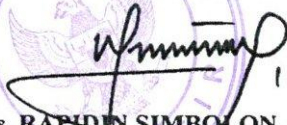
  
 BUPATI SAMOSIR,  
  
 Drs. RAPHIN SIMBOLON, MM

**2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Saldo Anggaran Lebih Awal	24.437.136.065,79	31.998.312.489,43
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	24.437.136.065,79	32.001.197.011,43
<b>Sub Total</b>	0,00	(2.884.522,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	50.535.103.639,88	24.437.136.065,79
<b>Sub Total</b>	50.535.103.639,88	24.434.251.543,79
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	2.884.522,00
Lain-lain	0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	50.535.103.639,88	24.437.136.065,79

  
 BUPATI SAMOSIR,  
  
 Drs. RAPHIN SIMBOLON, MM

## 3. LAPORAN OPERASIONAL



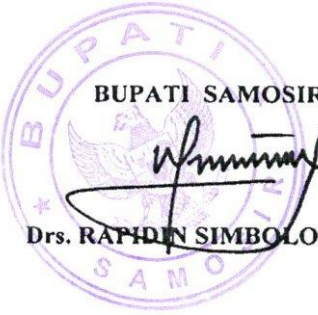
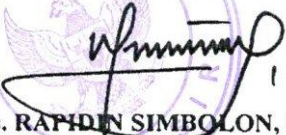
**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>	888.096.060.142,74	828.244.198.569,24	59.851.861.573,50	7,23
8.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	60.392.937.174,03	49.860.701.520,24	10.532.235.653,79	21,12
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	16.213.916.828,21	15.024.189.448,60	1.189.727.379,61	7,92
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.275.144.332,00	5.384.182.237,67	(1.109.037.905,67)	(20,60)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	4.533.993.582,00	2.714.607.460,00	1.819.386.122,00	67,02
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	35.369.882.431,82	26.737.722.373,97	8.632.160.057,85	32,28
8.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	779.983.289.457,00	747.330.902.647,00	32.652.386.810,00	4,37
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	636.204.549.291,00	608.164.685.810,00	28.039.863.481,00	4,61
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	119.226.763.000,00	90.953.371.000,00	28.273.392.000,00	31,09
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	24.551.977.166,00	30.387.619.284,00	(5.835.642.118,00)	(19,20)
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	17.825.226.553,00	(17.825.226.553,00)	0,00
8.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	47.719.833.511,71	31.052.594.402,00	16.667.239.109,71	53,67
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	47.719.833.511,71	31.052.594.402,00	16.667.239.109,71	53,67
<b>9</b>	<b>BEBAN</b>	845.729.672.839,09	742.412.524.435,89	103.317.148.403,20	13,92
9.1.1	Beban Pegawai - LO	345.162.973.031,00	311.244.956.708,00	33.918.016.323,00	10,90
9.1.2a	Beban Persediaan	80.201.724.967,56	29.836.051.368,45	50.365.673.599,11	168,81
9.1.2b	Beban Jasa	53.386.606.391,52	57.406.085.550,26	(4.019.479.158,74)	(7,00)
9.1.2c	Beban Pemeliharaan	9.777.194.339,70	9.781.783.352,90	(4.589.013,20)	(0,05)
9.1.2d	Beban Perjalanan Dinas	46.136.291.551,00	45.713.521.384,00	422.770.167,00	0,92
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	5.661.804.000,00	13.443.067.469,14	(7.781.263.469,14)	(57,88)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	3.179.225.000,00	1.288.350.000,00	1.890.875.000,00	146,77
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	131.999.659.995,76	125.137.507.392,11	6.862.152.603,65	5,48
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	486.072.706,55	590.196.661,02	(104.123.954,47)	(17,64)
9.1.9	Beban Lain-lain	10.018.791.318,00	8.214.340.132,01	1.804.451.185,99	21,97
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.128.407.540,00	1.257.915.000,00	870.492.540,00	69,20
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	Daerah Lainnya				
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	157.076.775.700,00	137.953.008.600,00	19.123.767.100,00	13,86
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	514.146.298,00	545.740.818,00	(31.594.520,00)	(5,79)
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	42.366.387.303,65	85.831.674.133,35	(43.465.286.829,70)	(50,64)
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	627.966.798,00	451.319.000,00	176.647.798,00	39,14
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.465.841.822,86	119.306.232,50	1.346.535.590,36	1128,64
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	208.338.781,00	0,00	208.338.781,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	1.885.469.839,86	570.625.232,50	1.314.844.607,36	230,42
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	44.251.857.143,51	86.402.299.365,85	(42.150.442.222,34)	(48,78)
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	972.101.000,00	395.400.000,00	576.701.000,00	145,85
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	(972.101.000,00)	(395.400.000,00)	(576.701.000,00)	145,85
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	43.279.756.143,51	86.006.899.365,85	(42.727.143.222,34)	(49,68)

  
 BUPATI SAMOSIR,  
  
 Drs. RAPHIN SIMBOLON, MM



**4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

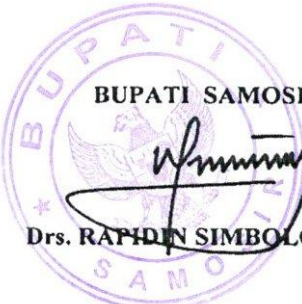
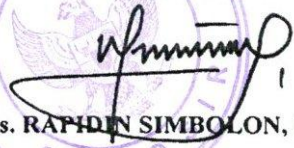


**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	1.549.460.434.496,07	1.461.638.959.550,33
SURPLUS/DEFISIT-LO	43.279.756.143,51	86.006.899.365,85
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	726.806.830,59	1.814.575.579,89
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.593.466.997.470,17</b>	<b>1.549.460.434.496,07</b>

  
 BUPATI SAMOSIR,  
  
 Drs. RAPHIN SIMBOLON, MM

## 5. NERACA

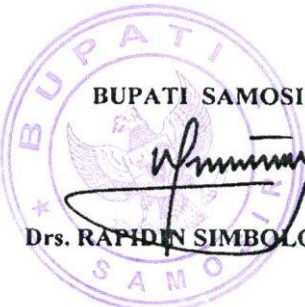
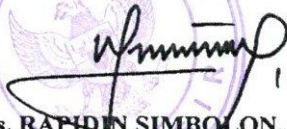


**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah	36.180.150.139,88	18.691.080.590,79
Kas di Bendahara Penerimaan	205.350.000,00	41.954.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	63.952,00
Kas di BLUD	5.244.810.678,00	4.365.562.861,00
Kas di Bendahara BOS	8.904.792.822,00	1.620.457.046,96
Kas Lainnya	3.591.458,00	146.454.750,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak	1.806.089.900,00	2.934.778.583,00
Piutang Retribusi	470.880.046,00	814.095.592,00
Piutang Dana Bagi Hasil	6.399.672.673,00	13.848.027.977,00
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	3.153.397.135,00	2.425.374.218,00
Piutang Lainnya	8.489.059.662,10	7.698.900.706,71
Penyisihan Piutang	(7.913.078.350,94)	(9.374.943.864,80)
Beban Dibayar Dimuka	60.752.946,00	156.605.736,44
Persediaan	21.196.359.810,12	42.394.687.048,53
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>84.201.828.919,16</b>	<b>85.763.099.197,63</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	17.804.257.411,98	13.804.257.411,98
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>17.804.257.411,98</b>	<b>13.804.257.411,98</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>17.804.257.411,98</b>	<b>13.804.257.411,98</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	520.335.435.818,85	510.664.801.042,85
Peralatan dan Mesin	235.498.343.765,30	218.554.550.527,50
Gedung dan Bangunan	453.808.551.649,17	433.648.761.999,60
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.261.727.201.399,37	1.141.597.829.107,86

URAIAN	2019	2018
Aset Tetap Lainnya	2.287.854.935,54	3.450.044.827,54
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.486.532.342,07	13.043.788.007,10
Akumulasi Penyusutan	(994.751.111.216,74)	(869.298.589.050,07)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.488.392.808.693,56</b>	<b>1.451.661.186.462,38</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	231.957.000,00	333.034.700,00
Aset Lain-lain	14.456.239.020,52	16.823.466.590,14
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>14.688.196.020,52</b>	<b>17.156.501.290,14</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.605.087.091.045,22</b>	<b>1.568.385.044.362,13</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.591.458,00	281.982.384,96
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	916.667,00	1.625.000,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	11.615.585.450,05	18.641.002.481,10
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>11.620.093.575,05</b>	<b>18.924.609.866,06</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>11.620.093.575,05</b>	<b>18.924.609.866,06</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	<b>1.593.466.997.470,17</b>	<b>1.549.460.434.496,07</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.605.087.091.045,22</b>	<b>1.568.385.044.362,13</b>

  
 BUPATI SAMOSIR,  
  
 Drs. RAPHEN SIMBOLON, MM

## 6. LAPORAN ARUS KAS

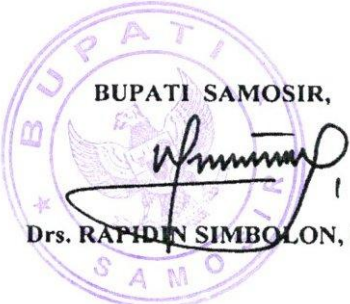
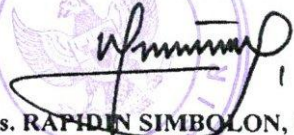


**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Penerimaan Pajak Daerah	17.342.605.511,21	14.788.292.147,60
Penerimaan Retribusi Daerah	4.617.651.545,00	5.029.168.250,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.533.993.582,00	2.714.607.460,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	33.375.232.526,88	24.446.834.531,76
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	7.906.318.303,00	10.855.232.799,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.155.106.279,00	3.688.724.037,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	465.249.052.000,00	453.737.230.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	159.894.072.709,00	139.883.498.974,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	39.966.258.330,00	21.756.756.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.000.332.470,00	16.539.591.307,00
Penerimaan Hibah	7.698.069.000,00	0,00
Penerimaan Lainnya	108.744.499.000,00	108.778.597.553,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	884.483.191.256,09	802.218.533.059,36
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Pembayaran Pegawai	342.377.031.205,00	311.222.108.400,00
Pembayaran Barang	179.025.657.358,00	158.554.370.923,00
Pembayaran Hibah	5.646.012.000,00	5.268.996.090,00
Pembayaran Bantuan Sosial	3.179.225.000,00	1.288.350.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	157.590.921.998,00	138.498.749.418,00
Pembayaran Tak Terduga	972.101.000,00	1.511.382.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.405.500.000,00	772.500.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	722.907.540,00	485.415.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	690.919.356.101,00	617.601.871.831,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>193.563.835.155,09</b>	<b>184.616.661.228,36</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Penjualan atas Kendaraan Dinas	590.635.798,00	451.319.000,00
Penjualan atas Bahan-bahan Bekas Bangunan	37.331.000,00	16.402.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	627.966.798,00	467.721.000,00
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Perolehan Tanah	6.359.404.776,00	1.213.201.921,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	12.359.799.372,00	24.336.358.579,00
Perolehan Bangunan dan Gedung	23.742.137.936,00	19.130.112.671,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.030.134.184,00	128.756.927.067,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.602.358.111,00	12.845.249.664,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	164.093.834.379,00	186.281.849.902,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(163.465.867.581,00)</b>	<b>(185.814.128.902,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	0,00	0,00
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	6.366.593.272,00

URAIAN	2019	2018
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	4.000.000.000,00	6.366.593.272,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	(4.000.000.000,00)	(6.366.593.272,00)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	54.179.786.960,34	53.246.323.491,96
Saldo Sisa UP dan Kas di Bendahara Penerimaan TA 2018	0,00	0,00
Koreksi Saldo Kas di Bendahara BOS 2018	0,00	2.884.522,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	54.179.786.960,34	53.249.208.013,96
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	54.458.177.887,30	52.984.778.749,00
Saldo Sisa UP TA 2019	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	54.458.177.887,30	52.984.778.749,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	(278.390.926,96)	264.429.264,96
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	25.819.576.647,13	(7.299.631.680,68)
Saldo Awal Kas	24.719.118.450,75	32.018.750.131,43
Saldo Akhir Kas	50.538.695.097,88	24.719.118.450,75
- Kas di BUD	36.180.150.139,88	18.691.080.590,79
- Kas Di Bendahara Penerimaan	205.350.000,00	41.954.000,00
- Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	63.952,00
- Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	5.244.810.678,00	4.365.562.861,00
- Kas di Bendahara BOS	8.904.792.822,00	1.620.457.046,96
- Kas Lainnya	3.591.458,00	0,00
- Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	50.538.695.097,88	24.719.118.450,75

  
 BUPATI SAMOSIR,  
  
 Drs. RAPHIN SIMBOLON, MM

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. UMUM**

Pemerintah Kabupaten Samosir dalam rangka mewujudkan visi dan misinya yaitu “Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing Berbasis pada Pariwisata dan Pertanian,” dan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah senantiasa menerapkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

### **I.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Samosir menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pada dasarnya LKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir selama Tahun Anggaran 2019 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Samosir berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019.

### **I.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 89 Seri E Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
  15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 43 Seri A Nomor 51);
  18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Lampiran XII atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 38 Seri F Nomor 398);
  19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas lampiran XII Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 50 Seri F Nomor 462);
  20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran XII Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 50 Seri F Nomor 462);
  21. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
  22. Peraturan Bupati Samosir Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 44 Seri F Nomor 589);
  23. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir



Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

24. Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
25. Peraturan Bupati Samosir Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 34 Seri F Nomor 510);
26. Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 34 Seri F Nomor 510);
27. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 34 Seri F Nomor 510);
28. Peraturan Bupati Samosir Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri F Nomor 539).

#### **I.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

##### **I.4.1. Unsur Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Samosir yang terdiri PPKD (BUD), SKPD dan BLUD. LKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

##### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan didasarkan pada LRA SKPKD.

## **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

## **3. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

## **4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

## **5. Neraca**

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas.

## **6. Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2019.

## **7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan Keuangan BUD. Laporan SKPD Terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan keuangan BUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### **I.4.2 Entitas**

Untuk Tahun Anggaran 2019, entitas dalam Pemerintah Kabupaten Samosir yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir meliputi:

## a. Entitas Akuntansi:

No	SKPD	No	SKPD
1	Sekretariat Daerah Kabupaten	21	Dinas Pertanian
2	Sekretariat DPRD	22	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	Inspektorat Daerah Kabupaten	23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Dinas Pendidikan	24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	Dinas Kesehatan	25	Badan Pendapatan Daerah
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26	Badan Kepegawaian Daerah
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Satuan Polisi Pamong Praja	28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Dinas Sosial	29	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	30	Kecamatan Pangururan
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa	31	Kecamatan Simanindo
12	Dinas Ketahanan Pangan	32	Kecamatan Ronggurnihuta
13	Dinas Lingkungan Hidup	33	Kecamatan Harian
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34	Kecamatan Sianjurnulamula
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35	Kecamatan Siotio
16	Dinas Perhubungan	36	Kecamatan Palipi
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	37	Kecamatan Nainggolan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	38	Kecamatan Onan Runggu
19	Dinas Pariwisata	39	UPTD Balai Latihan Kerja
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	40	UPTD Kebun Raya Samosir

## b. Entitas BLUD: RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir

**I.4.3. Kebijakan Konversi**

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Konversi yang dilakukan mencakup struktur APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dalam LRA. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan akun-akun LRA menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 serta khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

Di tengah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Samosir menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan basis akrual, perlu diakui bahwa dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan struktur pelaporan, perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA, pada periode penyusunan Laporan Keuangan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Samosir juga dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan pemetaan ulang atas belanja modal tahun 2019, saldo awal, dan perubahan umur ekonomis atas Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan dimaksud.

## **I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan
  - 1.1      Umum
  - I.2.      Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - I.2.      Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - I.3.      Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
  - I.4.      Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II     Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian target Kinerja APBD
  - II.1.     Ekonomi Makro
  - II.2.     Kebijakan Keuangan
  - II.3.     Indikator Pencapaian Kinerja APBD
- Bab III    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
  - III.1.    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan
  - III.2.    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program
  - III.3.    Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja
- Bab IV     Kebijakan Akuntansi
  - IV.1.     Entitas Pelaporan
  - IV.2.     Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - IV.3.     Kebijakan Akuntansi
- Bab V     Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - V.1.     Pendapatan - LRA
  - V.2.     Belanja
  - V.3.     Transfer
  - V.4.     Surplus/Defisit
  - V.5.     Pembiayaan
  - V.6.     Komponen-komponen Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - V.7.     Pendapatan -LO
  - V.8.     Beban
  - V.9.     Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
  - V.10.    Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
  - V.11.    Pos Luar Biasa

- V.12. Surplus/Defisit Laporan Operasional
- V.13. Komponen Perubahan Ekuitas
- V.14. Aset
- V.15. Kewajiban
- V.16. Ekuitas
- V.17. Komponen-komponen Arus Kas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

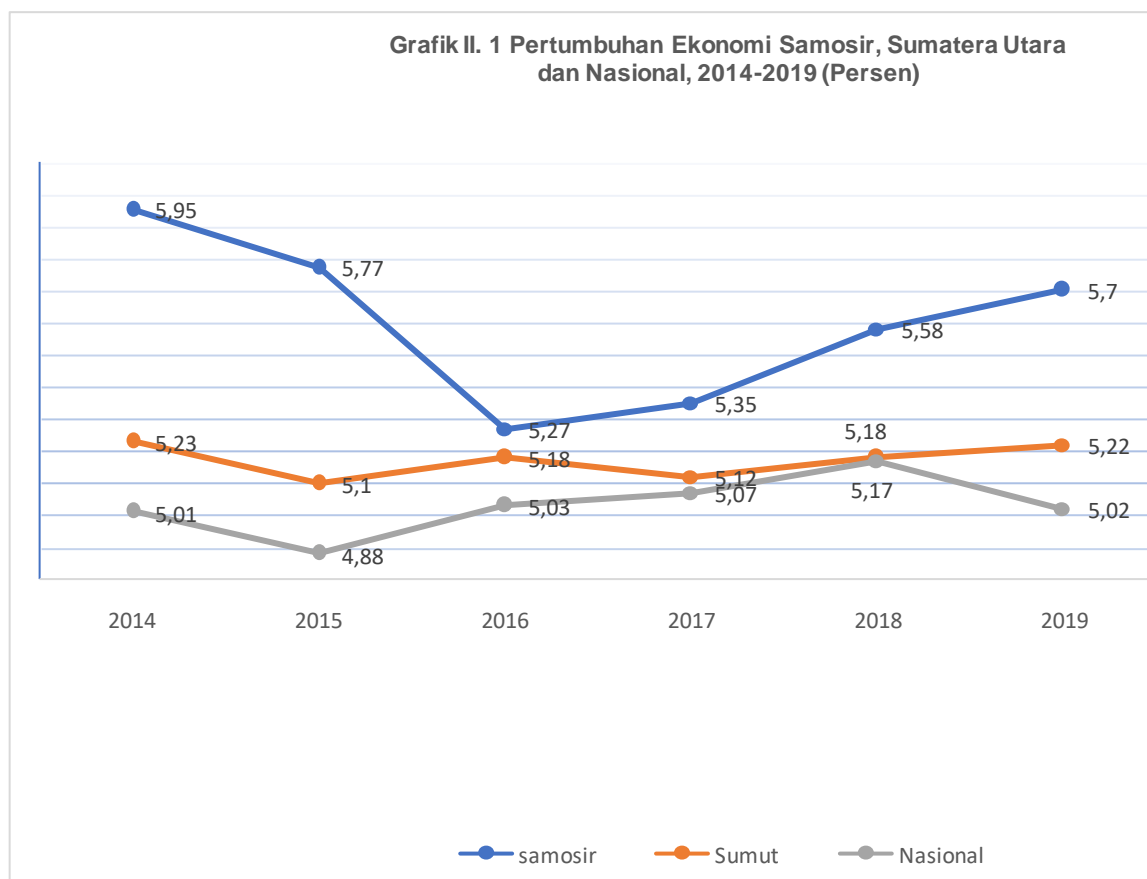
#### **II.1 Ekonomi Makro**

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Samosir sampai dengan tahun 2019 (berdasarkan data sangat sementara yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir) dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **II.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu fungsi pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dilakukan melalui kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai kinerja pemerintah daerah yang baik. Kinerja yang baik bisa terwujud jika pertumbuhan ekonomi daerah berjalan secara efektif dan efisien. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut akan menjadi modal kemandirian daerah, sehingga aktivitas perekonomian akan mengarah pada peningkatan investasi pembangunan perekonomian daerah.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir 2014 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi. Dibandingkan Tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir sekama tahun 2016 mengalami penurunan, kemudian berangsur angsur mengalami kenaikan ditahun 2017, 2018 dan 2019. Selama periode 2014 sampai dengan 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pertumbuhan Ekonomi Samosir dari tahun 2014 hingga tahun 2019 dapat dilihat seperti grafik dibawah ini:



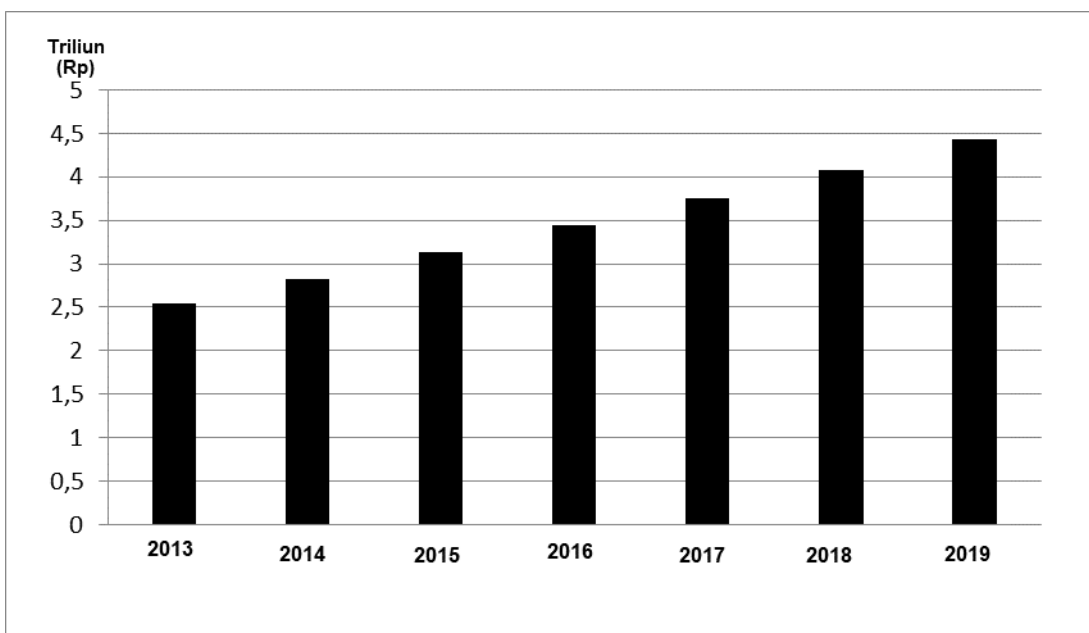
Sumber : BPS Samosir (data sangat sementara)

## II.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik di suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

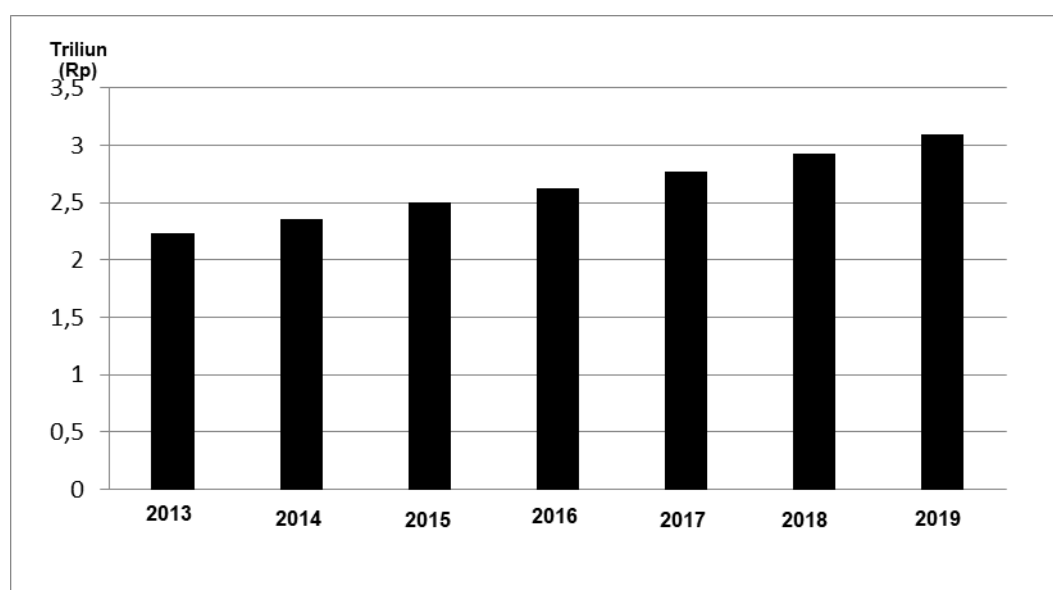
PDRB Kabupaten Samosir yang di hitung berdasarkan Atas Dasar Harga yang Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kabupaten Samosir terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada data PDRB tahun 2013 sebesar Rp2.546.776 juta, tahun 2014 sebesar Rp2.838.075 juta, tahun 2015 sebesar Rp3.143.844 juta, tahun 2016 sebesar Rp3.442.976 juta, tahun 2017 sebesar Rp3.751.361 juta, tahun 2018 sebesar Rp4.085.203 juta, tahun 2019 sebesar Rp4.434.721,24 juta. Kenaikan PDRB ADHB Kabupaten Samosir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut:



**Grafik II.2 Data PDRB (ADHB) dari Tahun 2013 sampai dengan 2019 dalam Triliun**

Sumber: BPS-Kab. Samosir (Data sangat Sementara)

Sama halnya dengan PDRB Atas Dasar Yang Berlaku (ADHB), PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir Tahun 2019, PDRB (ADHK) tahun 2013 sebesar Rp2.234.088 juta, tahun 2014 sebesar Rp2.367.103 juta, tahun 2015 sebesar Rp2.503.779 juta, tahun 2016 sebesar Rp2.635.768 juta, tahun 2017 sebesar Rp2.776.847 juta, tahun 2018 sebesar Rp2.931.698 juta dan tahun 2019 sebesar Rp3.098.740,91 juta. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan PDRB ADHK Kabupaten Samosir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik II.3 Data PDRB (ADHK) Tahun 2013 sampai dengan 2019 dalam Triliun**

Sumber: BPS-Kab. Samosir (data sangat sementara)

Jika kita lihat Distribusi PDRB Kabupaten Samosir tahun 2018 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha, Pembentukan PDRB masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai mencapai Rp2.084,6 milyar (51,03 persen), yang diikuti oleh kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar Rp482,7 milyar (11,82 persen), kategori perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor Rp444,6 milyar (10,88 persen), dan kategori bangunan sebesar Rp443,5 milyar (10,86 persen). Sementara kategori-kategori yang lain masing-masing hanya memberikan peranan kurang dari 6 persen.

### **II.1.3 Pendapatan Per Kapita**

Pendapatan per kapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu wilayah. Pendapatan per kapita bisa menjadi patokan untuk melihat tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dari sebuah wilayah. Demikian juga dengan Kabupaten Samosir, peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Samosir. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Samosir dapat dipicu dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan laju inflasi yang terkendali. Pendapatan per kapita Kabupaten Samosir pada tahun 2019 mencapai nilai Rp35,14 juta, mengalami peningkatan sebesar 8,22 persen bila dibandingkan dengan tahun 2018.

### **II.1.4 Lapangan Pekerjaan**

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Samosir pada tahun 2019 sebanyak 66.999 orang atau menurun sebanyak 898 orang bila dibanding tahun 2018 yang sebanyak 67.897 orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Samosir pada tahun 2019 mencapai 66.999 orang, naik sebanyak 16 orang dibanding tahun 2018 yang sebanyak 66.983 orang. Sektor pertanian tetap menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu mencapai 59,70% pada tahun 2019.

### **II.1.5 Indikator Kemiskinan**

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Samosir pada Maret 2019 sebesar 12,52 persen (15,79 ribu jiwa), atau turun sebanyak (6,40%) dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2018 sebesar 13,38 persen (16,81 ribu jiwa). Penurunan tersebut merupakan penurunan yang tercepat ke-tiga di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 6,40 persen selain itu merupakan yang terendah sejak tahun 2010.

## **II.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan Keuangan Daerah mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Samosir sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 sampai dengan 2021 yaitu “terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing berbasis pariwisata dan pertanian”.

## **II.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka berbagai prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi daerah dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu juga ditetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan struktur APBD, Kebijakan keuangan daerah dibagi ke dalam 3(tiga) arah kebijakan: pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan.

## **II.2.2 Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah kabupaten yang diharapkan akan dapat menunjang atau melengkapi anggaran belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari Pemerintah Pusat telah dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Hal ini terus-menerus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Dengan upaya tersebut maka diharapkan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sedikit demi sedikit akan dapat terwujud.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut merupakan prakiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak daerah, jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten Samosir antara lain: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-PP) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- c. Pendapatan daerah merupakan prakiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- d. Hasil retribusi terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan

pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian telekomunikasi, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal dan lain lain.

Arah kebijakan pendapatan daerah yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah adalah dalam meminimalisir penambahan beban bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah maka arah pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan potensi yang ada;
- b. Menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah secara optimal;
- c. Pengelolaan administrasi penerimaan daerah yang potensial dengan tetap meminimalisir meningkatnya pembebanan kepada masyarakat.

### **II.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan prinsip disiplin anggaran serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Kebijakan belanja daerah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah direncanakan berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Belanja daerah diarahkan untuk mengikuti program prioritas;
- c. Pengalokasian anggaran belanja menggunakan azas efisiensi dan efektivitas dengan tidak mengganggu kelancaran serta tidak menurunkan standar pelayanan masyarakat;
- d. Pengalokasian belanja yang bersifat pelayanan publik didasarkan atas kebutuhan riil masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### **II.2.3.1 Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung yang sebagian besar digunakan untuk membiayai aparatur Pemerintah Kabupaten Samosir yang penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
  - 1) Peningkatan alokasi belanja tidak langsung terutama diprioritaskan untuk belanja pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan kinerja dengan uraian sebagai berikut:
    - a) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- b) *Accres* dari belanja pegawai (gaji pokok dan tugas tunjangan) untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, mutasi dan penambahan PNSD sebesar  $\pm 2,5\%$  dari gaji pokok;
  - c) Tambahan penghasilan PNSD diberikan berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi, dimana besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, demikian juga dengan pemberian intensif kepada PNSD;
  - d) Kepada PNS non pejabat fungsional/struktural diberikan tunjangan umum;
  - e) Pemberian tunjangan kependidikan bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluhan;
  - f) Pemberian biaya pemungutan pajak daerah dan pajak negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada:
- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106);
  - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasioanal Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
- 3) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan sebagai berikut:
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis 'Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota " termasuk didalamnya "Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota"'.  
Belanja bunga tidak dianggarkan
- b. Belanja Bunga  
Belanja bunga tidak dianggarkan
- c. Belanja Subsidi  
Belanja Subsidi tidak dianggarkan
- d. Belanja Hibah  
Penganggaran Belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 20011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 298 tentang penerima Hibah dan Bansos. Belanja Hibah dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dilakukan seperti Badan Narkotika Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan, BOP PAUD.

e. Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Pendapatan pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2019.

1) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

2) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

3) Direncanakan bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan tidak melebihi bantuan kepada partai politik pada APBD Provinsi.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### II.2.3.2 Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Diantara kebijakan tersebut adalah :

- a. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- c. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk investasi bidang pendidikan.

- d. Penyusunan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus mengedepankan disiplin anggaran serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.
- e. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
  1. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
  2. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang - undangan;
  3. Untuk Dana alokasi umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
  4. Dana alokasi khusus fisik dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Dana alokasi khusus non fisik dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bersifat non fisik antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  6. Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping/*cost sharing* pada program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **II.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja pemerintah daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2019. Penetapan capaian kinerja pemerintah daerah untuk Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019. Kinerja APBD dapat diuraikan menurut bidang sebagai berikut.

#### **1. Bidang Pendidikan**

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang pendidikan sebesar Rp52.280.722.649,00 dan terealisasi sebesar Rp50.748.323.807,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.1 Rincian Anggaran Bidang Pendidikan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.890.199.210,00	3.851.699.815,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83.950.000,00	68.951.796,00
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	253.600.000,00	251.390.190,00
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	47.486.002.899,00	24.103.665.247,00
5	Program Pendidikan Menengah	1.500.000,00	1.500.000,00
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	310.655.000,00	309.154.999,00
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	254.815.540,00	246.322.600,00
8	Non Program	0,00	21.915.639.160,00
<b>Total</b>		<b>52.280.722.649,00</b>	<b>50.748.323.807,00</b>

## 2. Bidang Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Kesehatan sebesar Rp62.365.519.697,00 dan terealisasi sebesar Rp54.596.186.921,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.2 Rincian Anggaran Bidang Kesehatan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.156.899.534,00	7.433.753.720,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.525.978.000,00	2.524.084.000,00
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.373.389.555,00	2.336.190.641,00
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	182.363.600,00	180.301.900,00
5	Program Pengawasan Obat dan Makanan	62.310.000,00	11.520.000,00
6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.565.671.500,00	1.501.167.912,00
7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	16.480.250,00	16.480.250,00
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.389.807.000,00	956.462.880,00
9	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.144.013.500,00	1.435.204.986,00
10	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	3.603.204.876,00	1.652.170.719,00
11	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB	48.380.000,00	41.920.000,00
12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Non Degeneratif	18.542.800,00	9.492.000,00
13	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Degeneratif	2.344.944.449,00	2.332.239.448,00
14	Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	71.422.070,00	58.054.070,00
15	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	199.389.000,00	181.682.000,00
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.000.000,00	11.338.000,00
17	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	120.000.000,00	117.717.800,00
18	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	404.076.992,00	403.163.050,00
19	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	188.000.000,00	130.039.638,00
20	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	649.702.000,00	643.643.000,00



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
21	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	413.000.000,00	353.000.000,00
22	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	21.365.562.861,00	19.430.475.267,00
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	230.000.000,00	224.467.849,00
24	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	8.458.000.000,00	6.845.650.838,00
25	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	6.822.381.710,00	5.765.966.953,00
<b>Total</b>		<b>62.365.519.697,00</b>	<b>54.596.186.921,00</b>

### 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 122.066.201.541,00 dan terealisasi sebesar Rp112.646.189.733,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.3 Rincian Anggaran Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.110.628.421,00	2.094.337.144,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	566.956.000,00	556.159.600,00
3	Program Pembangunan, Peningkatan Jalan & Jembatan	93.293.356.739,00	86.874.562.987,00
4	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.984.111.537,00	2.722.849.127,00
5	Program pembangunan turap/talud/bronjong	7.134.050.676,00	6.791.630.326,00
6	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1.310.000.000,00	1.308.797.454,00
7	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	3.332.140.002,00	2.588.839.500,00
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	9.384.525.080,00	8.589.717.595,00
9	Program Perencanaan Tata Ruang	459.748.086,00	53.050.000,00
10	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	388.685.000,00	0,00
11	Program Rehabilitasi/ Rekondisi Jalan, Bangunan Pelengkap dan Utilitas	1.102.000.000,00	1.066.246.000,00
<b>Total</b>		<b>122.066.201.541,00</b>	<b>112.646.189.733,00</b>

### 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp26.132.173.630,00 dan terealisasi sebesar Rp21.782.198.799,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.4 Rincian Anggaran Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.051.270.000,00	1.007.875.146,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.529.108.480,00	1.927.704.246,00
3	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1.135.000.000,00	710.051.000,00
4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	6.827.268.150,00	5.496.194.475,00
5	Program Pembangunan Jalan	8.296.560.000,00	8.077.501.000,00

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
6	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	3.850.557.000,00	2.428.867.932,00
7	Program pembangunan turap/talud/bronjong	2.442.410.000,00	2.134.005.000,00
<b>Total</b>		<b>26.132.173.630,00</b>	<b>21.782.198.799,00</b>

#### 5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp4.699.103.224,00 dan terealisasi sebesar Rp4.457.617.242,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.5 Rincian Anggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.287.205.947,00	3.229.921.905,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	499.342.642,00	359.695.652,00
3	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	146.910.150,00	140.677.000,00
4	Program peningkatan disiplin aparatur	225.942.800,00	223.231.000,00
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	290.000.000,00	266.800.000,00
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	56.416.160,00	56.366.160,00
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	78.925.000,00	66.570.000,00
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	4.460.000,00	4.460.000,00
9	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	109.900.525,00	109.895.525,00
<b>Total</b>		<b>4.699.103.224,00</b>	<b>4.457.617.242,00</b>

#### 6. Bidang Sosial

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Sosial sebesar Rp1.384.811.634,00 dan terealisasi sebesar Rp1.165.758.888,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.6 Rincian Anggaran Bidang Sosial**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	666.615.214,00	605.918.363,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	56.000.000,00	47.320.860,00
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	83.631.770,00	60.666.270,00
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	379.132.650,00	290.281.795,00
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	199.432.000,00	161.571.600,00
<b>Total</b>		<b>1.384.811.634,00</b>	<b>1.165.758.888,00</b>

## 7. Bidang Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Tenaga Kerja sebesar Rp3.885.564.929,00 dan terealisasi sebesar Rp3.773.072.914,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.7 Rincian Anggaran Bidang Tenaga Kerja

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	989.027.897,00	971.283.239,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	104.260.000,00	101.054.408,00
3	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	446.970.032,00	407.016.150,00
4	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	73.747.000,00	65.768.000,00
5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.500.000.000,00	1.479.820.000,00
6	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	225.620.000,00	225.060.000,00
7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	85.440.000,00	85.380.000,00
8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	360.500.000,00	338.999.117,00
9	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	100.000.000,00	98.692.000,00
<b>Total</b>		<b>3.885.564.929,00</b>	<b>3.773.072.914,00</b>

## 8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak sebesar Rp2.482.110.816,00 dan terealisasi sebesar Rp2.330.038.016,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.8 Rincian Anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.054.277.016,00	1.049.695.885,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	107.850.000,00	107.781.324,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	396.590.000,00	377.910.000,00
4	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	47.700.000,00	47.150.000,00
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	99.500.000,00	92.895.000,00
6	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	24.040.000,00	24.040.000,00
7	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	400.000.000,00	399.926.507,00
8	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	232.153.800,00	230.639.300,00
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	120.000.000,00	0,00
<b>Total</b>		<b>2.482.110.816,00</b>	<b>2.330.038.016,00</b>

## 9. Bidang Pangan

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang pangan sebesar Rp977.811.941,00 dan terealisasi sebesar Rp975.677.002,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.9 Rincian Anggaran Bidang Pangan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	750.978.331,00	750.013.992,00
2	Informasi Akses dan Distribusi Pangan	52.599.710,00	52.559.610,00
3	Peningkatan Keamanan Pangan	60.145.500,00	60.075.500,00
4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	114.088.400,00	113.027.900,00
<b>Total</b>		<b>977.811.941,00</b>	<b>975.677.002,00</b>

## 10. Bidang Pertanian

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang pertanian sebesar Rp5.305.935.950,00 dan terealisasi sebesar Rp6.918.874.236,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.10 Rincian Anggaran Bidang Pertanian

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5.305.935.950,00	6.918.874.236,00
<b>Total</b>		<b>5.305.935.950,00</b>	<b>6.918.874.236,00</b>

## 11. Bidang Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp5.515.315.652,00 dan terealisasi sebesar Rp5.305.935.950,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.11 Rincian Anggaran Bidang Lingkungan Hidup

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.202.984.789,00	3.101.476.691,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133.700.000,00	111.310.500,00
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.419.254.340,00	1.384.256.050,00
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	233.201.523,00	200.975.609,00
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	19.730.000,00	13.140.000,00
6	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	32.000.000,00	30.500.000,00
7	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	310.025.000,00	300.386.800,00
8	Program Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	80.000.000,00	79.472.300,00
9	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	65.000.000,00	65.000.000,00
10	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	19.420.000,00	19.418.000,00
<b>Total</b>		<b>5.515.315.652,00</b>	<b>5.305.935.950,00</b>

## 12. Bidang Pencatatan Sipil

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Pencatatan sipil sebesar Rp1.743.792.510,00 dan terealisasi sebesar Rp1.738.723.024,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.12 Rincian Anggaran Bidang Pencatatan Sipil

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.165.636.639,00	1.161.240.862,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.265.871,00	75.005.412,00
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	54.620.000,00	54.620.000,00
4	Program Kebijakan dan Pendaftaran Kependudukan	205.620.000,00	205.236.750,00
5	Program Informasi Kependudukan	242.650.000,00	242.620.000,00
	<b>Total</b>	<b>1.743.792.510,00</b>	<b>1.738.723.024,00</b>

## 13. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp4.647.081.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.957.449.761,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.13 Rincian Anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	659.364.000,00	656.581.853,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.280.955.000,00	1.253.835.408,00
3	Program Keluarga Berencana	2.696.812.000,00	2.038.852.500,00
4	Program pelayanan kontrasepsi	9.950.000,00	8.180.000,00
	<b>Total</b>	<b>4.647.081.000,00</b>	<b>3.957.449.761,00</b>

## 14. Bidang Perhubungan

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Perhubungan sebesar Rp4.111.066.847,00 dan terealisasi sebesar Rp3.465.424.173,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.14 Rincian Anggaran Bidang Perhubungan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.513.956.847,00	1.450.319.623,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	385.252.000,00	275.736.550,00
3	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.043.259.000,00	625.298.499,00
4	Program peningkatan pelayanan angkutan	750.599.000,00	698.260.400,00
5	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	418.000.000,00	415.809.101,00
	<b>Total</b>	<b>4.111.066.847,00</b>	<b>3.465.424.173,00</b>

## 15. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Komunikasi dan Informatika sebesar 4.034.617.971,00 dan terealisasi sebesar Rp3.949.621.784,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.15 Rincian Anggaran Bidang Komunikasi dan Informatika**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.953.690.220,00	2.951.248.687,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44.218.024,00	44.216.000,00
3	Program Pelayanan dan Pengamanan Persandian	29.690.000,00	29.292.000,00
4	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	180.257.917,00	139.766.012,00
5	Program kerjasama informasi dengan mas media	782.796.810,00	741.135.585,00
6	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	19.965.000,00	19.965.000,00
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	24.000.000,00	23.998.500,00
	<b>Total</b>	<b>4.034.617.971,00</b>	<b>3.949.621.784,00</b>

#### 16. Bidang Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Penanaman Modal sebesar Rp1.170.171.577,00 dan terealisasi sebesar Rp1.161.059.001,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.16 Rincian Anggaran Bidang Penanaman Modal**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	707.894.577,00	699.212.981,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.006.000,00	20.006.000,00
3	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	345.871.000,00	345.442.374,00
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	56.400.000,00	56.397.646,00
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	40.000.000,00	40.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>1.170.171.577,00</b>	<b>1.161.059.001,00</b>

#### 17. Bidang Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Kebudayaan sebesar Rp2.404.922.152,00 dan terealisasi sebesar Rp2.219.552.447,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.17 Rincian Anggaran Bidang kebudayaan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	825.083.352,00	814.303.237,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74.200.000,00	65.869.060,00
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	384.500.000,00	362.993.630,00
4	Program peningkatan peran serta kepemudaan	454.410.000,00	445.478.683,00
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	200.000.000,00	99.940.500,00
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	466.728.800,00	430.967.337,00
	<b>Total</b>	<b>2.404.922.152,00</b>	<b>2.219.552.447,00</b>

## 18. Bidang Perpustakaan

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Perpustakaan sebesar Rp1.045.288.082,00 dan terealisasi sebesar Rp1.041.751.144,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.18 Rincian Anggaran Bidang Perpustakaan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	544.322.535,00	544.004.207,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	182.025.595,00	181.234.595,00
3	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	137.991.490,00	137.981.040,00
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	20.557.785,00	20.557.587,00
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	160.390.677,00	157.973.715,00
	<b>Total</b>	<b>1.045.288.082,00</b>	<b>1.041.751.144,00</b>

## 19. Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.032.571.000,00 dan terealisasi sebesar Rp999.061.944,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.19 Rincian Anggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	732.571.000,00	715.177.447,00
2	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	300.000.000,00	283.884.497,00
	<b>Total</b>	<b>1.032.571.000,00</b>	<b>999.061.944,00</b>

## 20. Bidang Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Pariwisata sebesar Rp15.671.669.839,00 dan terealisasi sebesar Rp14.093.798.315,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.20 Rincian Anggaran Bidang Pariwisata

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.510.574.839,00	1.503.891.436,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	108.500.000,00	107.899.700,00
3	Program Peningkatan Keahlian dan Kompetensi Pelaku Kepariwisata	481.634.000,00	480.872.221,00
4	Program Penguatan Vokasi Kepariwisata berbasis Budaya	206.104.000,00	206.096.600,00
5	Peningkatan Daya saing Industri ke Pariwisata	125.000.000,00	124.948.700,00
6	Program Penataan Sarana dan Prasarana Kepariwisata	100.300.000,00	100.100.000,00
7	Program pengembangan pemasaran pariwisata	2.533.613.613,00	2.444.935.357,00
8	Program pengembangan destinasi pariwisata	10.605.943.387,00	9.125.054.301,00
	<b>Total</b>	<b>15.671.669.839,00</b>	<b>14.093.798.315,00</b>

## 21. Bidang Pertanian

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Pertanian sebesar Rp9.153.080.864,00 dan terealisasi sebesar Rp8.747.651.237,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.21 Rincian Anggaran Bidang Pertanian

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.875.559.864,00	1.827.297.143,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177.000.000,00	165.708.560,00
3	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	737.050.000,00	726.102.676,00
4	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	300.000.000,00	235.490.982,00
5	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	378.310.000,00	336.876.000,00
6	Program peningkatan produksi hasil peternakan	220.535.000,00	216.145.000,00
7	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna	45.870.000,00	33.871.000,00
8	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	5.418.756.000,00	5.206.159.876,00
	<b>Total</b>	<b>9.153.080.864,00</b>	<b>8.747.651.237,00</b>

## 22. Bidang Perencanaan

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Perencanaan sebesar Rp6.073.895.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.530.528.428,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.22 Rincian Anggaran Bidang Perencanaan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.992.240.629,00	1.927.333.894,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	196.000.000,00	192.278.568,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	73.760.000,00	57.536.000,00
4	Program Penelitian dan Pengembangan	308.803.371,00	255.601.845,00
5	Program Pengembangan e-Government	798.395.000,00	716.250.170,00
6	Program pengembangan data/informasi	135.211.000,00	106.291.307,00
7	Program perencanaan pembangunan daerah	676.755.000,00	582.674.931,00
8	Program perencanaan pembangunan ekonomi	675.000.000,00	648.243.109,00
9	Program perencanaan sosial dan budaya	350.100.000,00	258.421.029,00
10	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	867.630.000,00	785.897.575,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.073.895.000,00</b>	<b>5.530.528.428,00</b>



## 23. Bidang Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Pengawasan sebesar Rp1.808.434.968,00 dan terealisasi sebesar Rp1.656.260.687,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.23 Rincian Anggaran Bidang Pengawasan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	714.641.238,00	704.120.147,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.000.000,00	9.831.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27.960.000,00	27.892.093,00
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.055.833.730,00	914.417.447,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.808.434.968,00</b>	<b>1.656.260.687,00</b>

## 24. Bidang Kepegawaian

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Kepegawaian sebesar Rp1.998.834.974,00 dan terealisasi sebesar Rp1.820.543.183,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.24 Rincian Anggaran Bidang Kepegawaian

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	722.910.000,00	713.995.357,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38.500.000,00	38.464.572,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	768.961.304,00	616.300.500,00
4	Program pembinaan dan pengembangan Aparatur	403.463.670,00	386.782.754,00
5	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	65.000.000,00	65.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.998.834.974,00</b>	<b>1.820.543.183,00</b>

## 25. Bidang Keuangan

Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran pada Bidang Keuangan sebesar Rp9.636.211.040,00 dan terealisasi sebesar Rp9.311.218.484,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.25 Rincian Anggaran Bidang Keuangan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.021.040.652,00	6.878.487.440,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.073.635.800,00	1.067.914.386,00

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	378.045.568,00	360.844.370,00
4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.145.289.020,00	992.977.288,00
5	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	18.200.000,00	10.995.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.636.211.040,00</b>	<b>9.311.218.484,00</b>

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **III.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

##### **III.1.1 Target Kinerja Keuangan dan Perubahannya**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum pada APBD. Selama tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan Kebutuhan sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019. Perubahan ini adalah untuk mengakomodir anggaran untuk pembayaran Hutang tahun sebelumnya dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2018. Selain itu juga untuk menyesuaikan perubahan rincian objek belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus akibat perubahan Petunjuk Pelaksanaan Teknis dari Kementerian terkait pada Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata.
2. Peraturan Bupati Samosir Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019. Perubahan ini untuk menampung perubahan terkait DAU Tambahan terkait Dana Kelurahan dan BOP PAUD.
3. Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019. Perubahan ini adalah untuk mengakomodir perubahan rincian belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan perubahan anggaran Belanja Tidak langsung yaitu Belanja Pegawai.
4. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019. Perubahan ini adalah untuk mengakomodir perubahan Belanja Tidak Langsung yakni Belanja Pegawai.
5. Peraturan Bupati Samosir Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019. Peraturan ini adalah untuk menampung penjabaran Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2019 guna mengesahkan keseluruhan perubahan penjabaran Pertama, Kedua Ketiga dan Keempat Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten samosir Tahun 2019 dan Perubahan anggaran akibat adanya efisiensi dan penambahan kegiatan baru guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan tahun 2019.

6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 setelah Pengesahan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Perubahan ini adalah untuk mengakomodir adanya Dana Hibah dari Pemerintah Atasan berupa Hibah Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar SD/SMP berupa BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

### III.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2019 anggaran Belanja Daerah Kabupaten Samosir ditetapkan sebesar Rp905.247.212.236,62 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp64.942.653.826,83, Dana Perimbangan sebesar Rp645.234.442.591,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp174.632.979.753,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran yang sebesar Rp20.437.136.065,79 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

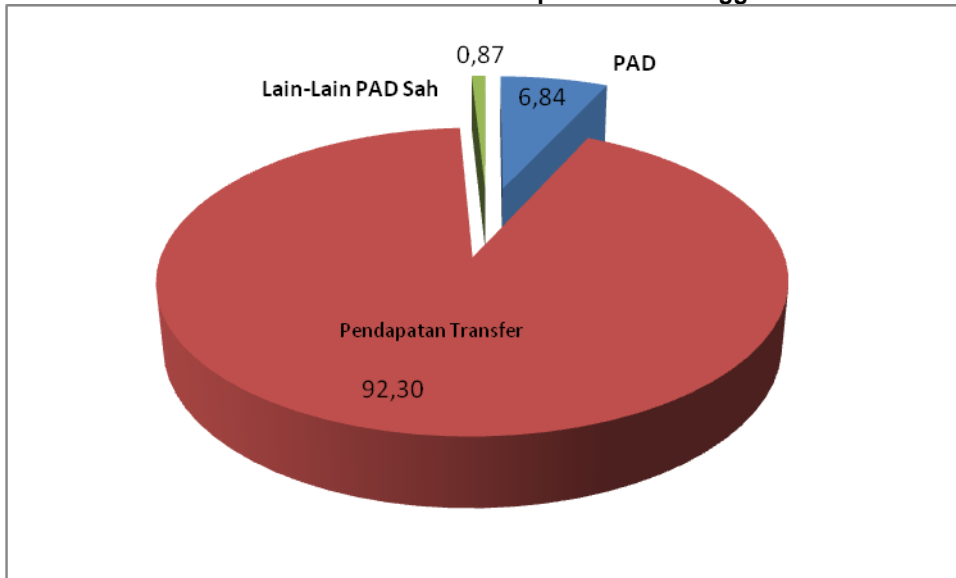
Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Samosir selama Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat secara ringkas pada tabel III.1 berikut ini:

**Tabel III.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten SamosirTA 2019**

Uraian		Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
		(Rp)	(Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
I	Pendapatan	884.810.076.170,83	885.111.158.054,09	(301.081.883,26)	100,03
I.1.	Pendapatan Asli Daerah	64.942.653.826,83	60.497.449.963,09	4.445.203.863,74	93,16
I.2.	Dana Perimbangan	645.234.442.591,00	636.204.549.291,00	9.029.893.300,00	98,60
I.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	174.632.979.753,00	188.389.164.470,00	(13.756.184.717,00)	107,88
II	Belanja	905.247.212.236,62	855.013.190.480,00	50.234.021.756,62	94,45
II.1.	Belanja Tidak Langsung	499.666.661.841,62	489.937.667.143,00	9.728.994.698,62	98,05
II.2.	Belanja Langsung	405.580.550.395,00	365.075.523.337,00	40.505.027.058,00	90,01
	Surplus/Defisit	(20.437.136.065,79)	30.097.967.574,09	(50.535.103.639,88)	147,27
III	Pembiayaan	20.437.136.065,79	20.437.136.065,79	0,00	100,00
III.1.	Penerimaan	24.437.136.065,79	24.437.136.065,79	0,00	100,00
III.2.	Pengeluaran	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
	SiLPA Tahun Berjalan	0,00	50.535.103.639,88	(50.535.103.639,88)	0,00

Tabel III.1 di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp885.111.158.054,09 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp884.810.076.170,83 atau 100,03%. Pelampauan tertinggi realisasi terhadap target terdapat pada akun penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan realisasi sebesar Rp187.618.964.966,00 atau 107,88% dari target yang telah ditetapkan. Secara grafik pendapatan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

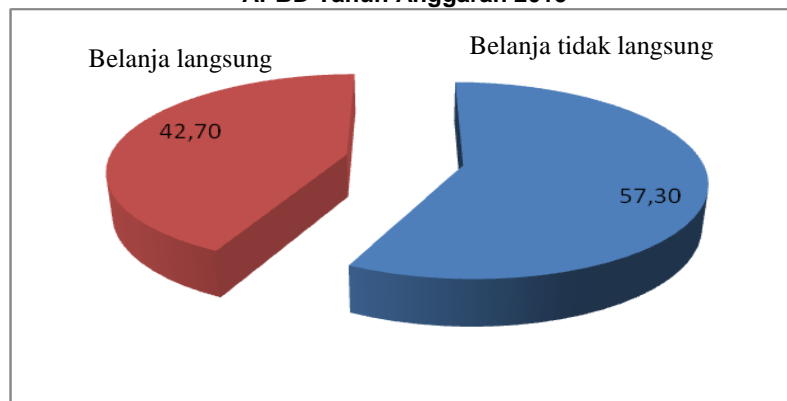
**Grafik III.1 Persentase Pendapatan Tahun Anggaran 2019**



Ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap pemerintah pusat masih sangat dominan terlihat dari grafik diatas.

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah, pada Tahun Anggaran 2019 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp905.247.212.236,62 dan direalisasikan sebesar Rp855.013.190.480,00 atau 94,45% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp50.234.021.756,62 atau 5,55%. Berdasarkan grafik III.2 di bawah tampak bahwa belanja langsung mendapatkan alokasi dana yang terbesar dibandingkan dengan belanja tidak langsung, yaitu sebesar 57,30% dari total APBD tahun anggaran 2019.

**Grafik III.2 Persentase Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap APBD Tahun Anggaran 2019**



Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja dapat dilihat bahwa belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung pada Pemerintah Kabupaten Samosir. Hal ini terjadi akibat kenaikan bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Hal ini juga membuktikan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp499.666.661.841,62 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp489.937.667.143,00 atau sebesar 98,05%. Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas:

**Tabel III.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2019**

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Pegawai	328.072.878.601,62	320.420.999.605,00	97,67
2	Belanja Hibah	6.798.600.000,00	5.646.012.000,00	83,05
3	Belanja Bantuan Sosial	3.300.000.000,00	3.179.225.000,00	96,34
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.128.407.540,00	2.128.407.540,00	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	157.626.775.700,00	157.590.921.998,00	99,98
6	Belanja Tidak Terduga	1.740.000.000,00	972.101.000,00	55,87
	<b>Jumlah</b>	<b>499.666.661.841,62</b>	<b>489.937.667.143,00</b>	<b>98,05</b>

Belanja langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir. Pada tahun 2019, Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp405.580.550.395,00 dan terealisasi sebesar Rp365.075.523.337,00 atau 90,01%, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel III.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2019**

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Pegawai	25.579.627.344,00	21.956.031.600,00	85,83
2	Belanja Barang dan Jasa	200.225.049.372,00	179.025.657.358,00	89,41
3	Belanja Modal	179.775.873.679,00	164.093.834.379,00	91,28
	<b>Jumlah</b>	<b>405.580.550.395,00</b>	<b>365.075.523.337,00</b>	<b>90,01</b>

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp20.437.136.065,79 dengan realisasi Rp20.437.136.065,79 atau 100,00%, realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Samosir menganggarkan pengeluaran pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp4.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100,00%.

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap

indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Tabel III.4 Alokasi Belanja Daerah per Urusan TA 2019

No.	Urusan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
<b>I</b>	<b>Wajib</b>		
1	Dinas Pendidikan	234.495.894.961,62	227.877.235.311,00
2	Dinas Kesehatan	63.536.539.779,00	57.667.477.088,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	41.590.822.754,00	39.220.119.078,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	126.029.512.559,00	116.568.421.052,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan	39.334.993.089,00	32.805.982.684,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.244.704.084,00	3.190.498.021,00
7	Satuan Polisi Pamomg Praja	6.144.188.246,00	5.877.197.033,00
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.489.829.907,00	1.438.900.402,00
9	Dinas Sosial	3.098.672.858,00	2.870.364.485,00
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	6.082.630.506,00	5.959.095.579,00
11	UPTD Balai Latihan Kerja	335.034.994,00	320.581.989,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa	5.059.078.186,00	4.881.871.576,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	3.209.064.869,00	3.178.622.180,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	7.985.573.126,00	7.741.202.697,00
15	UPTD Kebun Raya Samosir	383.793.742,00	383.700.300,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.897.922.663,00	3.880.225.263,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.646.517.657,00	5.936.146.234,00
18	Dinas Perhubungan	6.438.753.474,00	5.750.619.517,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.748.010.459,00	5.630.515.215,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.447.297.316,00	3.478.172.580,00
21	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	4.571.874.951,00	4.349.134.450,00
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah	2.798.258.264,00	2.789.949.552,00
<b>II</b>	<b>Pilihan</b>		
22	Dinas Pariwisata	16.509.605.390,00	15.785.300.138,00
23	Dinas Pertanian	16.018.425.240,00	14.732.670.831,00
<b>III</b>	<b>Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>		
24	KDH dan WKDH	573.969.868,00	570.152.619,00
25	Sekretarian Daerah	33.468.764.465,00	30.342.928.158,00
26	Sekretariat DPRD	31.282.837.513,00	26.551.656.018,00
27	Kecamatan Pangururan	4.418.953.476,00	3.136.221.421,00
28	Kecamatan Simanindo	3.195.744.964,00	2.698.651.977,00
29	Kecamatan Palipi	2.333.518.481,00	2.238.446.995,00
30	Kecamatan Nainggolan	3.656.431.406,00	2.684.340.318,00
31	Kecamatan Onan Runggu	2.224.391.798,00	2.196.658.779,00
32	Kecamatan Ronggur Nihuta	1.823.082.622,00	1.774.684.256,00
33	Kecamatan Sianjur MulaMula	2.070.417.809,00	2.043.961.835,00
34	Kecamatan Harian	1.765.070.469,00	1.717.153.569,00
35	Kecamatan Siotio	1.167.069.077,00	1.112.228.687,00
<b>IV</b>	<b>Pengawasan</b>		

No.	Urusan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
36	Inspektorat Daerah	5.240.478.008,00	5.035.067.158,00
<b>V</b>	<b>Perencanaan</b>		
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.510.261.701,00	8.940.756.160,00
<b>VI</b>	<b>Keuangan</b>		
38	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.007.077.449,00	10.654.463.840,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	171.593.783.240,00	169.516.667.538,00
40	Badan Pendapatan Daerah	6.632.504.298,00	6.541.672.007,00
<b>VII</b>	<b>Kepegawaian</b>		
41	Badan Kepegawaian Daerah	4.153.285.488,00	3.944.413.946,00

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan.

### III.3 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 mengalami keterlambatan yang berakibat penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan oleh adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program prioritas nasional, provinsi dan inovasi daerah, peningkatan alokasi anggaran pada beberapa komponen belanja baik kebutuhan mendesak maupun prioritas untuk mengakomodasi serta menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 dan Melakukan penghematan atas penganggaran belanja yang dianggap kurang produktif. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian kinerja APBD.
2. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
3. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
4. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.
5. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;



6. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada sehingga potensi pendapatan dan keuangan terbatas;
7. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
8. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
9. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
10. Belum optimalnya pengelolaan aset;
11. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
12. Belum optimalnya wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya;
13. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **IV.1 ENTITAS PELAPORAN**

Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 adalah 40 (empat puluh) SKPD selaku entitas akuntansi. Entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Samosir yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **IV.2 BASIS AKUNTANSI**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan.

#### **IV.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir terakhir dirubah dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran XII Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar yaitu:

##### **a. Aset Lancar**

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi:

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Dari sudut penguasaannya Kas terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah;

- Kas di Bendahara Penerimaan;
  - Kas di Bendahara Pengeluaran. Dan
  - Kas Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
  - Kas Lainnya pada Bendahara BOS
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas terdiri dari:

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito 3 (tiga) bulan atau kurang;
  - Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid yang memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.
- 3) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.
- 4) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak likuid.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau
  - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

- (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
- 1) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
    - a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
    - b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
    - c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
    - d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
  - 2) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
    - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
    - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
    - d) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/ Negara.
  - 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
    - a) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
    - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
    - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
  - 4) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

- 5) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
  - 5) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non Lancar diklasifikasikan menjadi:

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.
  - a) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
  - b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi yang tidak dimaksudkan dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
- 2) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari :
  - a) Tanah;
  - b) Peralatan dan mesin;
  - c) Gedung dan bangunan;
  - d) Jalan, irigasi, dan jaringan;

- e) Aset tetap lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Kapitalisasi aset tetap untuk tahun anggaran 2019 telah mengacu kepada Lampiran XII tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir, dimana batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel IV.1 Rincian Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	Tidak Dibatasi
2	Peralatan dan Mesin	5.000.000
3	Gedung dan Bangunan	20.000.000
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	20.000.000
	- Irigasi	20.000.000
	- Jaringan	20.000.000
5	Aset Tetap Lainnya	Tidak dikapitalisasi
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dikapitalisasi

Pengolongan dan kodefikasi aset tetap serta masa manfaat aset tetap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2 Rincian Penggolongan dan Kodefikasi Aset Tetap**

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			<b>ASET TETAP</b>	
1	3	2		<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	10
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	5
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	10
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	5
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	5
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	5
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	16	Peralatan Komputer	5
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	5
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	5
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	5
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	5
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5
1	3	2	31	Senjata Api	5
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	5
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	2	34	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	35	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	36	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	37	Peralatan Olah Raga	5
1	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Gedung dan Bangunan</b>	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
1	3	3	03	Bangunan Menara	20
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	20
1	3	3	05	Tugu Peringatan	20
1	3	3	06	Candi	20
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	20
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	20
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20
1	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	10
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	10
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	10
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	10
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	10

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	10
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	10
1	3	4	10	Bangunan Air	10
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	10
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	10
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	10
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	10
1	3	4	18	Instalasi Gas	10
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	10
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	10
1	3	4	21	Jaringan Listrik	10
1	3	4	22	Jaringan Telepon	10
1	3	4	23	Jaringan Gas	10
1	3	5		<b>Aset Tetap Lainnya</b>	
1	3	5	02	Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan	5

Biaya Perolehan, di luar biaya pembelian aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan dimaksud.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

- 3) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

#### **Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan**

- a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non



- Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 4) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset lain-lain.

#### **Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya**

- a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
- c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
- d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
- e) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
- (1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
  - (2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
  - (3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan pada akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud;
  - (4) Aset tidak berwujud tidak mengakui adanya kapitalisasi atau biaya pengeluaran setelah perolehan.
- f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

## 2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Samosir. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable), Utang Bunga (Accrued Interest), Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Samosir dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah Kabupaten Samosir dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Samosir tidak memiliki Kewajiban jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

## 3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Samosir, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Samosir.

## 4. Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Samosir. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD;
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;
- c. Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.

## **5. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
  - (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - (3) bertambah volume, dan/atau
  - (4) bertambah kapasitas produksi.
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

#### **6. Transfer**

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

#### **7. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

#### **8. Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Samosir yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, nonoperasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda dan penalti serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut.

#### **9. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah;
- b. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2019. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

### V.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut:

#### V.1.1 PENDAPATAN- LRA

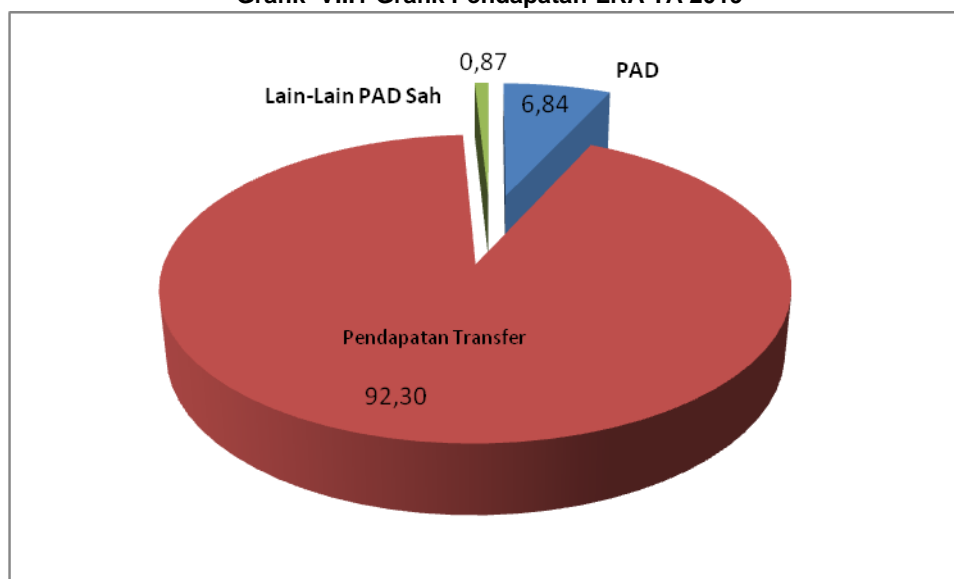
TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>885.111.158.054,09</b>	<b>802.686.254.059,36</b>

Pada TA 2019 realisasi pendapatan yaitu sebesar Rp885.111.158.054,09 atau 100,03% dari anggaran sebesar Rp884.810.076.170,83, melebihi target sebesar Rp301.081.883,26. Realisasi pendapatan tersebut meningkat sebesar Rp82.424.903.994,73 atau 10,27% dari realisasi pendapatan TA 2018 sebesar Rp802.686.254.059,36. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Tabel V.1.1 Rincian Pendapatan-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Pendapatan Asli Daerah	64.942.653.826,83	60.497.449.963,09	93,16	47.446.623.389,36
2	Pendapatan Transfer	819.867.422.344,00	816.915.639.091,00	99,64	733.482.874.670,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	7.698.069.000,00	0,00	21.756.756.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>884.810.076.170,83</b>	<b>885.111.158.054,09</b>	<b>100,03</b>	<b>802.686.254.059,36</b>

Grafik V.I.1 Grafik Pendapatan-LRA TA 2019



## V.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

TA 2019

TA 2018

(Rp)

(Rp)

**60.497.449.963,09****47.446.623.389,36**

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir. Jumlah realisasi PAD sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp60.497.449.963,09. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp64.942.653.826,83, maka jumlah realisasi tersebut lebih rendah dari anggarannya sebesar Rp4.445.203.863,74 atau 93,16%. Realisasi PAD tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.050.826.573,73 atau 27,51%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp47.446.623.389,36. PAD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.1.2 Rincian PAD-LRA TA 2019 dan 2018

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Pendapatan Pajak Daerah	16.894.040.525,00	17.342.605.511,21	102,66	14.788.292.147,60
2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.806.353.238,00	4.617.651.545,00	59,15	5.029.168.250,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.533.993.532,00	4.533.993.582,00	100,00	2.714.607.460,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	35.708.266.531,83	34.003.199.324,88	95,23	24.914.555.531,76
<b>J u m l a h</b>		<b>64.942.653.826,83</b>	<b>60.497.449.963,09</b>	<b>93,16</b>	<b>47.446.623.389,36</b>

Rincian Pendapatan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran I**.

**V.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>17.342.605.511,21</b>	<b>14.788.292.147,60</b>

Jumlah realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 sebesar Rp17.342.605.511,21 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp16.894.040.525,00, maka jumlah realisasi tersebut di atas anggaran sebesar Rp448.564.986,21 atau 102,66%. Realisasi pendapatan pajak daerah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.554.313.363,61 atau 17,27% dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp14.788.292.147,00. Rincian pencapaian pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut:

**Tabel V.1.3 Rincian Pajak Daerah-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	2.274.222.667,00	113,71	1.985.810.263,00
2	Pajak Restoran	1.367.236.900,00	1.530.038.334,89	111,91	1.263.675.867,00
3	Pajak Hiburan	350.000.000,00	321.073.500,00	91,74	236.379.600,00
4	Pajak Reklame	350.000.000,00	375.632.930,00	107,32	301.532.424,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.000.000.000,00	3.165.380.793,00	105,51	2.796.699.775,60
6	Pajak Parkir	12.000.000,00	17.998.000,00	149,98	4.019.200,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.339.699.800,00	4.049.378.877,32	93,31	3.871.838.112,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.475.103.825,00	2.385.373.659,00	96,37	2.440.658.756,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	3.223.506.750,00	107,45	1.887.678.150,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.894.040.525,00</b>	<b>17.342.605.511,21</b>	<b>102,66</b>	<b>14.788.292.147,60</b>

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system* berlaku untuk pajak reklame serta pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Dasar Pemungutan Pajak Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2011 tentang Sistem dan Proedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:



## 1. Pajak Hotel

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak hotel direalisasikan sebesar Rp2.274.222.667,00, atau 113,71%, naik sebesar Rp274.222.667,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Samosir sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp288.412.404,00 atau 14,52% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp1.985.810.263,00. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- Kesadaran Wajib pajak untuk membayar pajak melalui sosialisasi;
- Pelayanan Keliling Pajak yang dilakukan oleh Petugas Pajak setiap bulan ke setiap kecamatan;
- Potensi menjaring wajib Pajak Kabupaten Samosir sebagai salah satu daerah tujuan wisata menjadikan pajak hotel salah satu potensi unggulan penerimaan daerah. Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Samosir dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel V.1.4 Jumlah Hotel per Kecamatan TA 2019**

No	Kecamatan	Bintang	Non bintang/Melati	Lainnya	Total
1	Sianjur Mula Mula	0	0	0	0
2	Harian	0	0	0	0
3	Sitiotio	0	0	0	0
4	Onan Runggu	0	0	0	0
5	Nainggolan	0	0	1	1
6	Palipi	0	0	3	3
7	Ronggurnihuta	0	0	0	0
8	Pangururan	0	11	10	21
9	Simanindo	4	8	64	76
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>78</b>	<b>101</b>

Sumber: BPS/Updating Jasa Akomodasi Tahun 2018

**Tabel V.1.5 Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Samosir TA 2019**

Tahun	Persentase
2014	12,99
2015	16,83
2016	24,41
2017	17,22
2018	13,7

Pajak tahun 2018 pada dasarnya tingkat hunian hotel di Kabupaten Samosir mengalami penurunan dari 17,22% menjadi 13,7%, tetapi semakin tingginya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak mengakibatkan pajak hotel mengalami kenaikan.

## 2. Pajak Restoran

Pajak Restoran direalisasikan sebesar Rp1.530.038.334,89 atau 111,91%, naik sebesar Rp162.681.434,89 dari anggarannya sebesar Rp1.367.236.900,00. Realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp266.362.467,89 atau 21,08% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.263.675.867,00. Jumlah

realisasi pendapatan pajak restoran meningkat dibandingkan dengan anggarannya, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Kesadaran Wajib pajak untuk membayar pajak melalui sosialisasi;
- b. Pelayanan Pajak Keliling yang dilakukan oleh Petugas Pajak setiap bulan ke setiap kecamatan;
- c. Potensi menjaring wajib Pajak yang giat dilakukan.

### **3. Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan direalisasikan sebesar Rp321.073.500,00 atau 91,74% dari anggarannya sebesar Rp350.000.000,00 atau lebih rendah sebesar Rp28.926.500,00 dari jumlah anggarannya. Realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp84.693.900,00 atau 35,83% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp236.379.600,00. Yang menjadi objek pajak hiburan berasal pasar malam dan café/pub. Jumlah realisasi pajak hiburan tidak sesuai dengan target karena masih ada pihak pemilik hiburan belum melunasi kewajiban membayar pajak meskipun ketentuan pajak sudah disampaikan dan dilaksanakan sosialisasi mengenai pajak.

### **4. Pajak Reklame**

Pajak Reklame direalisasikan sebesar Rp375.632.930,00 atau 107,32% dari anggarannya sebesar Rp350.000.000,00 atau naik sebesar Rp25.632.930,00 dari jumlah anggarannya. Realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp74.100.506,00 atau 24,57% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp301.532.424,00. Jumlah realisasi pendapatan pajak reklame meningkat dibandingkan anggarannya, hal ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan memastikan pemasang reklame membayar pajak dan melakukan monitoring terhadap reklame yang terpasang di Kabupaten Samosir.

### **5. Pajak Penerangan Jalan Umum**

Pajak Penerangan Jalan Umum direalisasikan sebesar Rp3.165.380.793,00 atau 105,51% dari anggarannya sebesar Rp3.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp165.380.793,00. Realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp368.681.017,40 atau 13,18% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp2.796.699.775,60. Jumlah realisasi pendapatan pajak penerangan jalan umum diatas dari anggaran hal ini disebabkan semakin banyaknya pemasangan jaringan listrik untuk penerangan jalan umum yang baru di Kabupaten Samosir.

### **6. Pajak Parkir**

Pajak Parkir direalisasikan sebesar Rp17.998.000,00 atau 149,98% dari anggarannya sebesar Rp12.000.000,00 atau naik sebesar Rp5.998.000,00. Realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp13.978.800,00 atau 347,80% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp4.019.200,00. Hal ini karena semakin luasnya areal parkir menjadi objek pajak parkir.

**7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direalisasikan Rp4.049.378.877,32 atau sebesar 93,31% dari anggarannya sebesar Rp4.339.699.800,00, atau turun sebesar Rp290.320.922,68 dari anggarannya. Realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp177.540.765,32 atau 4,59% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp3.871.838.112,00. Jumlah realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan dibawah target, hal ini disebabkan karena bahan material yang digunakan untuk pembangunan fisik diambil dari luar Kabupaten Samosir.

**8. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2)**

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan direalisasikan sebesar Rp2.385.373.659,00 atau 96,37% dari anggarannya sebesar Rp2.475.103.825,00 atau turun sebesar Rp89.730.166,00. Realisasi TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp55.285.097,00 atau 2,27% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp2.440.658.756,00.

Penerimaan ini tidak mencapai target disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

- a. Secara umum seluruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sudah didistribusikan dan sudah dilakukan langkah langkah pemungutan tetapi wajib pajak tidak membayarkan dengan alasan ketidakmampuan untuk membayar;
- b. Menertibkan Pemungutan Pajak sehingga semua pajak PBB-P2 yang dipungut masuk ke Kas Daerah.

**9. Bea Perolehan Hak Milik Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Bea Perolehan Hak Milik Tanah dan Bangunan direalisasikan sebesar Rp3.223.506.750,00 atau 107,45% dari anggarannya sebesar Rp3.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp223.506.750,00. Realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp1.335.828.600,00 atau 70,77% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp1.887.678.150,00. Jumlah realisasi pendapatan bea perolehan hak milik tanah dan bangunan meningkat dibandingkan dengan anggarannya, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Perkembangan nilai jual tanah yang meningkat seiring dengan perkembangan kemajuan Daerah;
- b. Kerjasama dengan Badan Pertanahan sebagai otoritas yang mengeluarkan sertifikat tanah dan bangunan sudah terjalin dengan baik.
- c. Adanya kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional bahwa dalam pengurus sertifikat tanah diwajibkan membayar bea perolehan hak milik tanah dan bangunan.

**V.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA**

TA 2019

TA 2018

(Rp)

(Rp)

**4.617.651.545,00****5.029.168.250,00**

Jumlah realisasi retribusi daerah TA 2019 adalah sebesar Rp4.617.651.545,00. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp7.806.353.238,00, maka jumlah realisasi tersebut menurun sebesar Rp3.188.701.693,00 atau 59,15% dari anggarannya. Realisasi pendapatan retribusi daerah tersebut menurun sebesar Rp411.516.705,00 atau 8,18%, jika dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah TA 2018 sebesar Rp5.029.168.250,00. Dasar Pemungutan Pajak Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu dan Bangunan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah. Rincian Retribusi Daerah TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1.6 Rincian Retribusi Daerah-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	752.201.988,00	340.198.862,00	45,23	117.973.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	487.320.000,00	236.438.000,00	48,52	238.586.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	116.750.000,00	116,75	92.200.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	936.312.000,00	1.101.600.000,00	117,65	997.892.870,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	22.760.000,00	22,76	79.970.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.855.344.250,00	680.284.856,00	23,82	1.311.813.900,00
7	Retribusi Terminal	50.000.000,00	16.455.000,00	32,91	21.771.000,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	11.087.000,00	110,87	10.830.000,00
9	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	100.000.000,00	47.305.000,00	47,31	32.440.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	26.470.000,00	66,18	25.205.000,00
11	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	200.000.000,00	80.376.184,00	40,19	96.262.612,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.500.000.000,00	1.250.128.000,00	83,34	1.439.992.000,00
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000.000,00	173.970.000,00	115,98	88.373.300,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	505.968.643,00	101,19	402.985.767,00
15	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol	375.000,00	950.000,00	253,33	775.000,00
16	Retribusi Izin Trayek	24.800.000,00	3.520.000,00	14,19	55.927.301,00
17	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	3.390.000,00	0,00	16.170.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.806.353.238,00</b>	<b>4.617.651.545,00</b>	<b>59,15</b>	<b>5.029.168.250,00</b>

Rincian Retribusi Daerah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran II**. Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan hanya direalisasikan sebesar Rp340.198.862,00 atau sebesar 45,23% dari anggarannya sebesar Rp752.201.988,00 atau tidak terealisasi sebesar Rp412.003.126,00. Retribusi pelayanan kesehatan diperoleh dari pembayaran pasien umum yang berobat ke puskesmas.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan hanya direalisasikan sebesar Rp236.438.000,00 atau sebesar 48,52% dari anggarannya sebesar Rp487.320.000,00 atau tidak terealisasi sebesar Rp250.882.000,00. Retribusi tersebut bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup. Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak tercapai disebabkan oleh:
  - a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah;
  - b. Target anggaran cukup tinggi, tidak sebanding dengan objek retribusi yang ada;
  - c. Masih kurangnya fasilitas penampungan sampah dari pemerintah kemasyarakatan di setiap kecamatan sehingga objek retribusi menjadi sangat rendah terutama kecamatan di luar Kecamatan Pangururan.
3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum teralisasi sebesar Rp116.750.000,00 atau 116,75% dari anggarannya sebesar Rp100.000.000,00 atau naik sebesar Rp16.750.000,00.
4. Retribusi Pelayanan Pasar direalisasikan sebesar Rp1.101.600.000,00 atau 117,65% dari anggarannya sebesar Rp936.312.000,00 atau naik sebesar Rp165.288.000,00. Target penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tercapai melebihi anggaran karena:
  - a. Kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah;
  - b. Kemampuan daya beli masyarakat yang semakin meningkat;
  - c. Para penjual sudah menempati kios sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Memastikan seluruh retribusi sudah dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah.
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikelola oleh SKPD Dinas Perhubungan. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor direalisasikan sebesar Rp22.760.000,00 atau 22,76% dari anggarannya sebesar Rp100.000.000,00 atau tidak terealisasi sebesar Rp77.240.000,00. Jumlah realisasi di bawah dari anggarannya akibat pembatasan pemberian ijin oleh Kementerian Perhubungan sehingga Kabupaten Samosir tidak dapat lagi menerbitkan surat uji kendaraan bermotor.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direalisasikan sebesar Rp680.284.856,00 atau 23,82% dari anggarannya sebesar Rp2.855.344.250,00 atau tidak terealisasi sebesar Rp2.175.059.394,00. Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai disebabkan oleh:
  - a. Kurangnya pemahaman masyarakat atas adanya kekayaan daerah yang dapat dipinjampakaikan kepada masyarakat dengan membayar retribusi sesuai dengan peraturan daerah;
  - b. Kendala pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum disebabkan rendahnya tingkat pemakaian alat berat dari masyarakat, beberapa alat berat yang dimiliki Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir sedang dalam pemeliharaan/perbaikan dan perawatan;

- c. Status tanah pemerintah yang belum jelas dan masih dalam penelusuran sehingga masih besar potensi kehilangan atas pajak sewa tanah.
7. Retribusi Terminal direalisasikan sebesar Rp16.455.000,00 atau 32,91% dari anggarannya sebesar Rp50.000.000,00 atau tidak terealisasi sebesar Rp33.545.000,00. Retribusi Terminal dipungut oleh Dinas Perhubungan. Rendahnya retribusi terminal akibat belum tertibnya angkutan umum memberdayakan terminal yang telah ditetapkan.
  8. Retribusi Tempat Khusus Parkir direalisasikan sebesar Rp11.087.000,00 atau 110,87% dari anggarannya sebesar Rp10.000.000,00 atau naik sebesar Rp1.087.000,00. Retribusi Tempat Khusus Parkir tercapainya target penerimaan dikarenakan adanya objek tempat khusus parkir. Hal ini tercapai karena adanya objek parkir yang baru.
  9. Retribusi Tempat Penginapan/pesanggarahan/vila sebesar Rp47.305.000,00 atau 47,31% dari anggarannya sebesar Rp100.000.000,00 atau tidak terealisasi sebesar Rp52.695.000,00. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pariwisata. Hal ini tidak mencapai target karena kurangnya kesadaran pihak pemilik penginapan/pesanggarahan/vila untuk membayar pajak.
  10. Terdapat realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan, dikarenakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong sebesar Rp26.470.000,00 atau 66,18% dari anggarannya sebesar Rp40.000.000,00 atau tidak terealisasi sebesar Rp13.530.000,00. Retribusi ini dipungut oleh pada Dinas Pertanian. Realisasinya masih sangat rendah akibat masih sedikit dipergunakan oleh masyarakat terutama hanya untuk sapi yang konsumsinya sangat rendah di Kabupaten Samosir.
  11. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp80.376.184,00 atau 40,19% dari anggarannya sebesar Rp200.000.000,00 atau tidak terealisasi sebesar Rp119.623.816,00 yang dipungut oleh Dinas Perhubungan dikarenakan infrastruktur sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.
  12. Retribusi tempat Rekreasi sebesar Rp1.250.128.000,00 atau 83,34% dari anggarannya sebesar Rp1.500.000.000,00 atau tidak terealisasi sebesar Rp249.872.000,00. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pariwisata. Tidak tercapainya target penerimaan dikarenakan kurangnya penertiban atas retribusi yang dipungut di tempat-tempat wisata dan adanya peristiwa tenggelamnya kapal penumpang KM Sinar Bangun yang mengakibatkan turunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Samosir, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.7 Rincian Tempat Retribusi Tempat Rekreasi -LRA TA 2019**

No	Uraian	Realisasi
1	Kawasan Sigullati	46.840.000
2	Dermaga Jetty	16.920.000
3	Wetland Biocord	12.000.000
4	Hutan Pinus	10.688.000
5	Kawasan Tomok	75.623.000

No	Uraian	Realisasi
6	Pantai Indah Situngkir	16.497.000
7	Pasir Putih Parbaba	214.600.000
8	Aek Natonang	32.560.000
9	Aek Rangat	125.235.000
10	Aek Sipitudai	68.930.000
11	Air Terjun Nai Sogop	20.104.000
12	Batu Hobon	38.052.000
13	Batu Kursi Persidangan	46.621.000
14	Batu Sawan	40.334.000
15	Menara Pandang Tele	217.003.000
16	Huta Bolon	16.075.000
17	Air Terjun Efrata	252.046.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.250.128.000</b>

13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp173.970.000,00 atau 115,98% dari anggarannya sebesar Rp150.000.000,00 atau naik sebesar Rp23.970.000,00. Adanya peningkatan kualitas, diversifikasi produksi usaha daerah menjadi potensi peningkatan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pertanian.
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) direalisasikan sebesar Rp505.968.643,00 atau 101,19% dari anggarannya sebesar Rp500.000.000,00 atau naik sebesar Rp5.968.642,00. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Kecamatan. Hal ini disebabkan meningkatkan pembangunan perumahan masyarakat di Kabupaten Samosir.
15. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebesar Rp950.000,00 atau 253,33% dari anggaran sebesar Rp375.000,00 atau naik sebesar Rp575.000,00. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
16. Retribusi Izin Trayek direalisasikan sebesar Rp3.520.000,00 atau 14,19% dari anggarannya sebesar Rp24.800.000,00 atau tidak terealisasi sebesar Rp21.280.000,00. Retribusi Izin Trayek dipungut oleh Dinas Perhubungan. Retribusi Izin Trayek tidak mencapai target hal di ini disebabkan oleh:
- Belum adanya sarana terminal yang memadai di wilayah Kabupaten Samosir hingga mengakibatkan terbatasnya jumlah trayek bus;
  - Kendaraan umum yang ada di Kabupaten Samosir masih sangat terbatas, sehingga objek retribusi juga terbatas;
  - Adanya kendaraan umum yang menggunakan plat hitam sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan penertiban trayek.
17. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direalisasikan sebesar Rp3.390.000,00 dari anggarannya sebesar Rp0,00. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Sosial.

**V.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>4.533.993.582,00</b>	<b>2.714.607.460,00</b>

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada TA 2019 sebesar Rp4.533.993.582,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp4.533.993.532,00. Jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp2.714.607.406,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.819.386.122,00 atau 67,02%. Pendapatan ini berasal dari penerimaan dividen atas penyertaan modal pada Bank Sumut Provinsi Sumatera Utara.

**V.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>34.003.199.324,88</b>	<b>24.914.555.531,76</b>

Jumlah realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2019 sebesar Rp34.003.199.324,88 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp35.708.266.531,83 maka jumlah realisasi tersebut dibawah anggaran sebesar Rp1.705.067.206,95 atau 95,23%. Realisasi pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah meningkat sebesar Rp9.088.643.793,12 atau 36,48% jika dibandingkan dengan jumlah realisasi TA 2018 sebesar Rp24.914.555.531,76. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1.8 Rincian Lain-Lain PAD yang sah-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	27.046.000,00	627.966.798,00	2321,85	467.721.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	1.097.978.101,00	36,6	1.773.301.084,00
3	Penerimaan Bunga Deposito	0,00	2.888.630.193,20	0,00	942.257.534,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.985.716.389,54	2.652.281.254,09	66,54	424.625.750,86
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	26.819.260,29	284.456.219,57	1060,64	1.757.183.614,90
6	Pendapatan Denda Pajak	17.672.894,00	28.147.304,00	159,27	48.184.763,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	649.801,00	0,00	-
8	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	19.642.086,00	36.086.662,00	183,72	228.768.411,00
10	Pendapatan BLUD	17.000.000.000,00	20.309.723.084,00	119,47	14.203.989.155,00
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	4.984.229.482,00	82.762.387,02	1,66	37.097.902,00
12	Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	1.500.000,00	2.000.000,00	133,33	22.500.000,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	6.645.640.420,00	5.992.517.521,00	90,17	5.007.056.317,00
<b>Jumlah</b>		<b>35.708.266.531,83</b>	<b>34.003.199.324,88</b>	<b>95,23</b>	<b>24.914.555.531,76</b>



Lain-lain PAD yang sah per rincian obyek dapat dilihat pada **Lampiran III**. Dari Tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal berikut ini:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp627.966.798,00 atau 2.321,85% dari anggarannya sebesar Rp27.046.000,00. Realisasi ini merupakan hasil penjualan aset berupa hasil Penjualan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 9 unit dan roda 2 (dua) sebanyak 32 unit sebesar Rp590.635.798,00 dan hasil penjualan gedung dan bangunan berupa gedung kantor dan gedung puskesmas sebesar Rp37.331.000,00, dengan rincian dapat dilihat **Lampiran IV**.
2. Pendapatan jasa giro kas daerah dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp1.097.978.101,00 atau 36,60% dari anggarannya. Terdapat jasa giro rekening BOS yang masih berada direkening penerima Dana BOS dan belum disetorkan ke RKUD .
3. Bunga deposito terealisasi sebesar Rp2.888.630.193,20 dari anggarannya sebesar Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Samosir pada Tahun 2019 dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dengan memanfaatkan *idle cash* telah membuka Deposito berjangka dengan Keputusan Bupati Samosir Nomor 103 Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penetapan Rekening Pembukuan Deposito Pemerintah Kabupaten Samosir pada PT. Bank Sumut, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri Cabang Pangururan Kabupaten sebesar Rp75.000.000.000,00 dengan suku bunga sebesar 6,75% dengan sistem perhitungan bunga per hari kalender dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.1.9 Rekening Bunga Deposito-LRA TA 2019 dan 2018**

No	NK	Nama Bank	Bunga Deposito
1	17 Juni 2019	PT. Bank Rakyat Indonesia	85.993.163,00
2	17 Juli 2019		83.219.190,00
3	21 Agustus 2019		60.513.705,00
4	23 Agustus 2019		25.479.445,00
5	16 September 2019		85.993.163,00
6	15 Oktober 2019		83.219.190,00
7	18 Nopember 2019		85.993.150,00
8	09 Desember 2019		66.575.352,00
<b>Jumlah</b>			<b>576.986.358,00</b>
1	17 Juni 2019	PT. Bank Negara Indonesia	28.664.384,00
2	15 Juli 2019		27.739.726,00
3	15 Agustus 2019		28.664.384,00
4	16 September 2019		28.664.384,00
5	15 Oktober 2019		27.739.726,00
6	15 Nopember 2019		28.664.384,00
7	16 Desember 2019		27.739.726,00
<b>Jumlah</b>			<b>197.876.714,00</b>
1	18 Juni 2019	PT. Bank Mandiri	85.993.151,00
2	17 Juli 2019		83.219.178,08
3	15 Agustus 2019		85.993.150,68
4	16 September 2019		85.993.150,68
5	16 Oktober 2019		83.219.178,08
6	15 Nopember 2019		85.993.150,68

No	NK	Nama Bank	Bunga Deposito
7	11 Desember 2019		72.123.287,00
<b>Jumlah</b>			<b>582.534.246,20</b>
1	24 Juni 2019	PT. Bank Sumut	229.315.068,00
2	15 Juli 2019		221.917.808,00
3	15 Agustus 2019		229.315.068,00
4	16 September 2019		221.917.808,00
5	15 Oktober 2019		229.315.068,00
6	15 Nopember 2019		221.917.808,00
7	09 Desember 2019		177.534.247,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.531.232.875,00</b>
<b>Total</b>			<b>2.888.630.193,20</b>

4. Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bersumber dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Adapun penerimaan pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2019 berasal dari pengembalian perjalanan dinas, pengembalian atas pekerjaan fisik, pengembalian perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp2.652.281.254,09 atau 66,54% dari anggarannya sebesar Rp3.985.716.389,54.
5. Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dianggarkan sebesar Rp26.819.260,29 dan direalisasikan sebesar Rp284.456.219,57 atau 1.060,64% dari anggaran. Adapun rincian penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang Pendidikan sebesar Rp493.974,00 yaitu atas nama CV. Gondrong sebesar Rp84.612 dan CV. Matoras sebesar Rp409.362,00.
  - b. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang Kesehatan sebesar Rp19.278.563,00 yaitu denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan renovasi Puskesmas Harian, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.10 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan-LRA TA 2019**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Alat Kesehatan kesehatan	1.383.900,00
2	Denda Obat	432.551,00
3	Renovasi Puskesmas Harian	9.371.112,00
4	Alat Kesehatan kesehatan	8.091.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.278.563,00</b>

- c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp213.543.499,47. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.11 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum-LRA TA 2019**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembangunan sp Pangaribuan-Sijambur Desa Pardomuan nauli kec. Palipi	1.259.900,00
2	Pembangunan irigasi Parbaba	6.176.072,73
3	Pelebaran jalan Tomok Lontung	1.073.799,00
4	Peningkatan jalan desa Sitamiang kec. onan runggu	1.409.699,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
5	Pembanguna jalan sampetua dolok riapul kec. Palipi	269.431,00
6	Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sp. Boho-Peabang Kec. Sianjur Mulamula	11.877.824,56
7	Pekerjaan pelabuhan sihotang	2.224.867,00
8	Pembangunan jalan sitorang mabolon	578.970,00
9	Pembangunan jalan ringroad pel ambarita	276.176,00
10	Peningkatan jalan parhorian-simp. Parhorian kec. Nainggolan	108.274.899,00
11	CV Roesky	2.548.857,82
12	CV Raja Naek Brother	1.718.400,00
13	CV Aliran Hidup	1.599.500,00
14	Peningkatan jalan sp tulas -bonan dolok	3.422.000,00
15	Pekerjaan pembangunan jalan Lumban Suhisui	2.703.136,36
16	Pekerjaan pembangunan jalan gereja Tuktuk	1.294.533,00
17	CV Nirmayanto Group	1.982.850,00
18	CV Mido	48.210.980,00
19	PT Karya Vany	2.661.738,00
20	Peningkatan jalan simpang jalan nasional sitinjak rinabolak kec onan runggu	1.943.442,00
21	Pembangunan jalan simpang bundaran Bank Sumut - Pelabuhan Onan Baru	4.956.612,00
22	CV Rojaya Mandiri	1.455.200,00
23	PT Karya Vany Konstruksi	4.956.612,00
24	Penataan lansekap kawasan objek wisata aek natonang	668.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>213.543.499,47</b>

- d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp49.149.992,00 yaitu Denda Keterlambatan pekerjaan kawasan menara pandang tele an. CV. Lois sebesar Rp1.178.547,00 dan Denda keterlambatan Pembangunan Jalan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum Kota Nainggolan an.CV. Parsoaran Rp47.971.445,00.
- e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp1.990.191,10 yaitu atas denda keterlambatan pengadaan jasa karoseri box sebesar Rp1.393.000,00 dan denda keterlambatan pengadaan bkb kit sebesar Rp597.191,10.
6. Pendapatan Denda Pajak bersumber dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang jatuh tempo sebesar Rp28.147.304,00 atau 159,27% dari anggarannya sebesar Rp17.672.894,00. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bersumber dari keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bahwa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. Pendapatan dari Pendapatan Denda Reteribusi bersumber dari Pendapatan Denda Sewa Tanah yang jatuh tempo sebesar Rp649.801,00 dari anggarannya sebesar Rp0,00.

8. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp36.086.662,00 atau 183,72% dari anggarannya sebesar Rp19.642.086,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp17.829.332,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.12 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LRA TA 2019**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian tunjangan suami & beras anni hartini marito bulan Nop-Des 2018	814.960,00
2	Keterlanjuran bayar tunjangan anak nurmina manurung bulan sep-okt 2018	314.864,00
3	Keterlanjutan Tunjangan Anak masta sitanggang SD 6 Saitnihuta Bulan Okt-Des 2018	254.932,00
4	Pengembalian sertifikasi an. Judiaman Silalahi pada SD N 16 Unjur	12.360.615,00
5	Pengembalian tunjangan anak dan beras an. Toba Sinaga bulan September s/d Desember 2018	526.344,00
6	Pengembalian keterlanjuran tunjangan fungsional bulan Nopember 2018 an. Arni Wetty Sinurat	265.000,00
7	Kekurangan bayar pensiun	1.292.617,00
8	Pembayaran tunjangan suami an priska marbun	2.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.829.332,00</b>

- b. Pendapatan Dari Pengembalian dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp5.285.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.13 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas -LRA TA 2019**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Sekretraiat DPRD	3.705.000,00
2	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	90.000,00
3	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.490.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.285.000,00</b>

- c. Pendapatan Dari Pengembalian dari Pengembalian Keterlanjuran Lebih Bayar sebesar Rp12.972.330,00, yaitu Pengembalian gaji THL an. Partomuan Sinaga pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.200.000,00 dan Pengembalian tunjangan profesi an. Poster Malau pada SD N 9 Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta sebesar Rp11.772.330,00.

9. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp20.309.723.084,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.14 Rincian Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD-LRA TA 2019**

No	Uraian	Jumlah 2019 (Rp)
1	Pendapatan BLUD Januari 2019	1.360.804.164,00
2	Pendapatan BLUD Februari 2019	2.087.399.610,00
3	Pendapatan BLUD Maret 2019	830.147.183,00

No	Uraian	Jumlah 2019 (Rp)
4	Pendapatan BLUD April 2019	3.103.353.013,00
5	Pendapatan BLUD Mei 2019	1.519.014.418,00
6	Pendapatan BLUD Juni 2019	696.153.120,00
7	Pendapatan BLUD Juli 2019	1.604.555.205,00
8	Pendapatan BLUD Agustus 2019	1.477.157.752,00
9	Pendapatan BLUD September 2019	1.471.775.274,00
10	Pendapatan BLUD Oktober 2019	1.572.496.687,00
11	Pendapatan BLUD Nopember 2019	2.569.159.484,00
12	Pendapatan BLUD Desember 2019	2.017.707.174,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.309.723.084,00</b>

10. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya merupakan penerimaan daerah yang sah yang bersumber dari penerimaan lainnya sebesar Rp82.762.387,02 yang berasal dari pencatatan atas perkawinan luar kota pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp21.340.000,00, hasil sitaan ternak sebesar Rp5.020.000,00 dan pendapatan dari kelebihan bayar sebesar Rp56.402.387,02.
11. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan pembayaran oleh Kelompok Masyarakat atas investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Samosir yang digulirkan pada tahun 2007 yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau 133,33% dari anggaran. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran V**.
12. Pendapatan Dari Dana Kapitasi JKN merupakan penerimaan yang langsung diterima oleh 12 puskesmas tanpa melalui RKUD dianggarkan sebesar Rp6.645.640.420,00, dan terealisasi sebesar Rp5.992.517.521,00 atau 90,17% dari anggaran. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.15 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA TA 2019**

No	Nama Puskesmas	Jumlah (Rp)
1	Puskesmas Limbong	535.586.900,00
2	Puskesmas Harian	513.206.225,00
3	Puskesmas Sitio-tio	396.736.925,00
4	Puskesmas Onan Runggu	502.604.500,00
5	Puskesmas Sirait	595.617.620,00
6	Puskesmas Mogang	742.690.107,00
7	Puskesmas Ronggur Nihuta	390.201.884,00
8	Puskesmas Buhit	1.365.419.312,00
9	Puskesmas Tuktuk Siadong	207.809.318,00
10	Puskesmas Simarmata	228.959.450,00
11	Puskesmas Ambarita	330.285.350,00
12	Puskesmas Lontung	183.399.930,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.992.517.521,00</b>

**V.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>816.915.639.091,00</b>	<b>733.482.874.670,00</b>

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Sampai dengan 31 Desember 2019 telah direalisasikan sebesar Rp816.915.639.091,00 dari anggaran sebesar Rp819.867.422.344,00. Ini berarti jumlah realisasi Pendapatan Transfer lebih kecil dari anggarannya sebesar Rp2.951.783.253,00 atau 99,64%. Realisasi pendapatan transfer tersebut meningkat sebesar Rp83.432.764.421,00 atau 11,37%, jika dibandingkan dengan jumlah realisasi TA 2018 sebesar Rp733.482.874.670,00. Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1.16 Daftar Saldo Penerimaan Pendapatan Transfer-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	645.234.442.591,00	636.204.549.291,00	98,6	608.164.685.810,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	140.843.163.000,00	148.710.757.330,00	105,59	90.953.371.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	33.789.816.753,00	32.000.332.470,00	94,7	16.539.591.307,00
4	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.825.226.553,00
<b>Jumlah</b>		<b>819.867.422.344,00</b>	<b>816.915.639.091,00</b>	<b>99,64</b>	<b>733.482.874.670,00</b>

**V.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>636.204.549.291,00</b>	<b>608.164.685.810,00</b>

Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan telah direalisasikan selama TA 2019 sebesar Rp636.204.549.291,00. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp645.234.442.591,00, maka jumlah realisasi tersebut lebih besar sebesar Rp9.029.893.300,00 atau 1,40% dari anggarannya. Realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat tersebut meningkat sebesar Rp28.039.863.481,00 atau 4,61% dari realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat TA 2018. Penerimaan transfer pemerintah pusat tersebut terdiri dari:

Tabel V.1.17 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Bagi Hasil Pajak	10.449.919.000,00	7.906.318.303,00	75,66	10.855.232.799,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.307.448.000,00	3.155.106.279,00	59,45	3.688.724.037,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	465.740.446.000,00	465.249.052.000,00	99,89	453.737.230.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.314.498.555,00	87.280.462.603,00	97,72	72.561.043.227,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	74.422.131.036,00	72.613.610.106,00	97,57	67.322.455.747,00
<b>Jumlah</b>		<b>645.234.442.591,00</b>	<b>636.204.549.291,00</b>	<b>98,60</b>	<b>608.164.685.810,00</b>

## V.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak - LRA

TA 2019

TA 2018

(Rp)

(Rp)

**7.906.318.303,00****10.855.232.799,00**

Jumlah realisasi penerimaan bagi hasil pajak selama TA 2019 adalah sebesar Rp7.906.318.303,00 atau 75,66% dari anggarannya sebesar Rp10.449.919.000,00. Ini berarti jumlah realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dibawah anggarannya sebesar Rp2.543.600.697,00. Realisasi TA 2019 turun sebesar Rp2.948.914.496,00 atau 27,17%. jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp10.855.232.799,00. Adapun rincian penerimaan dana bagi hasil pajak TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.18 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2019 dan 2018

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.936.880.000,00	4.165.610.048,00	84,38	4.509.373.872,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	00,00	362.664.933,00	0,00	777.816.672,00
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25, dan Pasal 29 WP Orang Pribadi dalm Negeri dan PPH Pasal 21	5.337.993.000,00	3.202.795.800,00	60,00	5.366.605.005,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	175.046.000,00	175.247.522,00	100,12	201.437.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.449.919.000,00</b>	<b>7.906.318.303,00</b>	<b>75,66</b>	<b>10.855.232.799,00</b>

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bagi Hasil Pajak PBB sektor Pertambangan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp4.936.880.000,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Jumlah realisasi selama TA 2019 adalah sebesar Rp4.165.610.048,00, atau 84,38% dari anggarannya. Jumlah realisasi TA 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp343.763.824,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

- b. Bagi Hasil dari Pajak Bumi sebelumnya tidak ada dianggarkan. Namun jumlah realisasi selama TA 2019 adalah sebesar Rp362.664.933,00. Pajak ini merupakan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
- c. Bagi Hasil dari PPh Pasal 25, dan Pasal 29 WP Orang Pribadi dalam Negeri dan PPH Pasal 21 dianggarkan sebesar Rp5.337.993.000,00, dengan jumlah realisasi sebesar Rp3.202.795.800,00 atau 60%. Jumlah realisasi TA 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.163.809.205,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 dari anggarannya. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena realisasi penerimaan pajak nasional tidak tercapai, sehingga berakibat pada turunnya realisasi bagian Kabupaten Samosir. Penetapan anggaran ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- d. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dianggarkan sebesar Rp175.046.000,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp175.247.522,00 atau 100,12% dari anggarannya. Jumlah realisasi TA 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp26.189.728,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

#### V.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>3.155.106.279,00</b>	<b>3.688.724.037,00</b>

Jumlah realisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam pada TA 2019 adalah sebesar Rp3.155.106.279,00, atau 59,45% dari anggarannya sebesar Rp5.307.448.000,00. Jumlah realisasi tersebut lebih rendah sebesar Rp533.617.758,00 dibandingkan dengan TA 2018 yang realisasinya sebesar Rp3.688.724.037,00. Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.1.19 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	618.722.000,00	0,00	0,00	180.210.300,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0,00	2.394.597.100,00	0,00	1.238.978.816,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	0,00	590.155.800,00	0,00	0,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	0,00	0,00	701.234.591,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	3.647.206.000,00	69.038.750,00	1,89	1.511.584.986,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	55.455.400,00	0,00	39.287.950,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	57.927.000,00	45.859.229,00	79,17	17.427.394,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.307.448.000,00</b>	<b>3.155.106.279,00</b>	<b>59,45</b>	<b>3.688.724.037,00</b>



**V.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>465.249.052.000,00</b>	<b>453.737.230.000,00</b>

Jumlah realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum pada TA 2019 adalah sebesar Rp465.249.052.000,00 atau 99,89% dari anggarannya sebesar Rp465.740.446.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp11.511.822.000,00 atau 2,54%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp453.737.230.000,00. Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/14075/SJ tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan pada Pemerintah Daerah mengalokasikan DAU Perubahan sebesar Rp619.020.000 untuk menutupi kurang bayar iuran jaminan kesehatan ke BPJS akibat perubahan tarif yang disetorkan langsung ke BPJS dan dicatat di Laporan Realisasi Anggaran.

**V.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>87.280.462.603,00</b>	<b>72.561.043.227,00</b>

Jumlah realisasi penerimaan dana alokasi khusus fisik pada TA 2019 adalah sebesar Rp87.280.462.603,00, atau 99,77% dari anggarannya sebesar Rp87.280.462.603,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp14.719.419.376,00 jika dibandingkan dengan jumlah realisasi TA 2018 sebesar Rp72.561.043.227,00. Rincian dana alokasi khusus dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.1.20 Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	DAK Bidang Pendidikan	21.101.203.000,00	11.474.578.899,00	54,38	9.821.172.044,00
2	DAK Kesehatan dan KB	6.219.758.555,00	7.962.212.419,00	128,01	15.153.374.233,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi	1.864.068.000,00	3.299.732.000,00	177,02	2.574.321.200,00
4	DAK Bidang Kedaulatan Pangan	2.408.606.000,00	3.764.396.447,00	156,29	1.162.590.000,00
5	DAK Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	798.679.000,00
6	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	732.571.000,00	732.571.000,00	100,00	
7	DAK Bidang Prasarana Pemda	0,00	17.083.993.500,00	0,00	366.017.000,00
8	DAK Bidang Sarana Prasaranan Perdagangan	0,00	1.104.820.000,00	0,00	0,00
9	DAK Infrastruktur Publik Daerah	25.217.698.000,00	17.061.525.872,00	67,66	0,00
10	DAK Bidang Parawisata	0,00	4.867.818.416,00	0,00	5.793.660.459,00
11	DAK Penugasan	31.770.594.000,00	19.928.814.050,00	62,73	36.891.229.291,00
<b>Jumlah</b>		<b>89.314.498.555,00</b>	<b>87.280.462.603,00</b>	<b>97,72</b>	<b>72.561.043.227,00</b>

**V.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA**

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>72.613.610.106,00</b>	<b>67.322.455.747,00</b>

Jumlah realisasi penerimaan dana alokasi khusus non fisik pada TA 2019 adalah sebesar Rp72.613.610.106,00, atau 97,57% dari anggarannya sebesar Rp74.422.131.036,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp5.291.154.359,00 jika dibandingkan dengan jumlah realisasi TA 2018 sebesar Rp67.322.455.747,00. Penetapan besaran anggaran DAK didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Rincian dana alokasi khusus dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.1.21 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA TA 2019- 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Bantuan Operasional Sekolah	0,00	1.325.466.000,00	0,00	0,00
2	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Paud	2.205.600.000,00	2.205.600.000,00	100,00	1.744.200.000,00
3	Tunjangan Profesi Guru	46.255.462.000,00	44.932.294.220,00	97,14	44.674.785.597,00
4	Tambahan Penghasilan Guru	1.419.000.000,00	1.207.437.500,00	85,09	1.478.800.000,00
5	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB	13.543.502.036,00	12.218.036.036,00	90,21	12.313.409.700,00
6	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM dan Ketenaga Kerjaan	0,00	180.250.000,00	0,00	0,00
7	Tunjangan Khusus Guru	8.247.825.000,00	8.247.825.000,00	100,00	6.265.816.000,00
8	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	930.604.000,00	930.113.350,00	99,95	845.444.450,00
9	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	546.600.000,00	273.300.000,00	50,00	0,00
10	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM	360.500.000,00	180.250.000,00	50,00	0,00
11	Pelayanan Kepariwisata	913.038.000,00	913.038.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>74.422.131.036,00</b>	<b>72.613.610.106,00</b>	<b>97,57</b>	<b>67.322.455.747,00</b>

**V.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA**

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>148.710.757.330,00</b>	<b>90.953.371.000,00</b>

Jumlah realisasi transfer pemerintah pusat lainnya-LRA TA 2019 adalah sebesar Rp148.710.757.330,00 atau sebesar 105,57% dari anggarannya sebesar Rp140.843.163.000,00. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi TA 2018 sebesar Rp90.953.371.000,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp57.757.386.330,00 atau 63,50%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.22 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA TA 2019- 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Dana Penyesuaian	32.098.664.000,00	39.966.258.330,00	124,51	0,00
	- Dana Insentif Daerah	10.482.264.000,00	10.482.264.000,00	100,00	0,00
	- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	21.616.400.000,00	29.483.994.330,00	136,40	0,00
2	Dana Desa	108.744.499.000,00	108.744.499.000,00	100,00	90.953.371.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>140.843.163.000,00</b>	<b>148.710.757.330,00</b>	<b>105,57</b>	<b>90.953.371.000,00</b>

Penerimaan Dana BOS sebesar Rp29.483.994.330,00 yang berasal dari Pemerintah Provinsi mempedomani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Nomor 900/2794/Subbagkeu/III/2019 dan Nomor 420/541/Disdik/2019 tanggal 20 Maret 2019 merupakan Dana BOS Tahun 2019 sebesar Rp29.464.000.000,00 dan pengembalian dana BOS Tahun 2018 sebesar Rp19.994.330,00 kepada SD/SMP se-Kabupaten Samosir dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran VI**.

**V.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA**

TA 2019

TA 2018

(Rp)

(Rp)

**32.000.332.470,00****16.539.591.307,00**

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah merupakan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, yaitu berupa Bagi Hasil Pajak. Jumlah realisasi dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2019 adalah sebesar Rp32.000.332.470,00. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp33.789.816.753,00, maka jumlah realisasi tersebut penurunan sebesar Rp1.789.484.283, atau 94,70% dari anggarannya. Realisasi penerimaan transfer pemerintah provinsi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.460.741.163,00 atau 93,48%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Rincian anggaran serta realisasi TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1.23 Rincian Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah lainnya-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Pendapatan bagi hasil pajak Kendaraan Bermotor	9.409.660.108,00	9.409.660.108,00	100,00	2.512.585.246,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.636.676.685,00	6.636.676.685,00	100,00	1.213.168.304,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.853.248.092,00	7.853.248.092,00	100,00	1.824.062.673,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	597.280.843,00	583.008.635,00	97,61	47.243.519,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	9.292.951.025,00	7.517.738.950,00	80,90	10.942.531.565,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.789.816.753,00</b>	<b>32.000.332.470,00</b>	<b>94,70</b>	<b>16.539.591.307,00</b>

Penjelasan dari Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor direalisasikan sebesar Rp9.409.660.108,00, atau 100% dari anggarannya sebesar Rp9.409.660.108,00. Jumlah realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.897.074.862,00 atau 274,50%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp2.512.585.246,00.
2. Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direalisasikan sebesar Rp6.636.676.685,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp6.636.676.685,00. Jumlah realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp5.423.508.381,00 atau 447,05%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.213.168.304,00.
3. Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor direalisasikan sebesar Rp7.853.248.092,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp7.853.248.092,00. Jumlah realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.029.185.419,00 atau 279,09%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.824.062.673,00.
4. Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan TA 2019 direalisasikan sebesar Rp583.008.635,00 atau 97,62% dari anggarannya sebesar Rp597.280.843,00. Realiasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp535.765.116,00 atau 1134,05% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp47.243.519,00.
5. Bagi Hasil Dari Pajak Rokok direalisasikan sebesar Rp7.517.738.950,00 atau 80,90% dari anggarannya sebesar Rp9.292.951.025,00. Realisasi TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.424.792.615,00 atau 31,30%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp10.942.531.565,00.

#### V.1.1.2.4 Bantuan Keuangan

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>0,00</b>	<b>17.825.226.553,00</b>

Pemerintah Kabupaten Samosir tidak memperoleh Bantuan Keuangan selama TA 2019 dan pada TA 2018 sebesar 17.825.226.553,00.

#### V.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>7.698.069.000,00</b>	<b>21.756.756.000,00</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah–Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa Penerimaan Dana Bencana Alam sebesar Rp7.698.069.000,00 dari anggarannya sebesar Rp0,00. Realisasi TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp14.058.687.000,00 atau 64,62 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp21.756.756.000,00.

**V.1.2 BELANJA-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>695.293.860.942,00</b>	<b>664.127.057.315,00</b>

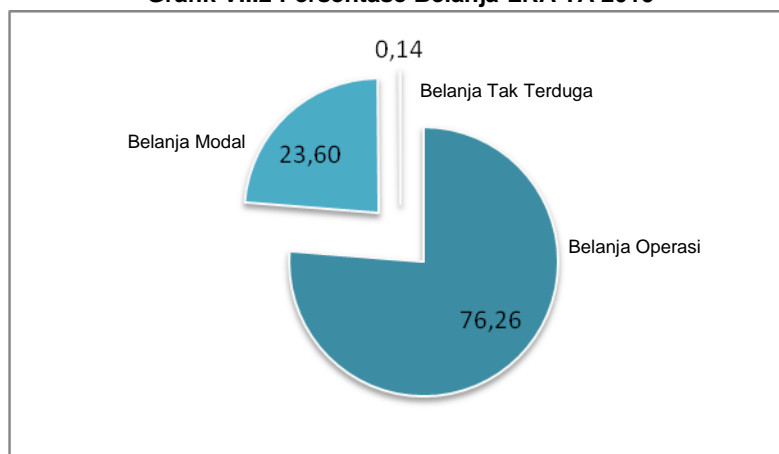
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pada TA 2019, realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan dimana jumlah realisasi belanja sebesar Rp695.293.860.942,00 sedangkan anggaran sebesar Rp745.492.028.996,62. Jumlah realisasi belanja tersebut lebih kecil sebesar Rp50.198.168.054,62 atau 93,27% dari anggarannya. Realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp31.166.803.627,00 atau 4,69%, jika dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp664.127.057.315,00.

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga sebagai berikut:

**Tabel V.1.24 Rekapitulasi Belanja-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	(Rp)
1	Belanja Operasi	563.976.155.317,62	530.227.925.563,00	94,02	476.333.825.413,00
2	Belanja Modal	179.775.873.679,00	164.093.834.379,00	91,28	186.281.849.902,00
3	Belanja Tak Terduga	1.740.000.000,00	972.101.000,00	55,87	1.511.382.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>745.492.028.996,62</b>	<b>695.293.860.942,00</b>	<b>93,27</b>	<b>664.127.057.315,00</b>

**Grafik V.1.2 Persentase Belanja-LRA TA 2019**

**V.1.2.1 Belanja Operasi-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>530.227.925.563,00</b>	<b>476.333.825.413,00</b>

Jumlah realisasi belanja operasi TA 2019 adalah sebesar Rp530.227.925.563,00 atau 94,02% jika dibandingkan dari anggarannya sebesar Rp563.976.155.317,62. Realisasi belanja operasi TA 2019 meningkat sebesar Rp53.894.100.150,00 atau 11,31%, jika dibandingkan dengan jumlah realisasi TA 2018 sebesar Rp476.292.587.265,00. Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1.25 Rekapitulasi Belanja Operasi-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	(Rp)
1	Belanja Pegawai	353.652.505.945,62	342.377.031.205,00	96,81	311.222.108.400,00
2	Belanja Barang dan Jasa	200.225.049.372,00	179.025.657.358,00	89,41	158.554.370.923,00
3	Belanja Hibah	6.798.600.000,00	5.646.012.000,00	83,05	5.268.996.090,00
4	Belanja Bantuan Sosial	3.300.000.000,00	3.179.225.000,00	96,34	1.288.350.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>563.976.155.317,62</b>	<b>530.227.925.563,00</b>	<b>94,02</b>	<b>476.333.825.413,00</b>

Rincian realisasi belanja operasi per SKPD TA 2019 dapat dilihat pada **Lampiran VII**.

**V.1.2.1.1 Belanja Pegawai-LRA**

TA 2019

TA 2018

(Rp)

(Rp)

**345.162.973.031,00****311.222.108.400,00**

Jumlah realisasi belanja pegawai TA 2019 adalah sebesar Rp345.162.973.031,00 jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp353.652.505.945,62 maka jumlah realisasi tersebut lebih kecil dari anggarannya sebesar Rp8.489.532.914,62 atau 97,98%. Realisasi belanja pegawai TA 2019 meningkat sebesar Rp33.940.864.631,00 atau 10,91%, jika dibandingkan dengan jumlah realisasi TA 2018 sebesar Rp311.222.108.400,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.26 Rincian Belanja Pegawai-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	205.117.276.811,31	200.970.972.352,00	97,98	191.100.195.915,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	119.908.104.046,31	116.402.529.509,00	97,08	91.663.952.950,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.316.460.000,00	2.316.460.000,00	100,00	3.486.815.000,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	606.887.744,00	606.887.744,00	100,00	579.231.390,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	124.150.000,00	124.150.000,00	100,00	47.044.000,00
6	Belanja Honorarium	25.579.627.344,00	24.741.973.426	96,73	23.944.289.145,00
7	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	327.680.000,00
8	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	72.900.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>353.652.505.945,62</b>	<b>345.162.973.031,00</b>	<b>97,60</b>	<b>311.222.108.400,00</b>

**V.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>176.239.715.532,00</b>	<b>158.554.370.923,00</b>

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa TA 2019 adalah sebesar Rp176.239.715.532,00. Jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp200.225.049.372,00, maka jumlah realisasi tersebut dibawah anggaran sebesar Rp23.985.333.840,00,00 atau 88,02% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp17.685.344.609,00 atau 11,15% jika dibandingkan dengan jumlah realisasi TA 2018 sebesar Rp158.554.370.923,00,dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.27 Rincian Belanja Barang dan Jasa-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	11.265.005.546,00	10.256.333.466,00	91,05	6.596.101.909,00
2	Belanja Bahan/Material	4.142.049.747,00	3.846.559.339,00	92,87	5.973.369.020,00
3	Belanja Jasa Kantor	27.519.827.456,00	23.801.524.962,00	86,49	22.157.322.251,00
4	Belanja Premi Asuransi	111.198.337,00	111.198.337,00	100,00	0,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.127.942.071,00	4.591.368.146,00	89,54	6.541.598.399,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.453.638.501,00	4.604.975.778,00	84,44	4.920.036.865,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.210.757.515,00	976.254.415,00	80,63	1.212.707.515,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	185.713.613,00	111.076.113,00	59,81	445.256.800,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	719.495.000,00	613.191.704,00	85,23	363.940.000,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	9.078.804.500,00	7.543.184.400,00	83,09	6.346.015.550,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	619.292.800,00	608.216.000,00	98,21	566.630.000,00
12	Belanja Pakaian Kerja	126.700.000,00	125.750.000,00	99,25	91.546.700,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	65.000.000,00	61.769.000,00	95,03	12.720.000,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	51.964.688.238,00	46.136.291.551,00	88,78	45.713.521.384,00
15	Belanja Pemeliharaan	7.059.191.541,00	5.595.609.345,00	79,27	4.997.329.644,00
16	Belanja Jasa Konsultansi	6.230.681.180,00	5.090.213.390,00	81,70	3.077.972.500,00
17	Belanja Barang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.265.751.487,00	13.471.188.029,00	88,24	14.013.879.838,00
18	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	99.411.400,00	99,41	0,00
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.923.473.612,00	3.084.644.698,00	78,62	4.846.177.833,00
20	Belanja Operasional Sekolah	20.145.754.290,00	19.171.297.334,00	95,16	12.506.091.252,00

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.365.562.861,00	19.430.475.267,00	90,94	13.629.436.993,00
22	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00	106.120.000,00
23	Belanja Jasa Medis dan Para Medis	1.195.220.000,00	1.150.355.987,00	96,25	3.053.302.470,00
24	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ Masyarakat	170.000.000,00	170000000,00	100,00	97.750.000,00
25	Belanja Beasiswa/Bantuan Pembinaan Anak Sekolah	49.800.000,00	49.800.000,00	100,00	0,00
26	Belanja Operasional kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00
27	Belanja Upah Pekerja Harian	212.916.200,00	143.902.300,00	67,59	0,00
28	Belanja Iuran JKN	3.603.204.876,00	2.271.190.719,00	63,03	1.270.244.000,00
29	Belanja Jasa Kesehatan dan Non Kesehatan	3.010.879.851,00	2.822.388.852,00	93,74	0,00
30	Belanja Rumah Tidak Layak Huni	302.500.150,00	301.545.000,00	99,68	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>200.225.049.372,00</b>	<b>176.239.715.532,00</b>	<b>88,02</b>	<b>158.554.370.923,00</b>

Realisasi Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2019 mencakup pengeluaran kas yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.28 Rincian Belanja JKN-LRA TA 2019**

No	Uraian	Belanja Barang/Jasa (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total (Rp)
1	Puskesmas Ronggurnihuta	289.588.177,00	3.041.455,00	292.629.632,00
2	Puskesmas Mogang	587.962.642,00	93.218.950,00	681.181.592,00
3	Puskesmas Limbong	422.095.822,00	53.685.245,00	475.781.067,00
4	Puskesmas Buhit	1.231.435.614,00	99.932.818,00	1.331.368.432,00
5	Puskesmas Harian	491.514.507,00	39.150.000,00	530.664.507,00
6	Puskesmas Ambarita	287.666.220,00	23.468.000,00	311.134.220,00
7	Puskesmas Tuktuk Siadong	179.971.279,00	24.177.145,00	204.148.424,00
8	Puskesmas Sirait	573.730.890,00	28.760.500,00	602.491.390,00
9	Puskesmas Onan Runggu	443.359.750,00	67.134.831,00	510.494.581,00
10	Puskesmas Lontung	174.079.440,00	15.700.000,00	189.779.440,00
11	Puskesmas Siotio	371.680.133,00	37.116.810,00	408.796.943,00
12	Puskesmas Simarmata	225.479.725,00	2.017.000,00	227.496.725,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.278.564.199,00</b>	<b>487.402.754,00</b>	<b>5.765.966.953,00</b>

- 2) Pengeluaran belanja barang BLUD (RSUD Kabupaten Samosir) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan



Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

- 3) Pengeluaran Belanja Dana BOS SD dan SMP yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Belanja operasional sekolah SD dan SMP terealisasi sebesar Rp22.775.878.257,30. Hal disebabkan karena di APBD Belanja BOS hanya ditampung melalui Peraturan Bupati Samosir tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019. Rincian belanja BOS dapat dilihat pada **Lampiran VIII**.
- 4) Belanja Iuran BPJS yang berasal dari DAU perubahan dan disetorkan langsung ke rekening BPJS.

#### V.1.2.1.3 Belanja Hibah - LRA

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>5.646.012.000,00</b>	<b>5.268.996.090,00</b>

Jumlah realisasi belanja hibah TA 2019 adalah sebesar Rp5.646.012.000,00, jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp6.798.600.000,00, maka jumlah realisasi tersebut lebih kecil sebesar Rp1.152.588.000,00 atau 83,05% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Hibah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp377.015.910,00 atau 7,16%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp5.268.996.090,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.29 Rekapitulasi Belanja Hibah-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.752.037.000,00	3.443.349.000,00	91,77	3.541.596.090,00
2	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	546.600.000,00	104.100.000,00	19,05	0,00
3	Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	327.963.000,00	327.963.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Hibah kepada BOP PAUD Masyarakat/Swasta	2.172.000.000,00	1.770.600.000,00	81,52	1.727.400.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.798.600.000,00</b>	<b>5.646.012.000,00</b>	<b>83,05</b>	<b>5.268.996.090,00</b>

Rincian belanja hibah dapat dilihat pada **Lampiran IX**.

**V.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>3.179.225.000,00</b>	<b>1.288.350.000,00</b>

Jumlah belanja bantuan sosial TA 2019 adalah sebesar Rp3.179.225.000,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.300.000.000,00 maka jumlah tersebut lebih kecil sebesar Rp120.775.000,00 atau 3,66%. Jumlah realisasi belanja bantuan sosial TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.890.875.000,00 atau 146,77% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.288.350.000,00, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran X**.

**V.1.2.2 Belanja Modal-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>164.093.834.379,00</b>	<b>186.281.849.902,00</b>

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal TA 2019 sebesar Rp164.093.834.379,00 jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp179.775.873.679,00, maka jumlah realisasi tersebut lebih kecil sebesar Rp15.682.039.300,00 atau 91,28% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja modal TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp22.188.015.523,00 atau 11,91%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp186.281.849.902,00. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Samosir pada TA 2019 sebagai berikut:

**Tabel V.1.30 Belanja Modal-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah	7.500.000.000,00	6.359.404.776,00	84,79	1.213.201.921,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.167.930.482,00	12.359.799.372,00	93,86	24.336.358.579,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.799.461.480,00	23.742.137.936,00	95,74	19.130.112.671,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	124.497.170.952,00	113.229.934.184,00	90,95	128.756.927.067,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.811.310.765,00	8.402.558.111,00	85,64	12.845.249.664,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>179.775.873.679,00</b>	<b>164.093.834.379,00</b>	<b>91,28</b>	<b>186.281.849.902,00</b>

Realisasi Belanja Modal ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama TA 2019. Rincian belanja modal per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XI**.

**V.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>6.359.404.776,00</b>	<b>1.213.201.921,00</b>

Belanja Modal Tanah pada TA 2019 dialokasikan sebesar Rp7.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.359.404.776,00 atau 84,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.213.201.921,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.146.202.855,00 atau 424,18%.

Adapun belanja modal tanah TA 2019 direalisasikan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa ganti rugi tanah untuk pelebaran jalan umum senilai Rp6.359.404.776,00.

**V.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>12.359.799.372,00</b>	<b>24.336.358.579,00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp12.359.799.372,00, jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp13.167.930.482,00, mengalami penurunan sebesar Rp808.131.110,00 atau 93,86%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp11.976.559.207,00 atau 49,21% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp24.336.358.579,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.31 Rincian Belanja Modal Peralatan dan mesin-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Pengadaan alat-alat bantu	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengadaan alat angkutan darat bermotor	2.818.005.000,00	2.816.275.000,00	99,94	6.692.676.650,00
3	Pengadaan alat angkutan apung bermotor	0,00	0,00	0,00	99.990.000,00
5	Pengadaan alat bengkel tak bermesin	0,00	0,00	0,00	99.924.000,00
7	Pengadaan alat pengolahan	0,00	0,00	0,00	270.727.000,00
8	Pengadaan alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan	10.871.407,00	10.871.407,00	100,00	61.150.000,00
9	Pengadaan alat kantor	773.215.475,00	731.761.475,00	94,64	6.261.636.445,00
10	Pengadaan alat rumah tangga	904.345.400,00	683.486.408,00	75,58	1.497.270.732,00
11	Pengadaan komputer	1.045.337.940,00	967.749.780,00	92,58	1.381.318.868,00
12	Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00	249.290.500,00
13	Pengadaan alat studio	40.685.259,00	36.811.455,00	90,48	456.253.050,00
14	Pengadaan alat komunikasi	168.563.900,00	162.063.900,00	96,14	10.127.000,00
15	Pengadaan peralatan pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pengadaan alat kedokteran	924.047.281,00	624.214.187,00	67,55	5.186.429.734,00
17	Pengadaan Alat Kesehatan	1.023.308.820,00	1.017.844.260,00	99,47	0,00

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
18	Pengadaan unit-unit laboratorium	129.000.000,00	78170000	60,60	0,00
19	Pengadaan alat peraga/praktek sekolah	5.291.000.000,00	5.200.939.500,00	98,30	2.061.670.000,00
20	Pengadaan alat keamanan dan perlindungan	20.000.000,00	18.062.000,00	90,31	7.894.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.167.930.482,00</b>	<b>12.359.799.372,00</b>	<b>93,86</b>	<b>24.336.358.579,00</b>

### V.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-LRA

TA 2019

TA2018

(Rp)

(Rp)

**23.742.137.936,00****19.130.112.671,00**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar Rp23.742.137.936,00 atau 95,74% dengan sisa anggaran sebesar Rp1.057.323.544,00 atau 4,26%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp19.130.112.671,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.612.025.265,00 atau 24,11%, realisasi ini hanya ada pada pengadaan bangunan gedung tempat kerja.

### V.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-LRA

TA 2019

TA 2018

(Rp)

(Rp)

**113.030.134.184,00****128.756.927.067,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp113.030.134.184,00 atau 90,97% dari anggaran sebesar Rp124.497.170.952,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp128.756.927.067,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp15.726.792.883,00 atau 12,21%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.32 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-LRA TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	Pengadaan jalan	98.000.851.059,00	89.600.642.837,00	91,43	100.217.719.998,00
2	Pengadaan jembatan	3.537.933.000,00	2.989.695.600,00	84,50	1.124.872.000,00
3	Pengadaan bangunan air irigasi	8.889.522.880,00	8.191.399.295,00	92,15	4.741.328.120,00
4	Pengadaan bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan BA	11.191.169.213,00	10.162.677.453,00	90,81	14.478.646.087,00
5	Pengadaan bangunan air bersih/baku	0,00	0,00	0,00	29.850.000,00
6	Pengadaan bangunan air	845.374.500,00	427.413.999,00	50,56	403.561.000,00
7	Pengadaan instalasi air minum/air bersih	181.258.300,00	181.158.000,00	99,94	108.745.000,00
8	Pengadaan jaringan air minum	1.651.037.000,00	1.286.657.000,00	77,93	6.225.847.662,00
9	Pengadaan jaringan listrik	200.025.000,00	190.490.000,00	95,23	1.426.357.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>124.497.170.952,00</b>	<b>113.030.134.184,00</b>	<b>90,79</b>	<b>128.756.927.067,00</b>

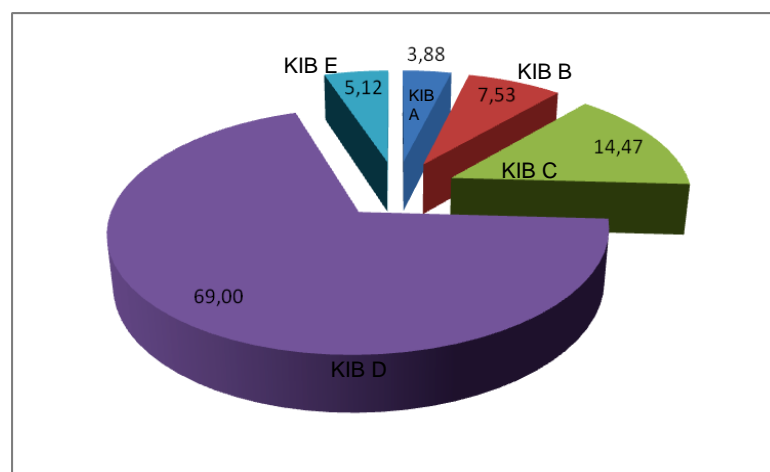
**V.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA2018 (Rp)
<b>8.602.358.111,00</b>	<b>12.845.249.664,00</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.602.358.111,00 atau 85,64% dari anggaran sebesar Rp9.811.310.765,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp12.845.249.664,00, maka terjadi menurun sebesar Rp4.242.891.553,00 atau 33,03%, yaitu pengadaan buku sebesar Rp2.621.432.111,00 dan pengadaan aset tetap renovasi sebesar Rp5.980.926.000,00.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2019.

**Grafik V.1.3 Persentase Realisasi Belanja Modal-LRA TA 2019**



Pada penyajian akun Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019 terdapat konversi karena adanya perbedaan kode rekening anggaran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan kode akun LRA yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

**V.1.2.3 Belanja Tak Terduga-LRA**

TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
<b>972.101.000,00</b>	<b>1.511.382.000,00</b>

Realisi belanja tak terduga TA 2019 sebesar Rp972.101.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.740.000.000,00 atau 55,87%. Realisasi belanja tak terduga mengalami penurunan sebesar Rp539.281.000,00 atau 35,68% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018

sebesar Rp1.511.382.000,00. Adapun rincian Realisasi Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1.33 Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga-LRA Tahun 2019**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2019	222.723.000,00
2	Penanganan Bencana Banjir Bandang Di Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio-tio TA. 2019	24.760.000,00
3	Biaya Pengamanan Kunjungan Kerja Presiden Di Kabupaten Samosir Tahun 2019 (KODIM 0210/Tapanuli Utara)	400.613.000,00
4	Jasa Kepabeanan Hibah Mobil Pemadam Kebakaran Dari Pemerintah Provinsi Gyeonggi Korea Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019	45.000.000,00
5	Biaya Pengamanan Kunjungan Republik Indonesia Di Kabupaten Samosir Tahun 2019	81.395.000,00
6	Penanganan Bencana Banjir Bandang Di Desa Holbung Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir TA. 2019	197.610.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>972.101.000,00</b>

### V.1.3. TRANSFER-LRA

TA 2019

TA2018

(Rp)

(Rp)

**159.719.329.538,00**

**139.756.664.418,00**

Realisasi transfer TA 2019 sebesar Rp159.719.329.538,00 digunakan untuk transfer bagi hasil pendapatan serta bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik .Jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp159.755.183.240,00, maka jumlah realisasi tersebut dibawah anggaran sebesar Rp35.853.702,00 atau 0,02%. Realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp19.962.665.120,00 atau 14,28% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp139.756.664.418,00. Belanja Transfer terdiri dari:

#### V.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah

TA 2019

TA 2018

(Rp)

(Rp)

**2.128.407.540,00**

**1.257.915.000,00**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa. Jumlah realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp2.128.407.540,00 dari anggaran sebesar Rp2.128.407.540,00 atau 100%. Realisasi transfer bagi hasil pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp870.492.540,00 atau 69,20% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.257.915.000,00.

**V.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa -LRA**

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>1.405.500.000,00</b>	<b>772.500.000,00</b>

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa adalah bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa. Jumlah realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp1.405.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.405.500.000,00 atau 100%. Realisasi transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp633.000.000,00 atau 81,94% jika dibandingkan dengan realiasi TA 2018 sebesar Rp772.500.000,00. Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dapat dilihat pada **Lampiran XII**.

**Tabel V.1.34 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa per Kecamatan-LRA TA 2019**

No	Kecamatan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Simanindo	230.734.000,00	230.734.000,00	100
2	Onanunggu	128.046.000,00	128.046.000,00	100
3	Nainggolan	143.741.000,00	143.741.000,00	100
4	Palipi	178.037.000,00	178.037.000,00	100
5	Harian	133.730.000,00	133.730.000,00	100
6	Slanjur Mulamula	122.030.000,00	122.030.000,00	100
7	Ronggur Nihuta	85.458.000,00	85.458.000,00	100
8	Pangururan	299.941.000,00	299.941.000,00	100
9	Sitiotio	83.783.000,00	83.783.000,00	100
<b>Jumlah</b>		<b>1.405.500.000,00</b>	<b>1.405.500.000,00</b>	<b>100</b>

**V.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LRA**

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>722.907.540,00</b>	<b>485.415.000,00</b>

Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa adalah bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa. Jumlah realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp722.907.540,00 dari anggaran sebesar Rp722.907.540,00 atau 100%. Realisasi transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp237.492.540,00 atau 48,93% jika dibandingkan dengan realiasi TA 2018 sebesar Rp485.415.000,00. Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dapat dilihat pada **Lampiran XII**.

**Tabel V.1.35 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa per Kecamatan-LRA TA 2019**

No	Kecamatan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Simanindo	118.689.000	118.689.000	100
2	Onanrunggu	65.889.000	65.889.000	100
3	Nainggolan	73.976.000	73.976.000	100
4	Palipi	91.608.000	91.608.000	100
5	Harian	68.812.000	68.812.000	100
6	Sianjur Mulamula	62.793.000	62.793.000	100
7	Ronggur Nihuta	43.601.000	43.601.000	100
8	Pangururan	154.370.000	154.370.000	100
9	Sitiotio	43.169.540	43.169.540	100
<b>Jumlah</b>		<b>722.907.540</b>	<b>722.907.540</b>	<b>100</b>

### V.1.3.3 Transfer Bantuan Keuangan-LRA

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>157.590.921.998,00</b>	<b>138.498.749.418,00</b>

Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan ke partai politik. Jumlah realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp157.590.921.998,00 dari anggaran sebesar Rp157.626.775.700,00 atau 99,98%. Realisasi transfer bantuan keuangan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp19.092.172.580,00 atau 13,79% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp138.498.749.418,00.

#### V.1.3.3.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>157.076.775.700,00</b>	<b>137.953.008.600,00</b>

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa TA 2019 adalah sebesar Rp157.076.775.700,00 dari anggarannya sebesar Rp157.076.775.700,00 atau 100,00%. Realisasi transfer bantuan keuangan ke desa TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp19.123.767.100,00 atau 13,86% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp137.953.008.600,00. Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp48.132.276.700,00 dan Dana Desa sebesar Rp108.744.499.000,00 dapat dilihat pada **Lampiran XII** dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Ginolat dalam rangka penyertaan modal desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) air minum Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mulamula sebesar Rp200.000.000,00.



**V.1.3.3.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LRA**

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>514.146.298,00</b>	<b>545.740.818,00</b>

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2019 sebesar Rp514.146.298,00, yang digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp550.000.000,00, maka jumlah realisasi tersebut dibawah anggaran sebesar Rp35.853.702,00 atau 93,48%. Realisasi transfer bantuan keuangan lainnya TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp31.594.520,00 atau 5,79% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp545.740.818,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.36 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik-LRA  
TA 2019 dan 2018**

No	Nama Parpol Penerima	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	52.948.230,00	57.761.706,00
2	Partai Amanat Nasional (PAN)	24.654.993,00	26.896.356,00
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	40.863.790,00	44.578.680,00
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	52.576.051,00	51.605.208,00
5	Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P)	114.213.533,00	124.596.582,00
6	Partai Demokrat	61.234.921,00	66.801.732,00
7	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	91.069.354,00	89.952.816,00
8	Partai gerakan indonesia raya (GERINDRA)	76.585.426,00	83.547.738,00
<b>Jumlah</b>		<b>514.146.298,00</b>	<b>545.740.818,00</b>

**V.1.4 SURPLUS/DEFISIT-LRA**

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>30.097.967.574,09</b>	<b>1.197.467.673,64</b>

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki anggaran defisit sebesar Rp20.437.136.065,79 namun dalam realisasinya terjadi surplus anggaran sebesar Rp30.097.967.574,09. TA 2019 mengalami surplus anggaran sedangkan TA 2018 mengalami defisit sebesar Rp1.197.467.673,64.

**V.1.5 PEMBIAYAAN-LRA**

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>20.437.136.065,79</b>	<b>25.634.603.739,43</b>

Pembiayaan Netto selama TA 2019 adalah sebesar Rp20.437.136.065,79 yang merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan TA 2019 sebesar Rp20.437.136.065,79 mengalami penurunan sebesar Rp5.197.467.673,64 atau 20,28% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp25.634.603.739,43. Rincian perhitungan pembiayaan netto TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.37 Rincian Pembiayaan-LRA TA 2019 dan 2018

No	Jenis Belanja	2019			Realisasi 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	(Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan				
	SILPA Tahun Sebelumnya	24.437.136.065,79	24.437.136.065,79	100,00	32.001.197.011,43
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>24.437.136.065,79</b>	<b>24.437.136.065,79</b>	100,00	<b>32.001.197.011,43</b>
2	Pengeluaran Pembiayaan				
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	6.366.593.272,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	100,00	<b>6.366.593.272,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>20.437.136.065,79</b>	<b>20.437.136.065,79</b>	100,00	<b>25.634.603.739,43</b>

#### V.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan-LRA

TA 2019

TA 2018

(Rp)

(Rp)

**24.437.136.065,79****32.001.197.011,43**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp24.437.136.065,79 dan Rp32.001.197.011,43 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.564.060.945,64 atau 23,64%..

Penerimaan Pembiayaan TA 2019 bersumber dari penggunaan SiLPA TA 2018 dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya.

#### V.1.5.1.1 Penggunaan SiLPA - LRA

TA 2019

TA2018

(Rp)

(Rp)

**24.437.136.065,79****32.001.197.011,43**

Realisasi Penggunaan Pembiayaan TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp24.437.136.065,79 dan Rp32.001.197.011,43 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.564.060.945,64 atau 23,64%.

**V.1.5.1.2 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya - LRA**

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah realisasi Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya TA 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan TA 2018 sebesar Rp0,00.

**V.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan-LRA**

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>4.000.000.000,00</b>	<b>6.366.593.272,00</b>

Jumlah realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp6.366.593.272,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.366.593.272,00 atau 37,17%. Pengeluaran pembiayaan ini merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Sumut.

**V.1.5.3 Pembiayaan Netto-LRA**

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>20.437.136.065,79</b>	<b>25.634.603.739,43</b>

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp20.437.136.065,79 dan Rp25.634.603.739,43 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.197.467.673,64 atau 20,28%.

**V.1.5.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)-LRA**

TA 2019	TA 2018
(Rp)	(Rp)
<b>50.535.103.639,88</b>	<b>24.437.136.065,79</b>

SiLPA TA 2019 sebesar Rp50.535.103.639,88 dan TA 2018 sebesar Rp24.437.136.065,79 atau mengalami kenaikan sebesar Rp26.097.967.574,09 atau 106,80%. Perhitungan SiLPA TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.1.38 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)-LRA TA 2019 dan 2018**

Uraian	2019			Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
Pendapatan -LRA	884.810.076.170,83	885.111.158.054,09	100,03	802.686.254.059,36
Belanja - LRA	745.492.028.996,62	695.293.860.942,00	93,27	664.127.057.315,00
Transfer	159.755.183.240,00	159.719.329.538,00	99,98	139.756.664.418,00
Pembiayaan	20.437.136.065,79	20.437.136.065,79	100,00	25.634.603.739,43
SiLPA	0,00	50.535.103.639,88	0,00	24.437.136.065,79

SiLPA TA 2019 tersebut diatas terdiri dari:

**Tabel V.1.39 Rincian Saldo Kas Pembentuk SiLPA-LRA TA 2019**

No	Uraian	Jumlah
1	Bank Sumut Cabang Pangururan (Rek:241.01.02.000001-0)	34.810.269.473,88
2	FKTP Puskesmas Sirait	42.140.324,00
3	FKTP Puskesmas Mogang	255.570.188,00
4	FKTP Puskesmas Ronggur Nihuta	104.861.812,00
5	FKTP Puskesmas Ambarita	43.054.611,00
6	FKTP Puskesmas Tuktuk Siadong	55.602.525,00
7	FKTP Puskesmas Puskesmas Siotio	34.398.927,00
8	FKTP Puskesmas Puskesmas Harian	85.017.492,00
9	FKTP Puskesmas Onan Runggu	21.554.627,00
10	FKTP Puskesmas Simarmata	2.901.694,00
11	FKTP Puskesmas Buhit	619.125.526,00
12	FKTP Puskesmas Limbong	101.385.526,00
13	FKTP Puskesmas Lontung	4.573.073,00
14	Kas di Bendahara Penerimaan	205.350.000,00
15	Kas di BLUD	5.244.810.678,00
16	Kas di Bendahara BOS	8.904.487.163,00
	<b>Jumlah</b>	<b>50.535.103.639,88</b>

Selain itu, termasuk di dalam nilai SiLPA Tahun Anggaran 2019 yang khususnya pada Rekening Kas Umum Daerah terdapat sisa dana Pusat sebesar Rp13.545.015.923,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.1.40 Rincian Sisa Dana Pusat Dalam SiLPA-LRA TA 2019**

No	Uraian	Jumlah
1	Tunjangan Profesi Guru	324.844.940,00
2	Tunjangan Penghasilan Guru	361.500.000,00
3	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	654.709.500,00
4	Dana Administrasi Kependudukan	1.458303,00
5	Perdagangan	21.500.883,00
6	Dana BOK Kesehatan	2.823.369.697,00

No	Uraian	Jumlah
7	Tunjangan khusus Guru	1.093.163.600,00
8	BOP PAUD	397.200.000,00
9	BOP Kesetaraan	169.200.000,00
10	Dana Penanggulangan Bencana	7.698.069.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.545.015.923,00</b>

**V.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)**

Penjelasan masing-masing pos LP-SAL sebagai berikut:

**V.2.1 KOMPONEN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menggambarkan jumlah Saldo Anggaran Lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan serta Saldo Anggaran Lebih Akhir yang akan menjadi Penerimaan Pembiayaan tahun berikutnya.

**V.2.1.1 Saldo Anggaran Lebih Awal**

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>24.437.136.065,79</b>	<b>31.998.312.489,43</b>

Saldo anggaran lebih (SAL) awal pada TA 2019 adalah sebesar Rp24.437.136.065,79. Jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp31.998.312.489,43, maka SAL awal TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp7.561.176.423,64 atau 23,63%. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit TA 2019.

**V.2.1.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>24.437.136.065,79</b>	<b>32.001.197.011,43</b>

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan TA 2019 adalah sebesar Rp24.437.136.065,79. Jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp32.001.197.011,43, maka penggunaan SAL TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp7.564.060.945,64 atau 23,64%.

**V.2.1.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>50.535.103.639,88</b>	<b>24.437.136.065,79</b>

SiLPA TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp50.535.103.639,88 dan Rp24.437.136.065,79 atau mengalami peningkatan sebesar Rp26.097.967.574,09 atau 106,80%.

**V.2.1.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>0,00</b>	<b>2.884.522,00</b>

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.884.522,00.

**V.2.1.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>50.535.103.639,88</b>	<b>24.437.136.065,79</b>

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp50.535.103.639,88 dan Rp24.437.136.065,79, atau mengalami peningkatan sebesar Rp26.097.967.574,09 atau 106.80%. Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan akumulasi Silpa tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berjalan.

### V. 3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penjelasan masing-masing pos LO sebagai berikut:

#### V.3.1 PENDAPATAN –LO

SALDO 2019 (Rp)	SALDO 2018 (Rp)
<b>888.096.060.142,74</b>	<b>828.244.198.569,24</b>

Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan:

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan DAK dan DAU.
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan retribusi daerah.

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Adapun pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer.

Akuntansi Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat Variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan LO yaitu penjumlahan pendapatan LRA dengan piutang pendapatan sampai dengan tahun berjalan (tahun laporan akuntansi) dikurang piutang tahun-tahun sebelum



nya dan dikurangi dengan koreksi. Koreksi dapat berupa pendapatan diterima dimuka, koreksi piutang, koreksi lebih atau double bayar, koreksi pemindahan akun dan sebagainya.

Pendapatan LO TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp888.096.060.142,74 dan Rp828.244.198.569,24. Pendapatan-LO TA 2019 naik sebesar Rp59.851.861.573,50 atau 7,23%, dibandingkan dengan TA 2018. Adapun rincian Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.1 Rekapitulasi Pendapatan-LO TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Pendapatan-LO 2019 (Rp)	Pendapatan-LO 2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60.392.937.174,03	49.860.701.520,24	10.532.235.653,79	21,12
2	Pendapatan Transfer	779.983.289.457,00	747.330.902.647,00	32.652.386.810,00	4,37
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	47.719.833.511,71	31.052.594.402,00	16.667.239.109,71	53,67
<b>Jumlah</b>		<b>888.096.060.142,74</b>	<b>828.244.198.569,24</b>	<b>59.851.861.573,50</b>	<b>7,23</b>

### V.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

SALDO 2019

SALDO 2018

(Rp)

(Rp)

**60.392.937.174,03**

**49.860.701.520,24**

PAD-LO adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2019 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah realisasi PAD-LO TA 2019 sebesar Rp60.392.937.174,03. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp49.860.701.520,24, realisasi PAD-LO TA 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.523.235.653,79 atau 21,12%. PAD-LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel V.3.2 Rekapitulasi Penerimaan PAD-LO TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	PAD-LO 2019 (Rp)	PAD-LO 2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	16.213.916.828,21	15.024.189.448,60	1.189.727.379,61	7,92
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	4.275.144.332,00	5.384.182.237,67	(1.109.037.905,67)	(20,60)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	4.533.993.582,00	2.714.607.460,00	1.819.386.122,00	67,02
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	35.369.882.431,82	26.737.722.373,97	8.632.160.057,85	32,28
<b>Jumlah</b>		<b>60.392.937.174,03</b>	<b>49.860.701.520,24</b>	<b>10.532.235.653,79</b>	<b>21,12</b>

**V.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO**

SALDO 2019

SALDO 2018

(Rp)

(Rp)

**16.213.916.828,21****15.024.189.448,60**

Jumlah pendapatan pajak daerah-LO TA 2019 merupakan realisasi penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp16.213.916.828,21. Jika dibandingkan dengan TA 2018, realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp1.189.727.379,61 atau 7,92,00%. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan PAD pada TA 2019. Adapun perhitungan Pendapatan-LO untuk masing-masing pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.3 Rincian Pendapatan-LO Untuk Masing-masing Pajak TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Pajak-LO 2019 (Rp)	Pajak -LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persentase (%)
1	Pajak Hotel	2.183.864.642,00	1.985.570.263,00	198.294.379,00	9,99
2	Pajak Restoran	1.442.578.834,89	1.263.675.867,00	178.902.967,89	14,16
3	Pajak Hiburan	321.073.500,00	236.379.600,00	84.693.900,00	35,83
4	Pajak Reklame	375.632.930,00	301.532.424,00	74.100.506,00	24,57
5	Pajak Penerangan Jalan	3.165.380.793,00	2.796.699.775,60	368.681.017,40	13,18
6	Pajak Parkir	17.998.000,00	4.019.200,00	13.978.800,00	347,8
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.049.378.877,32	3.871.838.112,00	177.540.765,32	4,59
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.434.502.501,00	2.676.796.057,00	(1.242.293.556,00)	(46,41)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.223.506.750,00	1.887.678.150,00	1.335.828.600,00	70,77
	<b>Jumlah</b>	<b>16.213.916.828,21</b>	<b>15.024.189.448,60</b>	<b>1.189.727.379,61</b>	<b>7,92</b>

Adapun rincian perhitungan dari pendapatan pajak-LO diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel V.3.4 Rincian Perhitungan Saldo Pendapatan Pajak-LO TA 2019 dan 2018**

NO	Jenis Pajak	Pendapatan-LRA (Rp)	Pelunasan Piutang 2018 (Rp)	Penambahan Piutang 2019 (Rp)	Pendapatan-LO (Rp)
1	Pajak Motel	2.274.222.667,00	90.358.025,00	0,00	2.183.864.642,00
2	Pajak Restoran	1.530.038.334,89	87.459.500,00	0,00	1.442.578.834,89
3	Pajak Hiburan	321.073.500,00	0,00	0,00	321.073.500,00
4	Pajak Reklame	375.632.930,00	0,00	0,00	375.632.930,00
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	3.165.380.793,00	0,00	0,00	3.165.380.793,00
6	Pajak Parkir	17.998.000,00	0,00	0,00	17.998.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.049.378.877,32	0,00	0,00	4.049.378.877,32
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.385.373.659,00	1.477.742.333,00	526.871.175,00	1.434.502.501,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.223.506.750,00	0,00	0,00	3.223.506.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.342.605.511,21</b>	<b>1.655.559.858,00</b>	<b>526.871.175,00</b>	<b>16.213.916.828,21</b>

**V.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**4.275.144.332,00****5.384.182.237,67**

Jumlah Retribusi Daerah-LO daerah TA 2019 sebesar Rp4.275.144.332,00. Jika dibandingkan TA 2018 sebesar Rp5.384.182.237,67, berarti mengalami penurunan sebesar Rp1.109.037.905,67 atau 20,60%. Rincian pendapatan retribusi-LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.3.5 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2019 dan 2018**

No	Jenis pendapatan	Retribusi-LO 2019 (Rp)	Retribusi-LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	Persentase (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan –LO	28.698.862,00	429.473.500,00	(400.774.638,00)	(93,32)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	236.438.000,00	238.586.000,00	(2.148.000,00)	(0,90)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	102.650.000,00	98.500.000,00	4.150.000,00	4,21
4	Retribusi Pelayanan Pasar –LO	1.101.600.000,00	997.892.870,00	103.707.130,00	10,39
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	22.760.000,00	79.970.000,00	(57.210.000,00)	(71,54)
6	Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum	0,00	27.537.657,67	(27.537.657,67)	(100,00)
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	667.569.310,00	1.338.671.230,00	(671.101.920,00)	(50,13)
8	Retribusi Terminal –LO	17.163.333,00	0,00	17.163.333,00	0,00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir –LO	11.087.000,00	10.220.000,00	867.000,00	8,48
10	Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa	47.305.000,00	32.440.000,00	14.865.000,00	45,82
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	26.470.000,00	25.205.000,00	1.265.000,00	5,02
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan –LO	75.176.184,00	101.462.612,00	(26.286.428,00)	(25,91)
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO	1.250.428.000,00	1.439.992.000,00	(189.564.000,00)	(13,16)
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	173.970.000,00	88.373.300,00	85.596.700,00	96,86
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan –LO	505.968.643,00	402.985.767,00	102.982.876,00	25,55
16	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	950.000,00	775.000,00	175.000,00	22,58
17	Pemberian Izin gangguan tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi-LO	0,00	55.927.301,00	(55.927.301,00)	(100,00)
18	Retribusi Izin Trayek –LO	3.520.000,00	16.170.000,00	(12.650.000,00)	(78,23)
19	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang –LO	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>4.275.144.332,00</b>	<b>5.384.182.237,67</b>	<b>(1.109.037.905,67)</b>	<b>(20,60)</b>

Adapun rincian perhitungan dari pendapatan retribusi-LO diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.3.6 Rincian Perhitungan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2019

No	Jenis Pendapatan	Pendapatan LRA (Rp)	Pelunasan Piutang 2018 (Rp)	Penambahan Piutang 2019 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2019 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2018 (Rp)	Pendapatan LO 2019 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	340.198.862,00	311.500.000,00	0,00	0,00	0,00	28.698.862,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	236.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.438.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	116.750.000,00	15.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	102.650.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar –LO	1.101.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.600.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	22.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	679.984.856	26.673.676,00	14.258.130,00	0,00	0,00	667.569.310,00
7	Retribusi Terminal –LO	16.455.000,00	0,00	0,00	916.667,00	1.625.000,00	17.163.333,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	11.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087.000,00
9	Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa	47.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	26.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.470.000,00
11	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan –LO	80.376.184,00	5.200.000	0,00	0,00	0,00	75.176.184,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO	1.250.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.428.000,00
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	173.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.970.000,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan –LO	505.968.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.968.643,00
15	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
16	Retribusi Izin Gangguan –LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Retribusi Izin Trayek –LO	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
18	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang –LO	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.617.651.545,00</b>	<b>353.773.676,00</b>	<b>15.758.130,00</b>	<b>916.667,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>4.275.144.332,00</b>

**V.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**4.533.993.582,00****2.714.607.460,00**

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2019 sebesar Rp4.533.993.582,00. Jika dibandingkan TA 2018 sebesar Rp2.714.607.460,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp1.819.386.122,00 atau 67,02%.

**V.3.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO**

Saldo 2019

Saldo 2018

(Rp)

(Rp)

**35.369.882.431,82****26.737.722.373,97**

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO TA 2019 sebesar Rp35.369.882.431,82. Jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp26.737.722.373,97

berarti mengalami kenaikan sebesar Rp8.632.160.057,85 atau 32,28%. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO terdiri dari:

Tabel V.3.7 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	Persentase (%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	16.402.000,00	(16.402.000,00)	(100,00)
2	Penerimaan Jasa Giro	1.097.978.101,00	1.791.375.001,00	(693.396.900,00)	(38,71)
3	Pendapatan Bunga Deposito	2.888.630.193,20	942.257.534,00	1.946.372.659,20	206,56
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.652.281.254,09	1.554.945.762,07	1.097.335.492,02	70,57
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara	1.247.940.157,94	0,00	1.247.940.157,94	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	284.456.219,57	1.757.183.614,90	(1.472.727.395,33)	(83,81)
7	Pendapatan Denda Pajak	28.147.304,00	48.184.763,00	(20.037.459,00)	(41,58)
8	Pendapatan Denda Retribusi	649.801,00	1.870.000,00	(1.220.199,00)	(65,25)
9	Pendapatan dari Pengembalian	36.086.662,00	210.694.494,00	(174.607.832,00)	(82,87)
10	Pendapatan BLUD	21.038.438.501,00	15.440.304.986,00	5.598.133.515,00	36,26
11	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	82.762.387,02	(32.552.098,00)	115.314.485,02	(354,25)
12	Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	5.992.517.521,00	5.007.056.317,00	985.461.204,00	19,68
14	Dana BOS	19.994.330,00	0,00	19.994.330,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>35.369.882.431,82</b>	<b>26.737.722.373,97</b>	<b>8.632.160.057,85</b>	<b>32,28</b>

Adapun rincian perhitungan dari lain-lain PAD yang sah-LO diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.3.8 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2019

No	Jenis Pendapatan	Pendapatan LRA (Rp)	Piutang 2018 (Rp)	Piutang 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Pendapatan LO 2019 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	627.966.798,00	0,00	0,00	627.966.798,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	1.097.978.101,00	0,00	0,00	0,00	1.097.978.101,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	2.888.630.193,20	0,00	0,00	0,00	2.888.630.193,20
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.652.281.254,09	0,00	0,00	0,00	2.652.281.254,09
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara	0,00	0,00	1.247.940.157,94	0,00	1.247.940.157,94
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	284.456.219,57	0,00	0,00	0,00	284.456.219,57
7	Pendapatan Denda Pajak	28.147.304,00	0,00	0,00	0,00	28.147.304,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	649.801,00	0,00	0,00	0,00	649.801,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	36.086.662,00	0,00	0,00	0,00	36.086.662,00
10	Pendapatan BLUD	20.309.723.084,00	2.424.681.718,00	3.153.397.135,00	0	21.038.438.501,00

No	Jenis Pendapatan	Pendapatan LRA (Rp)	Piutang 2018 (Rp)	Piutang 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Pendapatan LO 2019 (Rp)
11	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	82.762.387,02	0,00	0,00	0,00	82.762.387,02
12	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari kelompok Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	5.992.517.521,00	0,00	0,00	0,00	5.992.517.521,00
14	Dana BOS	0	0,00	0,00	(19.994.330,00)	19.994.330,00
<b>Jumlah</b>		<b>34.003.199.324,88</b>	<b>2.426.681.718,00</b>	<b>4.491.265.992,94</b>	<b>607.972.468</b>	<b>35.369.882.431,82</b>

### V.3.1. 2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

Saldo 2019

Saldo 2018

(Rp)

(Rp)

---

**779.983.289.457,00**


---

**747.330.902.647,00**

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Sampai dengan 31 Desember 2019, telah direalisasikan sebesar Rp779.983.289.457,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp747.330.902.647,00 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp32.652.386.810,00 atau 4,37%. Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.9 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer-LO TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Pendapatan-LO 2019(Rp)	Pendapatan-LO 2018(Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	636.204.549.291,00	608.164.685.810,00	28.039.863.481,00	4,61
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	119.226.763.000,00	90.953.371.000,00	28.273.392.000,00	31,09
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	24.551.977.166,00	30.387.619.284,00	(5.835.642.118,00)	(19,20)
4	Bantuan Keuangan – LO	0,00	17.825.226.553,00	(17.825.226.553,00)	(100)
<b>Jumlah</b>		<b>779.983.289.457,00</b>	<b>747.330.902.647,00</b>	<b>32.652.386.810,00</b>	<b>4,37</b>

#### V.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Saldo 2019

Saldo 2018

(Rp)

(Rp)

---

**636.204.549.291,00**


---

**608.164.685.810,00**

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yaitu berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat TA 2019 sebesar Rp636.204.549.291,00. Jika dibandingkan dengan

realisasi TA 2018 sebesar Rp608.164.685.810,00 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp28.039.863.481,00 atau 4,61%. Rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.10 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer-LO TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Pendapatan-LRA 2019 (Rp)	Pendapatan-LO 2019 (Rp)	Pendapatan-LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Persentase (%)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	7.906.318.303,00	7.731.070.781,00	10.855.232.799,00	(3.124.162.018,00)	(28,78)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.155.106.279,00	3.330.353.801,00	3.688.724.037,00	(358.371.037,00)	(9,72)
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	465.249.052.000,00	465.249.052.000,00	453.737.230.000,00	11.511.822.000,00	2,54
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	87.280.462.603,00	87.280.462.603,00	72.561.043.227,00	14.719.419.376,00	20,29
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	72.613.610.106,00	72.613.610.106,00	67.322.455.747,00	5.291.154.359,00	7,86
<b>TOTAL</b>		<b>636.204.549.291,00</b>	<b>636.204.549.291,00</b>	<b>608.164.685.810,00</b>	<b>28.039.862.680,00</b>	<b>4,61</b>

Tidak terdapat piutang dana transfer sampai dengan Tahun 2019 dan 2018, dimana sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa pengakuan penerimaan transfer-LO dari pemerintah pusat bersamaan dengan diterimanya kas di kas daerah.

#### V.3.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya –LO

Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
<b>119.226.763.000,00</b>	<b>90.953.371.000,00</b>

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO TA 2019 yaitu berupa penerimaan Dana Desa dimana nilainya lebih kecil dibanding dengan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA senilai Rp. 148.690.763.000,00 dan selisihnya sebesar Rp.29.464.000,00 adalah Pendapatan Dana BOS yang merupakan Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya TA 2019 sebesar Rp119.226.763.000,00 jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp90.953.371.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp28.273.392.000,00 atau 31,09%.

#### V.3.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO

Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
<b>24.551.977.166,00</b>	<b>30.387.619.284,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO adalah merupakan dana transfer atas pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu berupa dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah realisasi dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2019 sebesar Rp24.551.977.166,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar

Rp30.387.619.284,00, berarti mengalami penurunan sebesar Rp5.835.642.118,00 atau 2,77%. Rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.11 Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Pendapatan-LO 2019 (Rp)	Pendapatan-LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	(1.530.331.192,00)	16.360.613.223,00	(17.890.944.415,00)	(109,35)
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	8.218.843.507,00	1.213.168.304,00	7.005.675.203,00	577,47
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	9.694.294.015,00	1.824.062.673,00	7.870.231.342,00	431,47
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	651.431.886,00	47.243.519,00	604.188.367,00	1.278,88
6	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok - LO	7.517.738.950,00	10.942.531.565,00	(3.424.792.615,00)	(31,30)
	<b>Jumlah</b>	<b>24.551.977.166,00</b>	<b>30.387.619.284,00</b>	<b>(5.835.642.118,00)</b>	<b>(19,20)</b>

Adapun Rincian Perhitungan Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO TA 2019 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.3.12 Rincian Perhitungan Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Penambahan Piutang 2019 (Rp)	Pendapatan-LO 2019 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	9.409.660.108,00	13.848.027.977,00	2.908.036.677,00	(1.530.331.192,00)
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	6.636.676.685,00	0,00	1.582.166.822,00	8.218.843.507,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	7.853.248.092,00	0,00	1.841.045.923,00	9.694.294.015,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	583.008.635,00	0,00	68.423.251,00	651.431.886,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok - LO	7.517.738.950,00	0,00	0,00	7.517.738.950,00
	<b>Jumlah</b>	<b>32.000.332.470,00</b>	<b>13.848.027.977,00</b>	<b>6.399.672.673,00</b>	<b>24.551.977.166,00</b>

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan-LO Tahun 2019 dengan Pendapatan-LRA Tahun 2019, hal ini disebabkan oleh adanya koreksi piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan penyisihan piutang dana bagi hasil pajak pada SKPKD sebesar Rp13.848.027.977,00.

#### V.3.1.2.4 Bantuan Keuangan –LO

Saldo 2019

Saldo 2018

(Rp)

(Rp)

**0,00**

**17.825.226.553,00**



Bantuan Keuangan-LO adalah merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jumlah realisasi TA 2019 sebesar Rp0,00 dan 2018 sebesar Rp17.825.226.553,00.

### V.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Saldo 2019

Saldo 2018

(Rp)

(Rp)

**47.719.833.511,71****31.052.594.402,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO adalah Pendapatan Hibah-LO yang terdiri dari pendapatan hibah dari pemerintah, hibah dari pemerintah daerah lainnya, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dan Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat. Pendapatan hibah-LO TA 2019 direalisasikan sebesar Rp47.719.833.511,71. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp31.052.594.402,00 mengalami peningkatan sebesar Rp16.667.239.109,71 atau 53,67%.

**Tabel V.3.13 Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	44.771.316.003,71	9.031.263.452,00	35.740.052.551,71	395,74
2	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.228.957.008,00	21.904.330.950,00	(20.675.373.942,00)	(94,39)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	565.727.500,00	117.000.000,00	448.727.500,00	383,53
4	Pendapatan Hibah dari kelompok Masyarakat-LO	1.153.833.000,00	0,00	1.153.833.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>47.719.833.511,71</b>	<b>31.052.594.402,00</b>	<b>16.667.239.109,71</b>	<b>53,67</b>

#### a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan hibah dari pemerintah-LO TA 2019 adalah sebesar Rp15.282.316.003,71 dan jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp9.031.263.452,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.155.408.949,71 atau 101,37%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.14 Rincian Hibah dari Pemerintah Pusat- LO TA 2019 dan 2018**

NO	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Dari Kementerian Lingkungan Hidup	218.922.000,00
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hibah Obat-obatan dari BKKBN	99.945.860,00
3	Dinas Pariwisata	Hibah dari Kementerian PUPR dan Geopark Kaldare Toba	6.155.420.870,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	Hibah dari Pemerintah Pusat (Dana Bencana Alam)	7.698.069.000,00
		Hibah dari Pemerintah Pusat (Dana BOS)	29.464.000.000,00
5	Dinas Pendidikan	Hibah dari Kementerian Pendidikan	1.047.808.273,71

NO	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
7	Dinas Kesehatan	Hibah dari Pemerintah Pusat	87.150.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>44.771.316.003,71</b>

Hibah dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp1.047.808.273,71 kepada Dinas Pendidikan yang disalurkan ke sekolah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.15 Rincian Hibah dari Pemerintah Pusat pada Dinas Pendidikan- LO TA 2019 dan 2018**

No	Sekolah Penerima	Jumlah (Rp)
1	SMPN 1 Onan Runggu	25.000.000,00
2	SDN 12 Hariara Pintu	25.000.000,00
3	SMPN 1 Harian	25.000.000,00
4	SMPN 2 Harian	25.000.000,00
5	SDN 6 Sideak	17.600.000,00
6	SDN 7 Sideak	7.400.000,00
7	SDN 15 Sigaol Simbolon	25.000.000,00
8	SMPN 1 Palipi	25.000.000,00
9	SD N 10 Salaon Tonga-tonga	25.000.000,00
10	SD N 12 Ronggur Nihuta	25.000.000,00
11	SDN 1 Ambarita	25.000.000,00
12	SDN 8 Tuktuk Siadong	25.000.000,00
13	SDN 11 Huta Ginjang	25.000.000,00
14	SDN 25 Tuktuk Siadong	25.000.000,00
15	SDN 27 Sihusapi	25.000.000,00
16	SD N 1 Pardomuan I	25.000.000,00
17	SD N 3 Pasar Pangurusan	25.000.000,00
18	SD N 6 Saitnihuta	25.000.000,00
19	SD N 12 Pintusona	25.000.000,00
20	SD Negeri 4 Sippinggan Nainggolan	25.000.000,00
21	SD N 8 Toguan Galung Nainggolan	25.000.000,00
22	SMP N 1 Nainggolan	182.801.285,71
23	SD N 1 Boho Sianjur Mula Mula	25.000.000,00
24	SD N 2 Aek Sipitundai Sianjur Mula Mula	25.000.000,00
25	SMP N 1 Sianjurmulamula	265.006.988,00
26	SMP N 2 Siotio	25.000.000,00
27	SMP N 3 Siotio	25.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.047.808.273,71</b>

b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO pada tahun 2019 sebesar Rp1.228.957.008,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp21.904.330.950,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp20.675.373.942,00 atau

94,39%, yaitu pendapatan hibah obat-obatan dari Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Kesehatan.

c. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO

Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri -LO pada tahun 2019 sebesar Rp565.727.500,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp117.000.000,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp448.727.500,00 atau 383,53%. Pendapatan hibah ini berupa Taman Simpang Empat CSR dari Bank Sumut yang dicatatkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir sebesar Rp521566390,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp44.161.110,00.

d. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat-LO

Pendapatan hibah dari dari Kelompok Masyarakat-LO pada tahun 2019 sebesar Rp1.153.833.000,00 jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp0,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.153.833.000,00 atau 100,00 %.

### V.3.2. BEBAN-LO

Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
<b>845.729.672.839,09</b>	<b>742.412.524.435,89</b>

Beban Pemerintah Kabupaten Samosir yang diakui per 31 Desember 2019 sebesar Rp845.729.672.839,09 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp742.412.524.435,89 atau mengalami peningkatan sebesar Rp103.317.148.403,20 atau 13,92%, dengan rincian sebagai berikut:

#### V.3.2.1 Beban Pegawai- LO

Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
<b>345.162.973.031,00</b>	<b>311.244.956.708,00</b>

Beban Pegawai yang diakui per 31 Desember 2019 sebesar 345.162.973.031,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp311.244.956.708,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.918.016.323,00 atau 10,90%. Beban pegawai-LO Tahun 2019 sebesar Rp345.162.973.031,00 sama dengan jumlah realisasi belanja pegawai-LRA TA 2019 adalah sebesar Rp345.162.973.031,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.16 Rincian Realisasi Beban Pegawai-LO TA 2019**

No	Uraian	Belanja-LRA 2019 (Rp)	Beban-LO 2019 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	200.970.972.352,00	200.970.972.352,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	116.402.529.509,00	116.402.529.509,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO	2.316.460.000,00	2.316.460.000,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO	606.887.744,00	606.887.744,00

No	Uraian	Belanja-LRA 2019 (Rp)	Beban-LO 2019 (Rp)
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO	124.150.000,00	124.150.000,00
6	Beban Honorarium-LO	24.741.973.426,00	24.741.973.426,00
<b>Jumlah</b>		<b>345.162.973.031,00</b>	<b>345.162.973.031,00</b>

### V.3.2.2 Beban Persediaan- LO

Saldo 2019

(Rp)

**80.201.724.967,56**

Saldo 2018

(Rp)

**29.836.051.368,45**

Beban persediaan pada TA 2019 adalah sebesar Rp80.201.724.967,56, jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp29.836.051.368,45 mengalami peningkatan sebesar Rp50.365.673.599,11 atau 168,81%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.17 Rincian Beban Persediaan-LO TA 2019**

No	Uraian	Belanja Persediaan-LRA (Rp)	Belanja Persediaan –Non LRA (Rp)	Belanja –LRA Yang bukan belanja persediaan (Rp)	Belanja Persediaan yang menjadi aset (Rp)	Persediaan Awal (Rp)	Persediaan Akhir (Rp)	Beban Persediaan (Rp)
		1	2	3	4	5	6	7=1+2+3-4+5-6
1	Barang Habis Pakai							
	- Alat Tulis Kantor	3.791.598.277,00	5.720.960.876,00	0,00	51.610.000,00	103.387.069,00	136.224.334,00	9.428.111.888,00
	- Dokumen/Administrasi tender	4.200.000,00				237.601.500,00	172.008.180,00	69.793.320,00
	- Alat Listrik dan Elektronik	202.199.279,00	103.324.039,00	9.375.000,00			439.000,00	314.459.318,00
	- Perangko, materai dan Benda Pos Lainnya	100.150.000,00	9.900.000,00			1.263.000,00	1.278.000,00	110.035.000,00
	- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	679.058.312,00	123.201.000,00	45.631.500,00		4.163.800,00	1.574.300,00	850.480.312,00
	- Bahan Bakar Minyak	2.596.216.432,00	268.746.000,00				116.362.947,37	2.748.599.484,63
	- Tabung gas	31.817.125,00	12.000.000,00				3.300.000,00	40.517.125,00
	- Tabung Oksigen	1.395.000,00						1.395.000,00
	- Perawatan Kesehatan	2.849.699.041,00	1.229.886.099,00		1.706.771.734,48			2.372.813.405,52
2	Bahan dan Material							
	- Bahan baku bangunan	39.258.900,00				84.379.200,00	44.312.000,00	79.326.100,00
	- Bibit tanaman	140.359.000,00						140.359.000,00
	- Bahan Obat-obatan	1.703.611.293,00	4.350.686.718,00	427.913.888,00		5.253.528.383,19	4.833.957.813,46	6.901.782.468,73
	- Bahan Kimia	57.465.476,00				416.237.227,48	151.555.848,61	322.146.854,87
	- Makanan Pokok	240.968.500,00	627.018.740,00					867.987.240,00
	- Bahan Material lainnya	1.664.896.170,00	3.877.945.123,00	104.468.100,00				5.647.309.393,00
	- Makanan dan Minuman	7.543.184.400,00						7.543.184.400,00
	- Pakaian dan atribut	608.216.000,00						608.216.000,00
	- Pakaian Kerja	125.750.000,00						125.750.000,00
	- Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	61.769.000,00						61.769.000,00
	- Cetak dan Penggandaan	4.604.975.778,00			16.900.000,00			4.588.075.778,00

No	Uraian	Belanja Persediaan-LRA (Rp)	Belanja Persediaan –Non LRA (Rp)	Belanja –LRA Yang bukan belanja persediaan (Rp)	Belanja Persediaan yang menjadi aset (Rp)	Persediaan Awal (Rp)	Persediaan Akhir (Rp)	Beban Persediaan (Rp)
-	Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	13.471.188.029,00		3.494.045.640,68		36.032.816.196,81	15.717.847.386,68	37.280.202.479,81
-	Barang untuk dijual kepada masyarakat/pihak ketiga	99.411.400,00						99.411.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>40.617.387.412,00</b>	<b>16.323.668.595,00</b>	<b>4.081.434.128,68</b>	<b>1.775.281.734,48</b>	<b>42.394.687.048,53</b>	<b>21.196.359.810,12</b>	<b>80.201.724.967,56</b>

Rincian beban persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XIII**. Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alat Tulis Kantor:

- Penambahan belanja dari dari dana BOS dan dianggarkan pada rekening belanja jasa BOS yakni alat tulis kantor sebesar Rp5.551.232.086,00 dan belanja BLUD pada RSUD sebesar Rp120.728.500,00
- Penambahandari aset KIB B menjadi alat tulis kantor sebesar Rp49.000.290,00 pada Puskesmas Simarmata
- Pengurangan yang seharusnya barang yang diserahkan kepada pihak ketiga pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp51.610.000,00 yang belanjanya dianggarkan pada Alat Tulis Kantor.

2. Alat Listrik dan Elektronik

Penambahan beban sebesar Rp8.575.000,00 yang merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin yang beban persediaan alat listrik dan elektronik dan reklas beban barang jasa BLUD ke beban alat listrik dan elektronik sebesar Rp103.324.039,00 pada RSUD serta reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin ke beban alat listrik dan elektronik pada Dinas Pendidikan.

3. Perangko, Materai dan Benda pos lainnya

Penambahan beban sebesar Rp9.900.000 yang merupakan reklas beban barang jasa BLUD ke beban Perangko, Materai dan Benda pos lainnya pada RSUD

4. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Penambahan beban sebesar Rp45.631.500,00 yang merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada Sekretariat Daerah dan reklasifikasi beban barang jasa BLUD ke beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp123.201.000,00 pada RSUD

5. Bahan Bakar Minyak

Penambahan beban sebesar Rp268.746.000,00 yang merupakan reklasifikasi beban barang jasa BLUD ke beban bahan bakar minyak sebesar Rp123.201.000,00 pada RSUD

6. Barang Pakai Habis Perawatan Kesehatan

- Penambahan beban sebesar Rp1.229.886.099,00 yang merupakan reklasifikasi beban aset tetap peralatan dan mesin menjadi beban barang pakai habis perawatan kesehatan pada Dinas Kesehatan

- b. Pengurangan beban sebesar Rp1.706.771.734,48 yang merupakan reklasifikasi beban barang pakai habis perawatan kesehatan ke aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan

7. Obat-obatan

- a. Penambahan obat-obatan sebesar Rp4.350.686.718,00 yang merupakan reklasifikasi beban barang jasa BLUD ke obat-obatan pada RSUD sebesar Rp3.021.783.850,00, pendapatan hibah obat-obatan dari Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.228.957.008,00 pada Dinas Kesehatan dan hibah dari BKKBN sebesar Rp99.945.860,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin menjadi beban obat-obatan sebesar Rp427.913.888,00 pada Dinas Kesehatan
- b. Terdapat selisih sebesar Rp600.323.412,00 yang merupakan persediaan obat-obatan akhir TA 2019 yang bebannya diambil dari beban bahan material lainnya diambil persediaan akhir bahan material lainnya sebesar Rp439.555.597,00 pada RSUD dan sebesar Rp160.767.815,00 pada Dinas Pertanian

8. Bahan Material lainnya

Penambahan bahan material lainnya sebesar Rp3.877.945.123,00 yang merupakan reklasifikasi beban barang jasa BLUD ke beban bahan material lainnya pada RSUD

9. Makanan Pokok

Terdapat selisih sebesar Rp627.018.740,00 yang merupakan reklasifikasi beban barang jasa BLUD sebesar Rp635.568.740,00 pada RSUD dan sebesar Rp8.550.000,00 pada Dinas Perhubungan yang dikurangi RSUD reklasifikasi belanja logistik ke belanja modal

10. Cetak dan penggandaan

Pengurangan atas reklasifikasi dari beban cetak dan penggandaan menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp16.900.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

11. Barang yang diserahkan ke Masyarakat/Kepihak Ketiga

Penambahan sebesar Rp3.494.045.640,68 dari hutang retensi persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp46.143.240,68 pada Dinas Pariwisata, penambahan atas kesalahan pengambilan akun beban ATK yang seharusnya beban barang yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp51.610.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan penambahan persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat dari hutang jangka pendek lainnya sebesar Rp3.396.292.400,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

**V.3.2.3 Beban Jasa - LO**

<b>Saldo 2019</b>	<b>Saldo 2018</b>
(Rp)	(Rp)
<b>53.386.606.391,52</b>	<b>57.406.085.550,26</b>

Beban jasa pada TA 2019 adalah sebesar Rp53.386.606.391,52 jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp57.406.085.550,26 mengalami penurunan sebesar Rp4.019.479.158,74 atau 7,00%. Beban Jasa-LO adalah sebesar Rp53.386.606.391,52 sedangkan belanja jasa-LRA adalah sebesar Rp82.085.000.904,00, terdapat selisih sebesar Rp28.663.181.223,48 yaitu adanya koreksi tambah sebesar Rp29.885.919.000,51 dan koreksi kurang sebesar Rp1.222.737.777,03 dengan rincian sebagai berikut:

## V.3.18 Rincian Beban Jasa-LO TA 2019

No	Uraian	Belanja Jasa-LRA (Rp)	Koreksi Kurang (-)	Koreksi Tambah (+)	Beban Jasa-LO
					(Rp)
1	Belanja Telepon	208.207.566,00	0,00	0,00	208.207.566,00
2	Belanja Air	122.791.056,00	0,00	0,00	122.791.056,00
3	Belanja Listrik	3.748.534.712,00	0,00	0,00	3.748.534.712,00
4	Belanja Surat Kabar/Majalah	956.655.420,00	0,00	0,00	956.655.420,00
5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.180.270.471,00	0,00	0,00	2.180.270.471,00
6	Belanja Paket/Pengiriman	34.375.900,00	0,00	0,00	34.375.900,00
7	Belanja Sertifikasi	834.960,00	0,00	0,00	834.960,00
8	Belanja Jasa Kebersihan	727.500.000,00	0,00	0,00	727.500.000,00
9	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	1.271.977.600,00	0,00	0,00	1.271.977.600,00
10	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	13.715.910.093,00	0,00	0,00	13.715.910.093,00
11	Belanja Jasa Publikasi	460.000.000,00	0,00	0,00	460.000.000,00
12	Belanja Jasa Petugas Keamanan	361.007.184,00	0,00	0,00	361.007.184,00
13	Belanja jasa dokumentasi	13.460.000,00	0,00	0,00	13.460.000,00
14	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	103.998.337,00	28.937.422,00	0,00	75.060.915,00
15	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
16	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	43.837.515,00	26.333.789,00	151.162.790,70	168.666.516,70
17	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	509.613.900,00	5.481.735,00	5.442.945,74	509.575.110,74
18	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	194.160.000,00	0,00	0,00	194.160.000,00
19	Belanja Sewa Penginapan	228.643.000,00	0,00	0,00	228.643.000,00
20	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	79.092.000,00	0,00	0,00	79.092.000,00
21	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	29.370.500,00	0,00	0,00	29.370.500,00
22	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	2.613.613,00	0,00	0,00	2.613.613,00
23	Belanja Sewa Meja Kursi	80.771.000,00	0,00	0,00	80.771.000,00
24	Belanja Sewa Generator	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
25	Belanja Sewa Tenda	224.820.704,00	0,00	0,00	224.820.704,00
26	Belanja Sewa Soundsystem	298.600.000,00	0,00	0,00	298.600.000,00
27	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	227.884.500,00	0,00	(197.884.500,00)
28	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.469.109.190,00	1.888.898.884,51	0,00	580.210.305,49
29	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.841.651.700,00	1.994.234.700,00	0,00	(152.583.000,00)
30	Belanja Jasa Konsultansi lainnya	749.452.500,00	0,00	0,00	749.452.500,00
31	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	2.625.222.863,00	0,00	0,00	2.625.222.863,00

No	Uraian	Belanja Jasa-LRA (Rp)	Koreksi Kurang (-)	Koreksi Tambah (+)	Beban Jasa-LO
					(Rp)
32	Belanja Sosialisasi	65.634.500,00	0,00	0,00	65.634.500,00
33	Belanja Bimbingan Teknis	393.787.335,00	0,00	0,00	393.787.335,00
34	Belanja Operasional Sekolah	19.171.297.334,00	11.892.611.398,00	16.636.382,19	7.295.322.318,19
35	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.430.475.267,00	11.118.884.746,00	1.042.195.058,40	9.353.785.579,40
36	Belanja Jasa Medis dan Para Medis	1.150.355.987,00	0,00	0,00	1.150.355.987,00
37	Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00
38	Belanja beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD	49.800.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00
39	Belanja upah pekerja harian	143.902.300,00	0,00	0,00	143.902.300,00
40	Belanja luran JKN	2.271.190.719,00	0,00	0,00	2.271.190.719,00
41	Belanja jasa kesehatan dan non kesehatan	2.822.388.852,00	0,00	55.377.311,00	2.877.766.163,00
42	Belanja rumah tidak layak huni	301.545.000,00	0,00	0,00	301.545.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>79.299.059.078,00</b>	<b>27.183.267.174,51</b>	<b>1.270.814.488,03</b>	<b>53.386.606.391,52</b>

Selisih Tambah Belanja LRA dengan beban-LO diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas -LO sebesar Rp151.162.790,70 merupakan beban jasa dibayar dimuka mess PEMDA TA. 2018 pada SKPD Sekretariat Daerah
- b. Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat - LO sebesar Rp5.442.945,74 merupakan Beban dibayar dimuka atas sewa Gudang BPBD 2019 sebesar Rp4.166.667,00 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Beban Sewa dibayar Dimuka atas sewa gedung kantor sebesar Rp1.315.068,00 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
- c. Beban belanja Operasional sekolah-LO sebesar Rp16.636.382,19 merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin menjadi barang pakai habis sebesar Rp10.890.000,00 dan reklasifikasi aset tetap jalan,irigasi dan jaringan menjadi barang jasa sebesar Rp5.746.382,19
- d. Beban Barang dan Jasa BLUD-LO sebesar Rp1.042.195.058,40 adalah hutang TA. 2019 pada SKPD Rumah Sakit Umum daerah selaku pengelola dana BLUD.
- e. Beban Jasa Kesehatan dan Non Kesehatan sebesar Rp55.377.311,00 merupakan selisih Kapitalisasi KIB C dari belanja bahan baku dan upah dari dana JKN sebesar Rp10.761.400,00 dan non kapitalisasi belanja modal jerajak dari dana JKN menjadi beban pemeliharaan gedung sebesar Rp18.062.000,00 pada FKTP Puskesmas Mogang, dan adanya Utang Jaspel 2019 yang belum dibayarkan di tahun 2019 yaitu Puskes Harian Rp.17.032.124, Puskes Limbong Rp.19.403.140, Puskes Ambarita Rp.4.208.382, Puskes Mogang Rp. 4.030.732, Puskes Ronggurnihuta Rp.9.758.490, Puskes Sirait Rp. 1.460.851 yang bersumber dari dana JKN di beberapa Puskesmas.
- f. Selisih Kurang Belanja LRA dengan beban-LO diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - 1) Belanja Premi asuransi Barang milik Daerah -LRA sebesar Rp28.937.422,00 merupakan beban sewa dibayar dimuka atas Premi asuransi Penumpang Kapal Wisata Kabupaten Samosir sebesar Rp600.000,00 pada SKPD Dinas Pariwisata



- dan beban Premi Asuransi Dibayar dimuka kendaraan dinas Pimpinan dan kendaraan operasional sebesar Rp28.337.422,00 pada SKPD Sekretariat Daerah
- 2) Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas-LRA sebesar Rp26.333.789,00 yaitu beban sewa Mess Pemkab Samosir pada SKPD Sekretariat Daerah.
  - 3) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat –LRA sebesar Rp5.481.735,00 merupakan beban sewa gedung/Kantor/Tempat-LO TA. 2018 sebesar Rp4.166.666,67 pada SKPD BPBD dan pada SKPD DISBUDPORA sebesar Rp1.276.279,07
  - 4) Belanja Jasa Konsultansi Penelitian-LRA sebesar Rp227.884.500,00 merupakan reklasifikasi Belanja Jasa ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.000.000,00 pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pembayaran Utang Tahun sebelumnya sebesar Rp197.884.500,0 pada Dinas Perhubungan
  - 5) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan –LRA sebesar Rp1.888.898.884,51 merupakan Reklasifikasi belanja jasa konsultasi perencanaan LRA menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jalan sebesar Rp1.125.097.600,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, reklasifikasi dari belanja jasa konsultasi perencanaan-LRA barang dan jasa Aset tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp174.599.784,51 pada Dinas Pariwisata dan reklasifikasi belanja barang dan jasa menjadi Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp320.314.500,00 dan reklasifikasi belanja barang dan jasa menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp216.997.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Reklasifikasi belanja Jasa Konsultasi Perencanaan pembangunan Pasar Tradisional Pangururan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 51.890.000,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
  - 6) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan – LRA sebesar Rp1.994.234.700,00 merupakan reklasifikasi belanja jasa konsultasi pengawasan menjadi aset tetap jaringan, irigasi dan jalan sebesar Rp1.596.809.700,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, reklasifikasi belanja Jasa Konsultasi Pengawasan menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp89.864.349,24 dan reklasifikasi belanja jasa konsultasi pengawasan menjadi aset tetap jalan jaringan irigasi sebesar Rp6.935.650,76 pada Dinas Pariwisata dan reklasifikasi belanja jasa konsultasi pengawasan-LRA menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp300.625.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - 7) Selisih belanja operasional sekolah-LRA dan beban Belanja operasional sekolah-LO sebesar Rp11.892.611.398,00 merupakan reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa menjadi Belanja Modal BOS 2019 (LRA) sebesar Rp2.037.004.834,00, reklasifikasi Belanja Barang dan jasa menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp4.592.000,00, reklasifikasi dari Beban Barang jasa menjadi Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp10.060.000,00, reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp3.660.010.930,00, reklasifikasi Beban Barang Jasa BOS menjadi Beban Persediaan Rp5.551.232.086,00, reklasifikasi Beban Barang Jasa BOS menjadi Beban Pemeliharaan sebesar Rp307.113.448,00, reklasifikasi Hutang 2018 menjadi Beban Jasa BOS sebesar Rp291.198.100,00, reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin dari Beban Jasa BOS sebesar Rp.31.400.000,00

- 8) Selisih belanja BLUD-LRA dan beban BLUD-LO sebesar Rp11.118.884.746,00 yaitu adanya reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Aset Tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp120.900.000,00, pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp2.079.851.334,00, reklasifikasi Beban Barang Jasa BLUD ke Beban Bahan pakai habis sebesar Rp8.173.197.252,00, reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp744.936.160,00.

### V.3.2.4 Beban Pemeliharaan – LO

Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
<b>9.777.194.339,70</b>	<b>9.781.783.352,90</b>

Beban pemeliharaan pada TA 2019 adalah sebesar Rp9.777.194.339,70 jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp9.781.783.352,90 mengalami penurunan sebesar Rp4,589.013,20 atau 0,05%. Beban Pemeliharaan-LO adalah sebesar Rp9.781.783.352,90 sedangkan belanja pemeliharaan-LRA adalah sebesar Rp10.186.977.491,00 terdapat selisih sebesar Rp409,783,151.30 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.19 Rincian Beban Pemeliharaan-LO TA 2019**

NO	Uraian	Belanja Pemeliharaan-LRA (Rp)	Mutasi		Beban Pemeliharaan-LO (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Belanja Jasa Service	2.276.890.134,00	0,00	0,00	2.276.890.134,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	542.407.041,00	0,00	0,00	542.407.041,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.626.162.144,00	0,00	0,00	1.626.162.144,00
4	Belanja Jasa KIR	9.999.000,00	0,00	0,00	9.999.000,00
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	93.898.929,00	0,00	0,00	93.898.929,00
6	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.157.600,00	0,00	0,00	7.157.600,00
7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	34.853.298,00	0,00	0,00	34.853.298,00
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	973.839.269,00	776.891.680,05	0,00	1.750.730.949,05
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.050.708.122,00	599.602.622,65	0,00	1.650.310.744,65
10	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.375.043.454,00	0,00	1.786.277.454,00	588.766.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.074.266.900,00	0,00	0,00	1.074.266.900,00
12	Dst	121.751.600,00	0,00	0,00	121.751.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.186.977.491,00</b>	<b>1.376.494.302,70</b>	<b>1.786.277.454,00</b>	<b>9.777.194.339,70</b>

Selisih Belanja LRA dengan beban-LO diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Selisih Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-LRA dan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-LO sebesar Rp776.891.680,05 berupa mutasi tambah KIB B belanja pemeliharaan tahun 2019 Rp2.017.000,00 pada Puskesmas Simarmata, mutasi tambah penggunaan saldo awal TA. 2019 suku cadang alat-alat berat Rp161.380.072,05 dan mutasi kurang Persediaan Akhir TA. 2019 Suku Cadang Alat-

alat Berat Rp17.500.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mutasi tambah koreksi kurang KIB B menjadi Beban Pemeliharaan BOS Rp93.670.000,00 Dinas Pendidikan, mutasi tambah reklas beban barang dan jasa BLUD ke Beban Pemeliharaan Rp230.211.160,00 dari RSUD dr. Hadrianus Sinaga, mutasi Reklas Beban Barang Jasa BOS menjadi Beban Pemeliharaan Rp307.113.448,00 Dinas Pendidikan.

- b. Selisih Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-LRA dan beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-LO sebesar Rp599.602.622,65 yaitu Reklas Belanja Pemeliharaan Menjadi KIB C Rp209.661.622.65 pada Dinas Pendidikan, Reklas Ke beban Barang jasa Pemeliharaan Rp149.660.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Reklas Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Pemeliharaan Rp240.281.000,00 pada RSUD dr. Hadrianus Sinaga.
- c. Selisih Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan-LRA dan Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan-LO sebesar Rp1.786.277.454,00 yaitu Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan Jalan) ke Aset Tetap Jalan Rp1.194.028.454,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Rekondisi Jalan, Bangunan pelengkap dan utilitas Jalan) ke Aset Tetap Jalan Rp866.693.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Reklas Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Pemeliharaan Rp274.444.000,00.

### V.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas- LO

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>46.136.291.551,00</b>	<b>45.713.521.384,00</b>

Pada TA 2019 dan 2018 jumlah beban perjalanan dinas masing-masing sebesar Rp46.136.291.551,00 dan Rp45.713.521.384,00. Jumlah beban perjalanan dinas-LO tahun 2019 lebih besar dari pada jumlah beban TA 2018 sebesar Rp422.770.167,00 atau 0,92%. Beban perjalanan dinas-LO TA 2019 sebesar Rp46.136.291.551,00 adalah sama dengan belanja perjalanan dinas-LRA, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.3.20 Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2019**

No	Uraian	Belanja-LRA 2019 (Rp)	Beban-LO 2019 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.681.131.947,00	15.681.131.947,00	0,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.455.159.604,00	30.455.159.604,00	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>46.136.291.551</b>	<b>46.136.291.551</b>	<b>0,00</b>

**V.3.2.6 Beban Hibah- LO**

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>5.661.804.000,00</b>	<b>13.443.067.469,14</b>

Pada TA 2019 dan 2018 jumlah beban hibah masing-masing sebesar Rp5.661.804.000,00 dan Rp13.443.067.469,14. Jumlah beban hibah tahun 2019 lebih kecil dari pada jumlah beban TA 2018 sebesar Rp7.781.263.469,14 atau 57,88%. Jumlah Beban hibah –LO TA 2019 sama dengan reliasasi belanja hibah-LRA TA 2019 sebesar Rp Rp5.661.804.000,00. Rincian beban hibah adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3.21 Rincian Beban Hibah-LO TA 2019**

No	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase (%)
1	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan-LO	3.293.349.000,00	11.574.151.719,14	(8.280.802.719,14)	(71,55)
2	Belanja Hibah Kepada Badan Narkotika Kabupaten –LO	150.000.000,00	141.515.750,00	8.484.250,00	6,00
3	Beban Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta-LO	1.770.600.000,00	1.727.400.000,00	43.200.000,00	2,50
4	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	104.100.000,00	0,00	104.100.000,00	0,00
5	Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	327.963.000,00	0,00	327.963.000,00	0,00
6	Beban Hibah kepada Badan Pusat Statistik	15.792.000,00	0,00	15.792.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.661.804.000,00</b>	<b>13.443.067.469,14</b>	<b>(7.781.263.469,14)</b>	<b>(57,88)</b>

**V.3.2.7 Beban Bantuan Sosial- LO**

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>3.179.225.000,00</b>	<b>1.288.350.000,00</b>

Pada TA 2019 dan 2018 jumlah beban bantuan sosial-LO masing-masing sebesar Rp3.179.225.000,00 dan Rp1.288.350.000,00. Jumlah beban bantuan sosial TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.890.875.000,00 atau 146,77%. Jumlah beban bantuan sosial-LO sama dengan realisasi belanja bantuan sosial-LRA TA 2019 sebesar Rp3.179.225.000,00.

**V.3.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO**

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>131.999.659.995,76</b>	<b>125.137.507.392,11</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp131.999.659.995,76 dan Rp125.137.507.392,11 atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.862.152.603,66 atau 5,48%. Beban Penyusutan dan Amortisasi dilakukan terhadap

aset tetap, aset lainnya (aset rusak berat) dan aset tidak berwujud dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.3.22 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO TA 2019 dan 2018**

NO	Rincian	Beban 2019 (Rp)	Beban 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	130.831.521.468,39	123.771.154.099,86	7.060.367.368,53	5,70
2	Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.067.060.827,38	1.190.752.792,25	(123.691.964,87)	(10,39)
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	101.077.700,00	175.600.500,00	(74.522.800,00)	(42,44)
<b>Jumlah</b>		<b>131.999.659.995,77</b>	<b>125.137.507.392,11</b>	<b>6.862.152.603,66</b>	<b>5,48</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp130.831.521.468,39 dengan rincian:

**Tabel V.3.23 Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap-LO TA 2019 dan 2018**

NO	Aset	Beban 2019 (Rp)	Beban 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.393.393.628,20	20.402.577.587,04	1.990.816.041,16	9,76
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.828.976.784,23	15.751.753.438,95	77.223.345,28	0,49
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.422.112.057,16	87.294.531.676,87	5.127.580.380,29	5,87
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	187.038.998,80	322.291.397,00	(135.252.398,20)	(41,97)
<b>Jumlah</b>		<b>130.831.521.468,39</b>	<b>123.771.154.099,86</b>	<b>7.060.367.368,53</b>	<b>5,70</b>

2. Beban penyusutan aset lainnya (aset rusak berat dan hilang) sebesar Rp1.067.060.827,38
3. Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp101.077.700,00 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.3.24 Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud-LOTA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Akumulasi Amortisasi 2018 (Rp)	Beban Amortisasi 2019 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2019 (Rp)
1	Lisensi dan Frenchise	24.600.000,00	0,00	0,00
	(Dinas Lingkungan Hidup)			
2	Goodwill	0,00	0,00	0,00
	(Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan)			
3	Hak Cipta	5.881.100,00	35.682.700,00	35.682.700,00
	(Dinas Pendidikan)			
4	Aset Tidak Berwujud Lainnya	319.205.000,00	0,00	0,00
	(Dinas Pendidikan)			
5	Aset Tidak Berwujud Lainnya	363.486.200,00	0,00	0,00
	(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)			
6	Aset Tidak Berwujud Lainnya	161.295.000,00	,00	0,00

No	Uraian	Akumulasi Amortisasi 2018	Beban Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi 2019
	(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu)			
7	Aset Tidak Berwujud Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	19.500.000,00	0,00	0,00
8	Aset Tidak Berwujud Lainnya )Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	65.395.000,00	65.395.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>893.967.300,00</b>	<b>101.077.700,00</b>	<b>101.077.700,00</b>

**V.3.2.9 Beban Penyisihan Piutang – LO**

Saldo 2019

Saldo 2018

(Rp)

(Rp)

**486.072.706,55****590.196.661,02**

Beban penyisihan piutang pada TA 2019 sebesar Rp486.072.706,55 dibandingkan TA.2018 sebesar Rp590.196.661,02, mengalami penurunan sebesar Rp104.123.954,47 atau 17,57%. Penurunan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.3.25 Rincian Beban Penyisihan Piutang-LOTA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Saldo 2019(Rp)	Saldo 2018(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	Persentase(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	254.774.633,27	570.268.747,72	(315.494.114,45)	(55,32)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	28.114.278,50	1.874.442,15	26.239.836,35	1399,87
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.766.985,68	12.126.871,09	3.640.114,59	30,02
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	31.998.363,37	0,00	31.998.363,37	100,00
4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	155.418.445,73	5.926.600,06	149.491.845,67	2522,39
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>		<b>486.072.706,55</b>	<b>590.196.661,02</b>	<b>(104.123.954,47)</b>	<b>(17,64)</b>

Beban penyisihan piutang dikelompokkan berdasarkan umur piutang, sedangkan mekanisme aturan penyisihan piutangnya diatur dalam ketentuan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Samosir. Penyisihan ini merupakan data taksiran kemungkinan piutang yang masih dapat ditagih. Beban penyisihan piutang merupakan selisih antara penyisihan piutang tak tertagih tahun 2019 dengan tahun 2018.

**V.3.2.10 Beban Lain-lain**

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>10.018.791.318,00</b>	<b>8.214.340.132,01</b>

Beban lain-lain TA 2019 sebesar Rp10.018.791.318,00 jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp8.214.340.132,01 mengalami kenaikan sebesar Rp1.804.451.185,99 atau 21,97%. Beban lain-lain merupakan pengadaan barang TA 2019 yang tidak memenuhi batasan minimum untuk dikapitalisasi ke dalam aset tetap tapi hanya dicatat sebagai ekstrakomtabel. Rincian beban lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.3.26 Rincian Beban Lain-lain-LO TA 2019**

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	9.609.848.676,96
2	Dinas Kesehatan	297.965.874,50
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.000.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	14.984.765,00
5	Sekretariat Daerah	72.170.000,00
6	Kecamatan Pangururan	8.000.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.822.001,54
	Total	<b>10.018.791.318,00</b>

**V.3.2.11 Beban Transfer -LO**

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>159.719.329.538,00</b>	<b>139.756.664.418,00</b>

Beban Transfer sebesar Rp159.719.329.538,00 jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp139.756.664.418,00, mengalami kenaikan sebesar Rp19.962.665.120,00 atau 14,28%. Beban transfer bagi hasil pajak daerah-LO sama dengan realisasi belanja transfer bagi hasil pajak daerah-LRA sebesar Rp159.719.329.538,00, dengann rincian sebagai berikut:

**V.3.2.11.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah-LO**

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>2.128.407.540,00</b>	<b>1.257.915.000,00</b>

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2019 sebesar Rp2.128.407.540,00 jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp1.257.915.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp.870.492.540,00 atau 51,20%. Beban transfer bagi hasil pajak daerah-LO sama dengan realisasi belanja transfer bagi hasil pajak daerah-LRA sebesar Rp2.128.407.540,00.

**V.3.2.11.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO**

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya TA 2019 sebesar Rp0,00 dan TA 2018 sebesar Rp0,00.

**V.3.2.11.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa-LO**

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>157.076.775.700,00</b>	<b>137.953.008.600,00</b>

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa TA 2019 sebesar Rp157.076.775.700,00 jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp137.953.008.600,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp19.123.767.100,00 atau 13,86%. Beban transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa-LO sama dengan realisasi belanja transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa-LRA sebesar Rp157.076.775.700,00.

**V.3.2.11.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LO**

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>514.146.298,00</b>	<b>545.740.818,00</b>

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2019 sebesar Rp514.146.298,00 jika dibandingkan dengan TA 2018 Rp545.740.818,00 mengalami penurunan sebesar Rp.31.594.520,00 atau sebesar 5,79% . Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LO sama dengan realisasi belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LRA sebesar Rp514.146.298,00.

**VI.3.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL-LO**

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>42.366.387.303,65</b>	<b>85.831.674.133,35</b>

Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional-LO TA 2019 adalah sebesar Rp42.366.387.303,65 dan TA 2018 sebesar 85.831.674.133,35. Jika dibandingkan dengan TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp43.465.286.829,70 atau 50,64%.



**V.3.4 KEGIATAN NON OPERASIONAL-LO**

Rincian Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Samosir pada Tahun 2019 terdiri dari:

**Tabel V.3.27 Rincian Kegiatan Non Operasional-LO TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Persentase (%)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	627.966.798,00	451.319.000,00	176.647.798,00	39,14
2	Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.465.841.822,86	119.306.232,50	1.346.535.590,36	1.128,64
3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar-Lo	208.338.781,00	0,00	208.338.781,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.885.469.839,86</b>	<b>570.625.232,50</b>	<b>1.314.844.607,36</b>	<b>230,42</b>

**V.3.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO**

Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
<b>627.966.798,00</b>	<b>451.319.000,00</b>

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO TA 2019 Rp627.966.798,00 dan jika dibandingkan dengan TA 2018 Rp451.319.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp176.647.798,00 atau 39,14 %. Surplus diperoleh dari penjualan lelang Lelang Kendaraan Dinas sebesar Rp627.966.798,00. Rincian Penjualan Aset Non Lancar-LO dari lelang kendaraan dinas dapat dilihat pada **Lampiran IV**.

**V.3.4.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**

Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
<b>1.465.841.822,86</b>	<b>119.306.232,50</b>

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya-LO TA 2019 sebesar Rp1.465.841.822,86 dan jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp119.306.231,98 mengalami kenaikan sebesar Rp1.346.535.590,36 atau 1.128,64%. Surplus dari Kegiatan non operasional lainnya-LO diperoleh dari hasil perhitungan analisis umur piutang atas piutang yang telah disisihkan tidak dapat ditagih tetapi terdapat pelunasan selama tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel V.3.28 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>1.538.641.548,62</b>
	Piutang Pajak Restoran	87.459.500,00
	Piutang Pajak Hotel	90.358.025,00
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	1.348.425.347,62
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.398.676,00
2	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>104.000,00</b>
	Piutang Retribusi Kepelabuhan 2018	<b>104.000,00</b>
3	<b>RSUD dr.Hadrianus Sinaga</b>	<b>11.434.371,09</b>
	Piutang Retribusi Kesehatan	11.434.371,09
4	<b>BPKAD</b>	<b>-84.338.096,85</b>
	Piutang TGR	-481.403.897,55
	Piutang Dana Bergulir	2.000.000,00
	Piutang Dana Bagi Hasil	395.065.800,70
	<b>TOTAL</b>	<b>1.465.841.822,86</b>

#### V.3.4.3 Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>208.338.781,00</b>	<b>0,00</b>

Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO TA 2019 sebesar Rp208.338.781,00 jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp208.338.781,00. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO diperoleh dari penjualan bongkaran gedung dan bangunan dimana nilai harga jual lebih rendah dari nilai buku gedung dan bangunan tersebut.

#### V.3.5 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL-LO

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>1.885.469.839,86</b>	<b>570.625.232,50</b>

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional TA 2019 adalah sebesar

Rp1.885.469.839,86 jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp570.625.232,50 mengalami kenaikan sebesar Rp1.314.844.607,36 atau 230,42%

### V.3.6 POS LUAR BIASA- LO

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>972.101.000,00</b>	<b>395.400.000,00</b>

Pos luar biasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing – masing sebesar Rp972.101.000,00 dan Rp395.400.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp576.701.000,00 atau 145,85%. Pos ini berasal dari Belanja Tak terduga pada LRA.

### V.3.7 SURPLUS/DEFISIT-LO

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>43.279.756.143,51</b>	<b>86.006.899.365,85</b>

Laporan Operasional TA 2019 mengalami surplus sebesar Rp43.279.756.143,51 yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp86.006.899.365,85, surplus TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp42.727.143.222,34 atau 49,68%.

**V.4 NERACA**

Neraca Kabupaten Samosir Tahun 2019 merupakan gabungan dari Neraca SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebanyak 40 SKPD ditambah 1 SKPKD (selaku PPKD). Penjelasan masing-masing pos Neraca sebagai berikut:

**V.4.1 ASET**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**1.605.087.091.045,22****1.568.385.044.362,13**

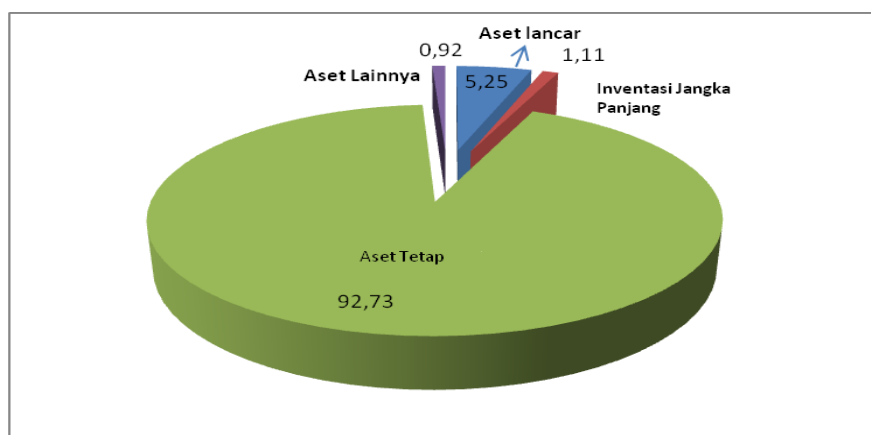
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Samosir per 31 Desember 2019 dan 2018, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.1 Rincian Aset TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase (%)
				(Rp)	
1	Aset Lancar	84.201.828.919,16	85.763.099.197,63	(1.561.270.278,47)	(1,82)
2	Investasi Jangka Panjang	17.804.257.411,98	13.804.257.411,98	4.000.000.000,00	28,98
3	Aset Tetap	1.488.392.808.693,56	1.451.661.186.462,38	36.731.622.231,18	2,53
4	Aset Lainnya	14.688.196.020,52	17.156.501.290,14	(2.468.305.269,62)	(14,39)
<b>Jumlah</b>		<b>1.605.087.091.045,22</b>	<b>1.568.385.044.362,13</b>	<b>36.702.046.683,09</b>	<b>2,34</b>

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Samosir sebesar Rp36.702.046.683,09 atau 2,34%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Samosir sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 92,73% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kabupaten Samosir:

**Grafik V.4.1 Komposisi aset TA 2019**



**V.4.1.1 ASET LANCAR**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**84.201.828.919,16**

**85.763.099.197,63**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Samosir pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

**Tabel V.4.2 Rincian Aset Lancar TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Per 31 Desember 2019		Per 31 Desember 2018		Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Persentase (%)
		Nilai (Rp)	Sub Total (Rp)	Nilai (Rp)	Sub Total (Rp)		
1	Kas dan Setara Kas		50.538.695.097,88		24.865.573.200,75	25.673.121.897,13	103,25
	a. Kas di Kas Daerah	36.180.150.139,88		18.691.080.590,79		17.489.069.549,09	93,57
	b. Kas di Bendahara Penerimaan	205.350.000,00		41.954.000,00		163.396.000,00	389,46
	c. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00		63.952,00		-63.952,00	(100,00)
	d. Kas di BLUD	5.244.810.678,00		4.365.562.861,00		879.247.817,00	20,14
	e. Kas di Bendahara BOS	8.904.792.822,00		1.620.457.046,96		7.284.335.775,04	449,52
	f. Kas Lainnya (Bendahara BOS)	3.591.458,00		146.454.750,00		(142.863.292,00)	(97,55)
2	Piutang		12.406.021.065,16		18.346.233.211,91	(5.940.212.146,75)	(32,38)
	a. Piutang Pajak	1.806.089.900,00		2.934.778.583,00		(1.128.688.683,00)	(38,46)
	b. Piutang Retribusi	470.880.046,00		814.095.592,00		(343.215.546,00)	(42,16)

No	Uraian	Per 31 Desember 2019		Per 31 Desember 2018		Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Persentase (%)
		Nilai (Rp)	Sub Total (Rp)	Nilai (Rp)	Sub Total (Rp)		
	c. Piutang Dana Bagi Hasil	6.399.672.673,00		13.848.027.977,00		(7.448.355.304,00)	(53,79)
	d. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	3.153.397.135,00		2.425.374.218,00		728.022.917,00	30,02
	e. Piutang Lainnya	8.489.059.662,10		7.698.900.706,71		790.158.955,39	10,26
	f. Penyisihan Piutang	(7.913.078.350,94)		(9.374.943.864,80)		1.461.865.513,86	(15,59)
3	Beban dibayar dimuka		60.752.946,00		156.605.736,44	(95.852.790,44)	(61,21)
4	Persediaan		21.196.359.810,12		42.394.687.048,53	(21.198.327.238,41)	(50,00)
	<b>Jumlah</b>		<b>84.201.828.919,16</b>		<b>85.763.099.197,63</b>	<b>(1.561.270.278,47)</b>	<b>(1,82)</b>

#### V.4.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**36.180.150.139,88**

**18.691.080.590,79**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.180.150.139,88 mengalami kenaikan sebesar Rp17.489.069.549,09 atau 93,57% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp18.691.080.590,79. Saldo tersebut terdiri dari: (1) Kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD); dan (2) Kas yang dikelola oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Rinciannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Kas di BUD

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**34.809.963.814,88**

**17.547.444.833,79**

Kas di BUD per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp34.809.963.814,88. Saldo tersebut adalah merupakan saldo setelah rekonsiliasi atas rekening kas umum daerah (RKUD) nomor rekening 241.01.02.000001-0 pada Bank Sumut. Perhitungan saldo Kas di BUD (setelah rekonsiliasi) adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.3 Perhitungan Saldo Kas di BUD TA 2019**

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo RKUD (rekening koran) per 31 Desember 2019	34.774.213.814,88
Ditambah:	
Pendebetan dua kali SP2D Nomor 4988/SP2D-LS/3.03.01/2019 per 16 Desember 2019	35.750.000,00
Saldo Setelah Rekonsiliasi	<b>34.809.963.814,88</b>

Saldo rekonsiliasi diatas termasuk Potongan pajak Pusat atas pendebetan dua kali SP2D Nomor 4988/SP2D-LS/3.03.01/2019 per 16 Desember 2019 yang berada di rekening penampungan Bank Sumut Nomor 241.002.240.70104336-0 sebesar Rp145.563,00 dan telah disetorkan ke Rekening Kas Daerah pada Tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan saldo Kas di BUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.547.444.833,79 mengalami penurunan sebesar Rp7.445.073.790,00 atau 30%.

## 2. Kas di JKN FKTP

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>1.370.186.325,00</b>	<b>1.143.635.757,00</b>

Saldo Kas di JKN FKTP per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.370.186.325,00 merupakan sisa dana kapitasi dari BPJS yang TA 2019 tidak direalisasikan, dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.4 Rincian Kas di JKN FKTP TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Nomor Rekening	Saldo JKN FKTP 2019 (Rp)	Saldo JKN FKTP 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Persentase (%)
1	FKTP Puskesmas Sirait	24.101.020.001.465	42.140.324,00	49.014.094,00	(6.873.770,00)	(14,02)
2	FKTP Puskesmas Mogang	24.101.020.001.477	255.570.188,00	194.061.673,00	61.508.515,00	31,70
3	FKTP Puskesmas Ronggur Nihuta	24.101.020.001.489	104.861.812,00	7.289.560,00	97.572.252,00	1.338,52
4	FKTP Puskesmas Ambarita	24.101.020.001.491	43.054.611,00	23.903.481,00	19.151.130,00	80,12
5	FKTP Puskesmas Tuktuk Siadong	24.101.020.001.507	55.602.525,00	51.941.631,00	3.660.894,00	7,05
6	FKTP Puskesmas Silitio	24.101.020.001.519	34.398.927,00	46.458.945,00	(12.060.018,00)	(25,96)
7	FKTP Puskesmas Harian	24.101.020.001.521	85.017.492,00	102.475.774,00	(17.458.282,00)	(17,04)
8	FKTP Puskesmas Onan Runggu	24.101.020.001.532	21.554.627,00	29.444.708,00	(7.890.081,00)	(26,80)
9	FKTP Puskesmas Simarmata	24.101.020.001.544	2.901.694,00	1.438.969,00	1.462.725,00	101,65
10	FKTP Puskesmas Buhit	24.101.020.001.556	619.125.526,00	585.074.646,00	34.050.880,00	5,82
11	FKTP Puskesmas Limbong	24.101.020.001.568	101.385.526,00	41.579.693,00	59.805.833,00	143,83
12	FKTP Puskesmas Lontung	24.101.020.001.571	4.573.073,00	10.952.583,00	(6.379.510,00)	(58,25)
	<b>Jumlah</b>		<b>1.370.186.325,00</b>	<b>1.143.635.757,00</b>	<b>226.550.568,00</b>	<b>19,81</b>

### V.4.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>205.350.000,00</b>	<b>41.954.000,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp205.350.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp41.954.000,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp163.36.000,00 atau 389,46%.

Tabel V.4.5 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2019

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	<b>DINAS PARIWISATA</b>	
	<i>Tempat Rekreasi</i>	
	Aek Rangat	16.605.000,00
	Batu Hobon	7.160.000,00
	Air Terjun Naisogop	280.000,00
	Dermaga Jetty	305.000,00
	Kawasan Sigulatti	1.410.000,00
	Aek Natonang	1.620.000,00
	Air Terjun Efrata ( 31 des)	2.170.000,00
	Menara Pandang Tele	8.368.000,00
	Hutan Pinus Tele	971.000,00
	Batu Sawan	812.000,00
	Aek Sipitu Dai	8.450.000,00
	Pasir Putih Parbaba	3.805.000,00
	Pantai Indah Situngkir	1.245.000,00
	Batu kursi parsidangan Siallagan	375.000,00
	Kawasan Tomok	5.416.000,00
	Jumlah	58.992.000,00
	<i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	
	Bus Wisata	1.450.000,00
	Kapal Wisata	17.000.000,00
	Jumlah	18.450.000,00
	Total	77.442.000,00
2	<b>BADAN PENDAPATAN</b>	
	Pajak Restoran	1.285.000,00
	Retribusi Pasar	12.456.000,00
	Total	13.741.000,00
3	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Retribusi Mess Pemkab Samosir	2.165.000,00
	Total	2.165.000,00
4	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	106.760.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi (Wetland Biocord)	4.000.000,00
	Total	110.760.000,00
5	<b>Dinas Pertanian</b>	
	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum di potong	1.242.000,00
	Total	1.242.000,00
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>205.350.000,00</b>

## V.4.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**Rp0,00****Rp63.952,00**

Kas di bendahara pengeluaran TA 2019 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp63.952 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp63.952,00.

## V.4.1.1.4 Kas di BLUD

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**5.244.810.678,00****4.365.562.861,00**

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dengan nomor Rekening Bank Sumut 241.01.02.000163-5 dalam pelaksanaan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saldo kas per 31 Desember 2019



adalah sebesar Rp5.244.810.678,00 dan tahun 2018 adalah sebesar Rp4.365.562.861,00 mengalami kenaikan sebesar Rp879.247.817,00 atau 20,14%.

#### V.4.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**8.904.792.822,00****1.620.457.046,96**

Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.904.792.822,00 dan tahun 2018 sebesar Rp1.620.457.046,96 mengalami kenaikan sebesar Rp7.284.335.775,04 atau 449,52%. Rincian Kas Pada Bendahara BOS SD/SMP se-Kabupaten Samosir dapat dilihat pada **Lampiran XIV**. Rincian Kas pada Bendahara BOS untuk tahun 2019 pada SD/SMP Negeri dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel V.4.6 Rincian Kas pada Bendahara BOS TA 2019**

Uraian		Jumlah (Rp)	Keterangan
Saldo Awal	<b>Saldo Awal 2019:</b>		
	Saldo awal Kas di Rekening Bank	1.255.550.485,00	Lampiran VI
	Saldo awal Kas Tunai	364.906.561,96	Lampran VI
	<b>Saldo Awal 2019</b>	<b>1.620.457.046,96</b>	Lampran VI
Penerimaan	Pendapatan BOS	29.464.000.000,00	Lampran VI
	Lain-lain Pendapatan	20.026.123,00	Lampran VI
	- Bunga Bank	31.793,00	Lampran VI
	- Pengembalian Belanja 2018	19.994.330,00	Lampran VI
	Penerimaan Pajak 2019	579.779.367,34	Lampran VI
	<b>Total Pendapatan BOS 2019</b>	<b>31.684.262.537,30</b>	
Pengeluaran	Belanja Pegawai	2.785.941.826,00	Lampiran VIII
	Belanja Barang Jasa	13.505.968.570,00	Lampiran VIII
	Belanja Modal	5.623.728.764,00	Lampiran VIII
	Pajak 2018 yang disetor 2019	281.982.384,96	Lampiran VIII
	Bunga rek. 2018 yang disetor ke RKUD	2.068.803,00	Lampiran VIII
	Penyetoran Pajak 2019	576.187.909,34	Lampiran VIII
	<b>Total Pengeluaran 2019</b>	<b>22.775.878.257,30</b>	
Saldo Akhir	Saldo Akhir 2019		
	terdiri dari:		
	Saldo rekening Koran	8.782.150.823,00	Lampiran XIV
	Kas Tunai	122.641.999,00	Lampiran XIV
	<b>Saldo Akhir 2019</b>	<b>8.904.792.822,00</b>	

#### V.4.1.1.6 Kas Lainnya

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**3.591.458,00****146.454.750,00**

Kas lainnya pada TA 2019 sebesar Rp3.591.458,00 merupakan PFK Pusat Dana BOS yang belum disetor per 31 Desember 2019 dan mengalami penurunan sebesar Rp146.454.750,00 jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp146.454.750,00, dengan rincian kas lainnya TA 2019 dapat dilihat pada **Lampiran XIV**.

#### V.4.1.1.7 Setara Kas

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak terdapat saldo Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 2018.

#### V.4.1.1.8 Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>11.830.039.754,00</b>	<b>20.022.276.370,00</b>

Piutang pendapatan TA 2019 sebesar Rp11.830.039.754,00 dan TA 2018 sebesar Rp20.022.276.370,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp8.192.236.616,00 atau 40,92%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.7 Rincian Piutang Pendapatan TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Piutang Pajak Daerah	1.806.089.900,00	2.934.778.583,00	(1.128.688.683,00)	(38,46)
2	Piutang Retribusi Daerah	470.880.046,00	814.095.592,00	(343.215.546,00)	(42,16)
3	Piutang Dana Bagi Hasil	6.399.672.673,00	13.848.027.977,00	(7.448.355.304,00)	(53,79)
4	Piutang Lain-lain PAD yang sah	3.153.397.135,00	2.425.374.218,00	728.022.917,00	30,02
<b>Jumlah</b>		<b>11.830.039.754,00</b>	<b>20.022.276.370,00</b>	<b>(8.192.236.616,00)</b>	<b>(40,92)</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### V.4.1.1.8.1 Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>1.806.089.900,00</b>	<b>2.934.778.583,00</b>

Piutang Pajak Daerah adalah akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Saldo Piutang Pendapatan pajak daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.806.089.900,00 dan Rp2.934.778.583,00, mengalami

penurunan sebesar Rp1.128.688.683,00 atau 38,46% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.8 Rincian Piutang Pajak Daerah TA 2019 dan 2018

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Piutang Pajak Restoran	60.000,00	87.519.500,00	(87.459.500,00)	(99,93)
2	Piutang Pajak Hotel	-	90.358.025,00	(90.358.025,00)	(100,00)
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.806.029.900,00	2.756.901.058,00	(950.871.158,00)	(34,49)
<b>Jumlah</b>		<b>1.806.089.900,00</b>	<b>2.934.778.583,00</b>	<b>(1.128.688.683,00)</b>	<b>(38,46)</b>

Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan penghapusan piutang sebesar Rp1.515.336.859,00. Rincian piutang selama tahun 2019 berdasarkan jenis pajak dan mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel V.4.9 Rincian Piutang Pajak Daerah per Objek TA 2019 dan 2018

No	Jenis pajak	Tahun Penetapan	Saldo 2019	Mutasi 2019		Penghapusan	Piutang 2019
				Penambahan	(Pengurangan) Pelunasan		
1	Pajak Restoran	2006	1.007.000,00	0,00	60.000,00	947.000,00	0,00
		2007	14.280.500,00	0,00	1.256.000,00	12.964.500,00	60.000,00
		2008	16.172.000,00	0,00	1.292.000,00	14.880.000,00	0,00
		2009	51.500.000,00	0,00	2.920.000,00	48.580.000,00	0,00
		2011	4.560.000,00	0,00	240.000,00	4.320.000,00	0,00
	<b>Jumlah Piutang Pajak Restoran</b>		<b>87.519.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768.000,00</b>	<b>81.691.500,00</b>	<b>60.000,00</b>
2	Pajak Hotel	2006	7.332.800,00	0,00	0,00	7.332.800,00	0,00
		2007	8.114.000,00	0,00	480.000,00	7.634.000,00	0,00
		2008	32.206.225,00	0,00	275.000,00	31.931.225,00	0,00
		2009	38.135.000,00	0,00	2.754.000,00	35.381.000,00	0,00
		2010	2.150.000,00	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00
		2013	2.420.000,00	0,00	420.000,00	2.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Piutang Pajak Hotel</b>		<b>90.358.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929.000,00</b>	<b>85.429.025,00</b>	<b>0,00</b>
3	Pajak Bumi dan Bangunan	2013	1.348.216.333,62	0,00	486.572,00	1.348.216.333,62	0,00
		2014	230.666.024,00	0,00	117.045,00	0,00	230.548.979,00
		2015	180.167.117,00	0,00	91.969,00	0,00	180.075.148,00
		2016	117.428.410,38	0,00	220.293,38	0,00	117.208.117,00
		2017	428.357.658,00	0,00	18.782.874,00	0,00	409.574.784,00
		2018	452.065.515,00	0,00	110.313.818,00	0,00	341.751.697,00
		2019	0,00	526.871.175,00		0,00	526.871.175,00
	<b>Jumlah Piutang PBB</b>		<b>2.756.901.058,00</b>	<b>526.871.175,00</b>	<b>130.012.571,00</b>	<b>1.348.216.333,62</b>	<b>1.806.029.900,00</b>
	<b>Total Piutang Pajak</b>		<b>2.934.778.583,00</b>	<b>526.871.175,00</b>	<b>140.709.571,00</b>	<b>1.515.336.858,62</b>	<b>1.806.089.900,00</b>

#### V.4.1.1.8.2 Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2019

(Rp)

**470.880.046,00**

Per 31 Desember 2018

(Rp)

**814.095.592,00**

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp470.880.046,00 dan Rp814.095.592,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp343.215.546,00 atau 42,16%. Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Samosir terdiri dari:

Tabel V.4.10 Rincian Piutang Retribusi Daerah TA 2019

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	281.947.335,00	281.947.335,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	159.963.211,00	172.378.757,00	(12.415.546,00)	(7,20)
3	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.500.000,00	20.800.000,00	(19.300.000,00)	(92,79)
4	Piutang Retribusi Izin Gangguan	27.469.500,00	27.469.500,00	0,00	0,00
5	Retribusi Kesehatan Puskesmas	0,00	311.500.000,00	(311.500.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>470.880.046,00</b>	<b>814.095.592,00</b>	<b>(343.215.546,00)</b>	<b>(42,16)</b>

Daftar rincian mutasi piutang retribusi dari tahun 2004 s.d 2019 berdasarkan jenis retribusi dan mutasi penambahan dan pengurangan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**281.947.335,00****281.947.335,00**

Saldo piutang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp281.947.335,00 dan Rp281.947.335,00 atau tidak mengalami perubahan. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi itu sendiri sudah bukan merupakan objek retribusi Daerah, piutang Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi yang dicatat adalah merupakan saldo tahun-tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.11 Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasiTA 2019 dan 2018

No	Nama Debitur	Saldo Piutang2018 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	Saldo Piutang2019 (Rp)
1	Indosat	30.848.000,00	0,00	30.848.000,00
2	Komet Infra Nusantara	18.636.958,33	0,00	18.636.958,33
3	Daya Mitra Telekomunikasi	34.528.000,00	0,00	34.528.000,00
4	Protelindo	41.280.000,00	0,00	41.280.000,00

No	Nama Debitur	Saldo Piutang 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Saldo Piutang 2019 (Rp)
5	Smartfren	18.963.000,00	0,00	18.963.000,00
6	STP	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
7	Telkomsel	100.605.785,00	0,00	100.605.785,00
8	Telkomsel	6.914.216,67	0,00	6.914.216,67
9	Tower Bersama	13.870.000,00	0,00	13.870.000,00
10	XL Axiata	12.041.375,00	0,00	12.041.375,00
	<b>TOTAL</b>	<b>281.947.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.947.335,00</b>

Daftar rincian mutasi piutang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan mutasi penambahan dan pengurangan tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel V.4.12 Perhitungan Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Telekomunikasi TA 2019**

No	Jenis retribusi	Tahun Penetapan	So 2019 (Rp)	Mutasi 2019		Piutang 2019 (Rp)
				Penambahan (Rp)	(Pengurangan) Pelunasan (Rp)	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika					
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2013	12.328.000,00	0,00	0,00	12.328.000,00
		2015	262.710.650,00	0,00	0,00	262.710.650,00
		2016	6.908.685,00	0,00	0,00	6.908.685,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>		<b>281.947.335,00</b>	0,00	0,00	<b>281.947.335,00</b>

## 2. Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**159.963.211,00**

**172.378.757,00**

Saldo piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp159.963.211,00 dan Rp172.378.757,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp12.415.546 atau 7,20%. Saldo retribusi ini merupakan saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir yang berada di Badan Pendapatan Daerah dan pada 9 (sembilan) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.13 Perhitungan Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2019**

No	Jenis retribusi	Tahun Penetapan	So 2019 (Rp)	Mutasi 2019		Piutang 2019 (Rp)
				Penambahan (Rp)	(Pengurangan) Pelunasan (Rp)	
1	Badan Pendapatan Daerah	2004	2.941.000,00	0,00	0,00	2.941.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2005	2.576.000,00	0,00	0,00	2.576.000,00
		2006	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
		2008	12.435.500,00	0,00	0,00	12.435.500,00
		2010	8.907.937,00	0,00	0,00	8.907.937,00

No	Jenis retribusi	Tahun Penetapan	So 2019 (Rp)	Mutasi 2019		Piutang 2019 (Rp)
				Penambahan (Rp)	(Pengurangan) Pelunasan (Rp)	
		2011	19.704.700,00	0,00	0,00	19.704.700,00
		2012	10.453.240,00	0,00	0,00	10.453.240,00
		2013	15.636.200,00	0,00	0,00	15.636.200,00
		2014	13.814.100,00	0,00	0,00	13.814.100,00
		2015	14.564.620,00	0,00	10.183.676,00	4380944
		2016	19.533.140,00	0,00	80.000,00	19.453.140,00
		2017	8.191.890,00	0,00	2.135.000,00	6.056.890,00
	Dinas Perhubungan	Jun-18	36.890.180,00	0,00	12.097.200,00	24.792.980,00
		Jul-18	5.698.250,00	0,00	2.177.800,00	3.520.450,00
		2019	0,00	14.258.130,00	0,00	14.258.130,00
	<b>Jumlah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>		<b>172.378.757,00</b>	<b>14.258.130,00</b>	<b>26.673.676,00</b>	<b>159.963.211,00</b>

3. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**1.500.000,00**

**20.800.000,00**

Saldo piutang retribusi tempat khusus parkir per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 dan Rp20.800.000,00. Saldo retribusi ini merupakan saldo Piutang Retribusi tempat khusus parkir yang di kontrakkan kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.14 Rincian Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2019**

No	Jenis kerja sama	Nomor kontrak	Jangka waktu	Piutang (Rp)
1	Retribusi parkir tepi jalan umum pasar Ambarita Kec. Simanindo	550/2/DISHUB/II/2019, tanggal 01 Januari 2019	01 Januari s/d 31 Desember 2019	1.500.000,00
	<b>Jumlah</b>			<b>1.500.000,00</b>

Daftar rincian mutasi piutang retribusi tempat khusus parkir dan mutasi penambahan dan pengurangan tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel V.4.15 Perhitungan Rincian Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2019**

No	Jenis retribusi	Tahun Penetapan	So 2019 (Rp)	Mutasi 2019		Piutang 2019 (Rp)
				Penambahan (Rp)	(Pengurangan) Pelunasan (Rp)	
1	Dinas Perhubungan	Nopember 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Parkir dan Sandar Kapal	Des-17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Okt-18	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00
		Nopember 2018	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00
		Des-18	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00

No	Jenis retribusi	Tahun Penetapan	So 2019 (Rp)	Mutasi 2019		Piutang 2019 (Rp)
				Penambahan (Rp)	(Pengurangan) Pelunasan (Rp)	
		Jan-19	0,00	6.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
	<b>Jumlah Retribusi tempat khusus parkir</b>		<b>20.800.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

## 4. Piutang Retribusi Izin Gangguan

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**27.469.500,00****27.469.500,00**

Saldo piutang retribusi Izin Gangguan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp27.469.500,00 dan Rp27.469.500,00. Saldo retribusi ini merupakan saldo Piutang Retribusi izin gangguan sejak tahun 2007 yang belum dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.16 Perhitungan Rincian Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2019**

Jenis retribusi	Tahun Penetapan	So 2019 (Rp)	Mutasi 2019		Piutang 2019 (Rp)
			Penambahan (Rp)	(Pengurangan) Pelunasan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	2007	12.240.500,00	0,00	0,00	12.240.500,00
Retribusi Izin Gangguan	2008	15.229.000,00	0,00	0,00	15.229.000,00
<b>Jumlah Retribusi Izin Gangguan</b>		<b>27.469.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.469.500,00</b>

## 5. Piutang Retribusi Kesehatan Puskesmas

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**0,00****311.500.000,00**

Saldo piutang retribusi Kesehatan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp311.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.17 Perhitungan Rincian Piutang Retribusi Kesehatan Tahun 2019**

No	Jenis retribusi	Tahun Penetapan	So 2019 (Rp)	Mutasi 2019		Piutang 2019 (Rp)
				Penambahan (Rp)	(Pengurangan) Pelunasan (Rp)	
1	Dinas Kesehatan	Des-19		311.500.000,00		311.500.000,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Klaim BPJS	Des-18	311.500.000,00	0,00	311.500.000,00	0,00
	<b>Jumlah Retribusi Kesehatan</b>		<b>311.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

**V.4.1.1.8.3 Piutang Dana Bagi Hasil**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**6.399.672.673,00****13.848.027.977,00**

Saldo piutang bagi hasil pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp6.399.672.673,00 dan Rp13.848.027.977,00. Saldo retribusi ini merupakan saldo Piutang bagi hasil pajak dari Provinsi. Daftar rincian mutasi piutang bagi hasil pajak tahun 2019 dan mutasi penambahan dan pengurangan tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel V.4.18 Piutang Bagi Hasil Pajak TA 2019**

NO	Pendapatan Transfer	Tahun Penetapan	So 2019	Mutasi 2019		Piutang 2019
				Penambahan (Rp)	(Pengurangan) Pelunasan (Rp)	
1	SKPKD	2014	135.355.905,00	0,00	135.355.905,00	0,00
	Bagi Hasil Pajak	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	2.012.068.793,00	0,00	2.012.068.793,00	0,00
		2018	11.700.603.279,00	0,00	11.700.603.279,00	0,00
		2019	0,00	6.399.672.673,00	0,00	6.399.672.673,00
Total			<b>13.848.027.977,00</b>	<b>6.399.672.673,00</b>	<b>13.848.027.977,00</b>	<b>6.399.672.673,00</b>

Saldo piutang tersebut seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah oleh Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

**V.4.1.1.8.4 Piutang Lain –Lain PAD yang Sah**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**3.153.397.135,00****2.425.374.218,00**

Saldo piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.153.397.135,00 dan Rp2.425.374.218,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp728.022.917,00 atau 30,02%. Saldo ini merupakan saldo Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.19 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah BLUD pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga TA. 2019**

No	Uraian/Debitur	Jumlah (Rp)
1	JKN bulan September 2019	1.279.142.900,00
2	JKN bulan Oktober 2019	1.134.901.300,00
3	Pending JKN Juni 2019	86.028.900,00
4	Pending dalam pending JKN Juni 2019	6.843.500,00
5	Pending JKN Juli 2019	78.407.300,00



No	Uraian/Debitur	Jumlah (Rp)
6	Pending JKN Agustus 2019	72.140.400,00
7	Pending JKN September 2019	90.940.800,00
8	Rujukan JKN bulan Juli 2019	52.500.000,00
9	Rujukan JKN bulan Agustus 2019	58.937.500,00
10	Rujukan JKN bulan September 2019	49.000.000,00
11	Rujukan JKN bulan Oktober 2019	64.312.500,00
12	Rujukan JKN bulan Nopember 2019	50.687.500,00
13	PP Seneca Agustus s/d November 2019	4.999.223,00
14	PT Seneca November 2019	399.092,00
15	Piutang BPJS bulan Agustus 2019	26.607.102,00
16	Piutang BPJS bulan September 2019	25.187.072,00
17	Piutang BPJS bulan Oktober 2019	34.505.379,00
18	Piutang BPJS bulan November 2019	5.899.220,00
19	Piutang BPJS bulan Desember 2019	31.957.447,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.153.397.135,00</b>

**V.4.1.1.9 Piutang Lainnya**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**8.489.059.662,10****7.698.900.706,71**

Saldo Piutang Lainnya pada Tahun 2019 terdiri dari Pokok dan Bunga Dana Bergulir, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Piutang Kelebihan Tunjangan Komunikasi-Insentif DPRD, Piutang Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka. Rincian Piutang Lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.20 Rincian Piutang Lainnya TA 2019 dan 2018**

NO	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Persentase (%)
1	Piutang Dana Bergulir	532.876.400,00	534.876.400,00	(2.000.000,00)	(0,37)
2	Piutang Uang Muka	501.786.553,00	476.163.858,00	25.622.695,00	5,38
3	Piutang Jaminan Pelaksanaan	269.377.960,00	269.377.960,00	0,00	0,00
4	Piutang Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif DPRD	1.526.607.000,00	1.526.607.000,00	0,00	0,00
5	Piutangan Perbendaharaan dan TGR	5.658.411.749,10	4.891.875.488,71	766.536.260,39	15,67
	<b>Jumlah</b>	<b>8.489.059.662,10</b>	<b>7.698.900.706,71</b>	<b>790.158.955,39</b>	<b>10,26</b>

Piutang lainnya Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp8.489.059.662,10 dan Rp6.626.935.587,51 atau mengalami penurunan sebesar Rp790.158.955,39 atau sebesar 10,26%, dengan penjelasan sebagai berikut:

**V.4.1.1.9.1 Piutang Dana Bergulir**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**532.876.400,00****534.876.400,00**

Jika dilihat dari Piutang Dana Bergulir tahun 2019 dan 2018 yang bersaldo masing masing sebesar Rp532.876.400,00 dan Rp534.876.400,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.000.000,00 atau 0,37%. Terdapat pelunasan pokok sebesar Rp2.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.21 Perhitungan Piutang Dana Bergulir TA 2019**

No	Uraian	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal 2018	447.602.000,00	87.274.400,00	534.876.400,00
2	Pembayaran 2019	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	Sisa 2019	<b>445.602.000,00</b>	<b>87.274.400,00</b>	<b>532.876.400,00</b>

Rincian piutang dana bergulir dapat dilihat pada Lampiran XV.

Untuk optimalisasi Penagihan piutang dana bergulir telah diserahkan sepenuhnya kepada Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar dengan nomor surat 970/150/BPKAD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**V.4.1.1.9.2 Piutang Uang Muka**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**501.786.553,00****476.163.858,00**

Selama tahun 2019 dan 2018 Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki Piutang uang muka masing-masing sebesar Rp501.786.553,00 dan Rp476.163.858,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp25.622.695,00 atau sebesar 5,38%.

Piutang uang muka merupakan piutang yang timbul akibat pembayaran uang muka atas pekerjaan yang kemudian putus kontrak sedangkan prestasi fisik lebih kecil dari pembayaran uang muka yang telah diberikan kepada rekanan pelaksana, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel V.4.22 Rincian Piutang Uang Muka TA 2019**

No	Nama Pekerjaan	Nama Pihak Ketiga	Nama SKPD	Tahun Pengakuan	Saldo Piutang 2018 (Rp)	Mutasi 2019		Saldo Piutang 2019 (Rp)
						Penambahan 2019	Pengurangan/ Pelunasan 2019	
1	Peningkatan Jalan Pelabuhan Ferry sippinggan Kec. Nainggolan	CV. Eka Jaya	DPUPR	2014	170.125.050,00	0,00	0,00	170.125.050,00
2	Perkerasan Jalan Dusun Silopak-Sampetua desa simbolon Purba Kec. Palipi	CV. Mula Konstruksi	DPUPR	2014	72.771.900,00	0,00	0,00	72.771.900,00

No	Nama Pekerjaan	Nama Pihak Ketiga	Nama SKPD	Tahun Pengakuan	Saldo Piutang 2018 (Rp)	Mutasi 2019		Saldo Piutang 2019 (Rp)
						Penambahan 2019	Pengurangan/Pelunasan 2019	
3	Peningkatan jalan desa Sideak (Gereja HKBP) Sideak Toruan-Sibona Sanggul)	CV. Batu Penjuru	DPUPR	2014	199.471.800,00	0,00	0,00	199.471.800,00
4	Lanjutan Peningkatan Jalan Sp. Boho - Peabang Kecamatan Sianjur mulamura	CV. TUMPAK	DPUPR	2018	33.795.108,00	0,00	33.795.108,00	0,00
5	Pembangunan JALan setapak dan atau jalur Sepeda di kawasan track wisata alam objek wisata aek natonang Kec. Simanindo	CV. BATU SAWAN	DISPAR	2019	0,00	59.417.803,00	0,00	59.417.803,00
<b>Jumlah</b>					<b>476.163.858,00</b>	<b>59.417.803,00</b>	<b>33.795.108,00</b>	<b>501.786.553,00</b>

#### V.4.1.1.9.3 Piutang Jaminan Pelaksanaan

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**269.377.960,00****269.377.960,00**

Piutang jaminan pelaksanaan selama tahun 2019 tetap sebesar Rp269.377.960,00 sama dengan TA 2018 dikarenakan tidak ada pelunasan piutang jaminan pelaksanaan untuk tahun 2019. Rincian Piutang Jaminan Pelaksanaan selama tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran XVI**.

#### V.4.1.1.9.4 Piutang Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif DPRD

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**1.526.607.000,00****1.526.607.000,00**

Piutang Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif DPRD selama tahun 2019 tidak ada pelunasan sehingga saldo TA 2019 tetap sebesar Rp1.526.607.000,00 sama dengan TA 2018 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran XVII**.

#### V.4.1.1.9.5 Piutang Perbendaharaan dan TGR

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**5.658.411.749,10****4.891.875.488,71**

Piutang Perbendaharaan dan TGR selama tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp5.658.411.749,10 dan sebesar Rp4.891.875.488,71 mengalami kenaikan sebesar Rp7.665.36.260,39 atau sebesar 15,67%. Rincian Piutang Perbendaharaan dan TGR per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel V.4.23 Rincian Piutang Perbendaharaan dan TGR TA 2019

NO.	SKPD	Tahun 2018 (Rp)	Temuan 2019 (Rp)	Tindak Lanjut 2019 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	127.325.095,15	0,00	0,00	127.325.095,15
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.452.891.579,56	646.344.093,21	371.601.725,55	3.727.633.947,22
3	Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Pertanahan	14.785.558,00	89.471.165,73	0,00	104.256.723,73
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.750.000,00	0,00	0,00	17.750.000,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	412.500.000,00	0,00	0,00	412.500.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	63.862.450,00	0,00	0,00	63.862.450,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
8	Sekretariat Daerah	280.620.000,00	0,00	0,00	280.620.000,00
9	Sekretariat DPRD	43.000.000,00	403.850.000,00	0,00	446.850.000,00
10	Kantor Camat Simanindo	1.527.273,00	0,00	1.527.273,00	0,00
11	Dinas Pariwisata	58.500.000,00	0,00	0,00	58.500.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	409.113.533,00	0,00	0,00	409.113.533,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.891.875.488,71</b>	<b>1.139.665.258,94</b>	<b>373.128.998,55</b>	<b>5.658.411.749,10</b>

Pengkakuan Piutang TPTGR adalah berdasarkan pada Surat pembebanan yang terbitkan oleh majelis TP-TGR Kabupaten Samosir.

#### V.4.1.1.10 Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**(7.913.078.350,94)**

**(9.374.943.864,80)**

Penyisihan piutang tahun 2019 dan tahun 2018 masing-masing adalah sebesar (Rp7.913.078.350,94) dan (Rp9.374.943.864,80) mengalami penurunan sebesar (Rp1.461.865.513,86) atau 15,59%. Penyisihan Piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang per tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

##### V.4.1.1.10.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**(1.273.947.717,66)**

**(2.889.231.677,25)**

Penyisihan Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Pendapatan Daerah yang terdiri dari piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah,

piutang lain-lain PAD yang sah dan piutang dana bagi hasil. Penyisihan piutang pendapatan TA 2019 sebesar (Rp1.273.947.717,66) mengalami penurunan sebesar (Rp1.615.283.959,59) atau 55,91% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar (Rp2.889.231.677,25). Daftar rincian perhitungan penyisihan piutang pajak daerah dihitung berdasarkan jenis dan umur piutang pajak tahun 2006 s.d 2019 sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2019

**Tabel V.4.24 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2019**

No	Jenis Pajak	Tahun Penetapan	Piutang 2019	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Total Penyisihan 2019
				< 1 Tahun	1-2 Tahun	2-3 Tahun	> 3 Tahun	
				0,005	0,1	0,5	1,00	
1	Pajak Restoran	2006	-	-	-	-	-	-
		2007	60.000,00	-	-	-	60.000,00	60.000,00
		2008	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Piutang Pajak Restoran</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
2	Pajak Hotel	2006	-	-	-	-	-	-
		2007	-	-	-	-	-	-
		2008	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Piutang Pajak Hotel</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3	Pajak Bumi dan Bangunan	2013	-	-	-	-	-	-
		2014	230.548.979,00	-	-	-	230.548.979,00	230.548.979,00
		2015	180.075.148,00	-	-	-	180.075.148,00	180.075.148,00
		2016	117.208.117,00	-	-	-	117.208.117,00	117.208.117,00
		2017	409.574.784,00	-	-	204.787.392,00	-	204.787.392,00
		2018	341.751.697,00	-	34.175.169,70	-	-	34.175.169,70
		2019	526.871.175,00	2.634.356,26	-	-	-	2.634.356,26
<b>Jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan</b>			<b>1.806.029.900,00</b>	<b>2.634.356,26</b>	<b>34.175.169,70</b>	<b>263.391.450,50</b>	<b>527.832.244,00</b>	<b>769.429.161,96</b>
<b>Total</b>			<b>1.806.089.900,00</b>	<b>2.634.356,26</b>	<b>34.175.169,70</b>	<b>263.391.450,50</b>	<b>527.892.244,00</b>	<b>769.489.161,96</b>

2. Penyisihan Piutang Pajak Retribusi Daerah TA 2019

**Tabel V.4.25 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2019**

No	Jenis Retribusi	Tahun Penetapan	Piutang 2019	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total Penyisihan 2019
				< 1 Bulan	1-2 Bulan	2-3 Bulan	> 3 Bulan	
				0,005	0,1	0,5	1,00	
1	Badan Pendapatan Daerah	2004	2.941.000,00	-	-	-	2.941.000,00	2.941.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2005	2.576.000,00	-	-	-	2.576.000,00	2.576.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR LKPD TAHUN 2019 - AUDITED

No	Jenis Retribusi	Tahun Penetapan	Piutang 2019	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total Penyisihan 2019
				< 1 Bulan	1-2 Bulan	2-3 Bulan	> 3 Bulan	
				0,005	0,1	0,5	1,00	
		2006	1.032.000,00	-	-	-	1.032.000,00	1.032.000,00
		2008	12.435.500,00	-	-	-	12.435.500,00	12.435.500,00
		2010	8.907.937,00	-	-	-	8.907.937,00	8.907.937,00
		2011	19.704.700,00	-	-	-	19.704.700,00	19.704.700,00
		2012	10.453.240,00	-	-	-	10.453.240,00	10.453.240,00
		2013	15.636.200,00	-	-	-	15.636.200,00	15.636.200,00
		2014	13.814.100,00	-	-	-	13.814.100,00	13.814.100,00
		2015	4.380.944,00	-	-	-	4.380.944,00	4.380.944,00
		2016	19.453.140,00	-	-	-	19.453.140,00	19.453.140,00
		2017	6.056.890,00	-	-	-	6.056.890,00	6.056.890,00
		Juni 2018	24.792.980,00	-	-	-	24.792.980,00	24.792.980,00
		Juli 2018	3.520.450,00	-	-	-	3.520.450,00	3.520.450,00
		2019	14.258.130,00	71.290,65	-	-	-	71.290,65
	<b>Jumlah</b>		<b>159.963.211,00</b>	<b>71.290,65</b>	-	-	<b>145.705.081,00</b>	<b>145.776.371,65</b>
	Badan Pendapatan Daerah	2007	12.240.500,00	-	-	-	12.240.500,00	12.240.500,00
	Retribusi Izin Gangguan	2008	15.229.000,00	-	-	-	15.229.000,00	15.229.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>27.469.500,00</b>	-	-	-	<b>27.469.500,00</b>	<b>27.469.500,00</b>
2	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>							
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2013	12.328.000,00	-	-	-	12.328.000,00	12.328.000,00
		2015	262.710.650,00	-	-	-	262.710.650,00	262.710.650,00
		2016	6.908.685,00	-	-	-	6.908.685,00	6.908.685,00
		2018	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>281.947.335,00</b>	-	-	-	<b>281.947.335,00</b>	<b>281.947.335,00</b>
3	<b>Dinas Perhubungan</b>	Januari 2019	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	Retribusi Parkir dan Sandar Kapal	Nopember 2018	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>1.500.000,00</b>	-	-	-	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Total</b>		<b>470.880.046,00</b>	<b>71.290,65</b>	-	-	<b>456.621.916,00</b>	<b>456.693.206,65</b>

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD TA 2019

Tabel V.4.26 Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD TA 2019

No	Jenis pajak	Tahun Penetapan	Piutang 2019	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total Penyisihan 2019
				< 1 tahun	1-2 tahun	2-3 tahun	> 3 tahun	
				0,005	0,1	0,5	1	
1	RSU. Dr. Hadrianus Sinaga	Oktober 2019	222.334.515,00	1.111.672,58	-	-	-	1.111.672,58
	Retribusi Kesehatan	Nopember 2019	1.372.285.953,00	6.861.429,77	-	-	-	6.861.429,77
		Desember 2019	1.558.776.667,00	7.793.883,34	-	-	-	7.793.883,34
	<b>Jumlah</b>		<b>3.153.397.135,00</b>	<b>15.766.985,68</b>	-	-	-	<b>15.766.985,69</b>

## 4. Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak TA 2019

Tabel V.4.27 Perhitungan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak TA 2019

No	Pendapatan Transfer	Tahun Penetapan	Piutang 2019	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total Penyisihan 2019
				< 1 tahun	1-2 tahun	2-3 tahun	> 3 tahun	
				0,005	0,1	0,5	1	
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	2019	6.339.672.673,00	31.998.363,37	0,00	0,00	0,00	31.998.363,37
	Bagi Hasil Pajak							
		<b>Jumlah</b>	<b>6.339.672.673,00</b>	<b>31.998.363,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.998.363,37</b>

## V.4.1.1.10.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**(6.639.130.663,29)****(6.485.712.187,56)**

Terdapat penyisihan piutang lainnya selama tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp6.639.130.663,29) dan (Rp6.557.633.837,50) atau terdapat kenaikan sebesar (Rp595.787.195,73) atau 9,19% dari saldo per 31 Desember 2018. Daftar rincian perhitungan penyisihan piutang pendapatan lainnya dihitung berdasarkan jenis dan umur piutang pendapatan lainnya tahun 2006 s.d 2019 sebagai berikut:

Tabel V.4.28 Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya TA 2018

No	Jenis Pendapatan Lainnya	Tahun Penetapan	Piutang 2019	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total	Total	(Beban)/Surplus
				< 1 tahun	1-2 tahun	2-3 tahun	> 3 tahun	Penyisihan 2018	Penyisihan 2019	
				0,50%	10%	50%	100%			
1	Bada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)									
	Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2006 - 2010	3.750.028.204,50	-	-	-	3.750.028.204,50	3.706.555.477,50	3.750.028.204,50	(43.472.727,00)
		2018	1.140.320.011,21	0,00	114.032.001,12	-	-	5.926.600,06	114.032.001,12	(108.105.401,06)
		2019	768.063.533,39	3.840.317,67					3.840.317,67	(3.840.317,67)
	Piutang Bunga Dana Bergulir	2007 - 2012	94.774.400,00	-	-	-	94.774.400,00	94.774.400,00	94.774.400,00	-
	Piutang Dana Bergulir	2006 - 2007	438.102.000,00	-	-	-	438.102.000,00	440.102.000,00	438.102.000,00	2.000.000,00
	Piutang Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2007	1.526.607.000,00	-	-	-	1.526.607.000,00	1.526.607.000,00	1.526.607.000,00	-
2	Piutang Jaminan Uang Muka									-
	Dinas PU	2012	242.896.950,00	-	-	-	242.896.950,00	242.896.950,00	242.896.950,00	-
		2014	199.471.800,00	-	-	-	199.471.800,00	199.471.800,00	199.471.800,00	-
	Dispar	2019	59.417.803,00	-	-	-	-	-	-	-
	Piutang Jaminan Pelaksanaan			-	-	-	442.368.750,00	442.368.750,00	442.368.750,00	-

No	Jenis Pendapatan Lainnya	Tahun Penetapan	Piutang 2019	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total	Total	(Beban)/Surplus
				< 1 tahun	1-2 tahun	2-3 tahun	> 3 tahun	Penyisihan 2018	Penyisihan 2019	
				0,50%	10%	50%	100%			
Dinas PU	2012	179.847.100,00	-	-	-	179.847.100,00	179.847.100,00	179.847.100,00	-	
	2014	49.795.300,00	-	-	-	49.795.300,00	49.795.300,00	49.795.300,00	-	
Dinas Pera KPP	2012	39.735.560,00	-	-	-	39.735.560,00	39.735.560,00	39.735.560,00	-	
<b>Total</b>			<b>8.489.059.662,10</b>	<b>3.840.317,67</b>	<b>114.032.001,12</b>	<b>0</b>	<b>6.963.627.064,50</b>	<b>6.928.080.937,56</b>	<b>6.639.130.663,29</b>	

#### V.4.1.1.11 Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**60.752.946,00**

**156.605.736,44**

Beban Dibayar Dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah dalam bentuk beban sewa dibayar dimuka dan premi asuransi masing masing sebesar Rp60.752.946,00 dan Rp156.605.736,44 atau mengalami penurunan sebesar Rp95.852.790,44 atau 61,21,00%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.29 Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Sewa Dibayar Dimuka	31.815.524,00	156.605.736,43	(124.790.212,43)	79,68
2	Premi Asuransi	28.937.422,00	0,00	28.937.422,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>60.752.946,00</b>	<b>156.605.736,43</b>	<b>(95.852.790,44)</b>	<b>61,44</b>

Beban dibayar dimuka tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel V.4.30 Rincian Beban Dibayar Dimuka per SKPD TA 2019**

No.	SKPD	Uraian	Nama Pihak Ketiga	Jumlah
				(Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sewa Gedung BPBD TA 2019	Horasman Malau (001/01/BPBD/III/2019) 1 Maret 2019	4.166.667,00
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Sewa gedung kantor Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Merdina Limbong (430/001/DISBUDPORA /SP-KTKV/2019)	1.315.068,00
3	Sekretariat Daerah	Sewa Mess Pemkab Samosir Medan	Meta Christy Saragih (027/1329/UMLENG/II/2019) nilai Kontrak Rp250.000.000,00 18 Maret 2019 s/d 17 Maret 2020	26.333.789,00
<b>Jumlah Beban Dibayar Dimuka</b>				<b>31.815.524,00</b>
4	Sekretariat Daerah	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Pimpinan dan Kendaraan Operasional	Sidik Yuni Handoko (027/836/SPK/PPKm/UMLENG/2019)	28.337.422,00
5	Dinas Pariwisata	Asuransi Pernumpang Kapal Wisata Kab. Samosir	Zepanya Haposan S	600.000,00



No.	SKPD	Uraian	Nama Pihak Ketiga	Jumlah
				(Rp)
Jumlah Beban Premi				28.937.422,00
Total				60.752.946,00

**V.4.1.1.12 Persediaan**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**21.196.359.810,12****42.394.687.048,53**

Saldo Persediaan periode 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp21.196.359.810,12 dan Rp42.394.687.048,53, mengalami penurunan sebesar Rp21.198.272.863,41 atau 48,08%. Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Bahan Pakai habis periode 31 Desember 2019 berdasarkan hasil stok opname (Physical/Periodikal Inventory) yang dilakukan pada akhir tahun, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.31 Rincian Saldo Persediaan TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Persediaan Barang Habis Pakai	431.186.761,37	346.415.369,00	84.771.392,37	24,47
2	Persediaan Bahan/Material	5.047.325.662,07	6.015.455.482,72	(968.129.820,65)	(16,09)
3	Barang yang diserahkan ke pihak ke tiga	15.717.847.386,68	36.032.816.196,81	(20.314.968.810,13)	(56,38)
<b>Jumlah</b>		<b>21.196.359.810,12</b>	<b>42.394.687.048,53</b>	<b>(21.198.327.238,41)</b>	<b>(50,00)</b>

Daftar Persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XVIII**. Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan penghapusan persediaan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 29 Tahun 2019 akibat telah kadaluarsa dan tidak dapat digunakan kembali, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.32 Rincian Penghapusan Persediaan yang sudah Kadaluarsa TA 2019**

No	Nama SKPD	Barang Habis Pakai (Rp)	Bahan/Material (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	37.146.181,00	37.146.181,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	57.168.840,00	0,00	57.168.840,00
3	Badan Pendapatan Daerah	437.500,00	0,00	437.500,00
<b>Total</b>		<b>57.606.340,00</b>	<b>37.146.181,00</b>	<b>94.752.521,00</b>

Terdapat persediaan yang sudah kadaluarsa TA 2019 tapi masih berada di gudang persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.33 Rincian Persediaan yang sudah Kadaluaarsa TA 2019

No	Nama SKPD	Barang Habis Pakai (Rp)	Bahan/Material (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	132.647.592,00	132.647.592,00
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	543.750,00	543.750,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>133.191.342,00</b>	<b>133.191.342,00</b>

#### V.4.1.2 INVENSTASI JANGKA PANJANG

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**17.804.257.411,98****13.804.257.411,98**

Akun Investasi adalah untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan. Per 31 Desember 2019, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp17.804.257.411,98 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 28,98% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp13.804.257.411,98 yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Samosir seluruhnya dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Permanen.

##### V.4.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**17.804.257.411,98****13.804.257.411,98**

Investasi Jangka Panjang Permanen untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp17.804.257.411,98 dan Rp13.804.257.411,98, mengalami peningkatan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 28,98%.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut.

Perhitungan nilai investasi dilakukan dengan metode biaya. Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal Kabupaten Samosir yang dilakukan sampai dengan Tahun 2019. Penyertaan modal pada PT. Bank Sumut diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan terbatas pada Bank Sumatera Utara dengan persentase saham sebesar 0,91%.

Dimana penyertaan modal tersebut sudah termasuk 50% dari dividen yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebesar Rp1.670.418.688,00. Sesuai dengan surat Bank Sumut nomor 155/Dir/SP-SPr/Psh/2019 bahwa atas dividen yang diterima dibagi menjadi komposisi 35% penyertaan modal, 60% dibagikan, 5% Cadangan Umum. Atas hal tersebut Pemerintah Kabupaten Samosir terlebih dahulu menyetorkan sesuai dengan peraturan daerah maka sebesar 35% deviden untuk penyertaan modal telah disetorkan ke RKUD Pemerintah

Kabupaten Samosir. Rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Samosir adalah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.34 Rincian Penyertaan Modal Tahun 2009-2019**

No	Tahun	Nilai (Rp)
1	2019	4.000.000.000,00
2	2018	6.366.593.272,00
3	2017	1.633.406.728,00
4	2013	322.820.180,00
		1.128.513.491,00
5	2012	471.457.315,00
6	2011	632.875.666,44
7	2010	1.703.376.982,54
8	2009	1.545.213.777,00
	<b>Total</b>	<b>17.804.257.411,98</b>

#### V.4.1.3 ASET TETAP

Per 31 Desember 2019  
(Rp)

**1.488.392.808.693,56**

Per 31 Desember 2018  
(Rp)

**1.451.661.186.462,38**

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Samosir per 31 Desember 2019 dan 2018 setelah penyusutan masing-masing sebesar Rp1.488.392.808.693,56 dan Rp1.451.661.186.462,38 atau mengalami kenaikan sebesar Rp36.731.622.231,18 atau 2,53%. Nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Samosir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.488.392.808.693,56 dengan rincian perolehan aset tetap sebagai berikut:

**Tabel V.4.35 Rincian Saldo Aset Tetap TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase (%)
				(Rp)	
1	Tanah	520.335.435.818,85	510.664.801.042,85	9.670.634.776,00	1,89
2	Peralatan dan Mesin	235.498.343.765,30	218.554.550.527,50	16.943.793.237,80	7,75
3	Gedung dan Bangunan	453.808.551.649,17	433.648.761.999,60	20.159.789.649,57	4,65
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.261.727.201.399,37	1.141.597.829.107,86	120.129.372.291,51	10,52
5	Aset Tetap Lainnya	2.287.854.935,54	3.450.044.827,54	(1.162.189.892,00)	(33,69)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.486.532.342,07	13.043.788.007,10	(3.557.255.665,03)	(27,27)
7	Akumulasi Penyusutan	(994.751.111.216,74)	(869.298.589.050,07)	(125.452.522.166,67)	14,43
	<b>Jumlah</b>	<b>1.488.392.808.693,56</b>	<b>1.451.661.186.462,38</b>	<b>36.731.622.231,18</b>	<b>2,53</b>

Mutasi aset tetap selama tahun 2019 terdiri dari (1) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum, (2) pengurangan yang

merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan, (3) karena perpindahan (*reclass*) antar SKPD dan antar jenis, dan (4) koreksi atas pencatatan aset tetap sebelumnya.

Mutasi aset tetap selama tahun 2019 terdiri dari (1) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum, (2) pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan, (3) karena perpindahan (*reclass*) antar SKPD dan antar jenis, dan (4) koreksi atas pencatatan aset tetap sebelumnya.

#### V.4.1.3.1 Tanah

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>520.335.435.818,85</b>	<b>510.664.801.042,85</b>

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Samosir per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp520.335.435.818,85 dan Rp510.664.801.042,85, atau kenaikan sebesar Rp9.670.634.776,00 atau 1,89%, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran XIX**. Perhitungan mutasi aset tetap tanah selama TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.36 Perhitungan Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2019**

No	Rincian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2019		510.664.801.042,85
	<b>Mutasi Aset Tahun 2019</b>		
2	Mutasi Tambah :		9.686.426.776,00
	Belanja Modal Tahun 2019	6.359.404.776,00	
	Hibah dari masyarakat	1.030.000.000,00	
	Kurang Catat	2.297.022.000,00	
3	Mutasi Kurang :		15.792.000,00
	Hibah ke BPS Kabupaten Samosir	15.792.000,00	
4	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2019</b>		<b>520.335.435.818,85</b>

Sesuai dengan tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap tanah selama Tahun 2019 sebesar Rp9.686.426.776,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Tanah Tahun 2019 sebesar Rp6.359.404.776,00 yang berasal dari ganti rugi yang diperuntukkan untuk pelebaran jalan kabupaten pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- b. Hibah dari masyarakat kecamatan Onan Runggu an. Hasoloan Gultom pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Perdagangan sebesar Rp1.030.000.000,00.

- c. Penambahan aset tanah akibat kurang catat berdasarkan NJOP tahun perolehan sebesar Rp2.297.022.000,00 pada Kantor Camat Pangururan yaitu tanah di jalan Putri Lopian eks KUD.

## 2. Mutasi Kurang

Pengurangan aset tetap tanah selama Tahun 2019 sebesar sebesar Rp15.792.000,00 yaitu pada Sekretariat Daerah akibat hibah kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir.

### V.4.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**235.498.343.765,30**

**218.554.550.527,50**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Samosir per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp235.498.343.765,30 dan Rp218.554.550.527,50 atau meningkat sebesar Rp16.943.793.237,80 atau 7,75%. Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran XX. Perhitungan mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.37 Perhitungan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2019**

No	Rincian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2019		218.554.550.527,50
	<b>Mutasi Aset Tahun 2019</b>		
2	Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Tahun 2019	12.359.799.372,00	25.420.416.110,30
	Hibah	3.100.614.773,71	
	Reklas dari KIB E	1.435.575.992,00	
	Reklas dari Barang dan jasa	39.950.000,00	
	Reklas dari KIB C	6.336.777.360,94	
	Belanja BOS	2.021.284.834,00	
	Kurang Catat	110.000.000,00	
	Reklas dari Ekstrakomtable	16.413.777,65	
3	Mutasi Kurang		8.476.622.872,50
	Reklas ke Aset lain-lain	4.461.099.391,86	
	Pelelangan	1.653.944.750,00	
	Reklas menjadi barang Jasa	118.286.500,00	
	Reklas ke KIB C	24.254.000,00	
	Ekstrakomtable	2.126.799.286,95	
	Persediaan	65.925.442,52	
	Reklas ke KIB E	2.800.000,00	
	Lebih Catat	23.513.501,17	
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2019		235.498.343.765,30

Sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Mutasi Tambah

Penambahan peralatan dan mesin pada tahun 2019 sebesar Rp27.161.659.344,78 dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan mesin sesuai LRA TA 2019 adalah sebesar Rp12.359.799.372,00.
- Mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin dari pendapatan hibah pada SKPD sebesar Rp3.100.614.773,71, dengan rincian sebagai berikut

**Tabel V.4.38 Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah TA 2019**

No	Nama SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Hibah barang dari Kementerian Kesehatan	87.150.000,00	BAST Nomor KN 02.077/I/6415/2018 Berupa 5 unit kendaraan roda 2
2	Dinas Kesehatan	Hibah barang dari Masyarakat	8.000.000,00	Dr. Blmar Sidabutar berupa meja pendaftaran sebanyak 2 unit
3	Dinas Kesehatan	Hibah dari Menara Agung	18.000.000,00	BAST Nomor 180/YMAPI/XI/PC/2019 Berupa microscope olympas CX 23
4	Dinas Pariwisata	Hibah dari Geopark Toba Samosir	1.316.276.000,00	1913/95/SBG/2019 berupa meja dan display
5	Dinas Pendidikan	Hibah dari masyarakat	97.653.000,00	
		Hibah dari PT. Inalum	525.727.500,00	
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.047.808.273,71	
<b>TOTAL</b>			<b>3.100.614.773,71</b>	

- Mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin reklas dari aset tetap lainnya sebesar Rp1.435.575.992,00 yaitu pada Dinas Pariwisata sebesar Rp3.000.000, pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp574.430.000,00, pada Inspektorat Daerah sebesar Rp2.750.000,00, pada Dinas Pendidikan sebesar Rp771.827.992,00 dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp83.568.000,00 berupa alat olahraga berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- Mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin reklas dari belanja barang dan jasa sebesar Rp39.950.000,00 yaitu pada Dinas Perhubungan sebesar Rp8.550.000,00 berupa kulkas dan dispenser dan pada Dinas Pendidikan (SMP N 1 Nainggolan, SD N 7 Sianjur mulamula, SD N 2 Nainggolan, SD N 3 Nainggolan, SMP N 2 Sianjur Mulamula, SD N 1 Nainggolan ) sebesar Rp31.400.000,00 berupa rangka besi, laptop dan printer.
- Mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin dari aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp6.336.777.360,94 yakni pada Dinas Perhubungan sebesar

Rp4.791.517.659,00 dan akibat Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.545.259.701,94 berupa rambu-rambu lalu lintas.

- f. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari Belanja Dana BOS sebesar Rp2.021.284.834,00 pada Dinas Pendidikan akibat pengganggarannya adalah pada Belanja jasa BOS seharusnya belanja modal.
- g. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin akibat kurang catat sebesar Rp110.000.000,00 pada Dinas Pertanian berupa mobil pickup L300 tahun perolehan 2008.
- h. Mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin dari ekstrakomtable sebesar Rp16.413.777,65 pada Dinas Pendidikan (SD N 21 Hasinggaan) berupa Lemari, Rak Buku dan Meja.

## 2. Mutasi Kurang

Pengurangan peralatan dan mesin selama tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp10.217.866.106,98 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain sebesar Rp4.461.099.391,86 pada SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.39 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain TA 2019**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.498.000,00	rusak berat
2	Kebun Raya Samosir	52.601.025,00	rusak berat
3	Badan Perencanaa Pembangunan Daerah	94.881.100,00	rusak berat
4	Dinas Ketahanan Pangan	101.336.750,00	rusak berat
5	Sekretariat Daerah	226.418.500,00	rusak berat
6	Dinas Pariwisata	258.761.206,00	rusak berat
7	Satuan Polisi Pamong Praja	827.045.571,50	rusak berat
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	344.937.008,94	rusak berat
9	Rumah Sakit Umum Daerah	195.250.000,00	rusak berat
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	103.341.579,42	rusak berat
11	Kantor Camat Sianjur Mulamula	42.277.000,00	rusak berat
12	Dinas Pendidikan	205812644	rusak berat
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	417.843.712,00	rusak berat
14	Dinas Pertanian	248.805.165,00	rusak berat
15	Dinas Kesehatan	1.311.695.130,00	rusak berat
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.595.000,00	rusak berat
<b>Jumlah</b>		<b>4.461.099.391,86</b>	

- b. Mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin karena pelelangan sebesar Rp1.653.944.750,00 pada SKPD dengan SK Bupati Samosir Nomor 321 Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.40 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Karena pelelangan TA 2019**

No	Nama SKPD	Nilai Perolehan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	167.625.000,00
2	Kantor Camat Simanindo	26.276.000,00
3	Sekretariat Daerah	489.572.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.842.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	251.982.500,00
6	Dinas Perhubungan	423.679.000,00
7	Dinas Pertanian	271.968.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.653.944.750,00</b>

Rincian peralatan dan mesin yang dilelang dapat dilihat pada **Lampiran IV**.

- c. Mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin menjadi belanja barang dan jasa sebesar Rp118.286.500,00 yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp20.079.000,00 berupa cat, pipa dan kawat, Sekretariat DPRD sebesar Rp4.537.500,00 berupa piring, gelas, mangkuk dan sendok dan Dinas Pendidikan sebesar Rp93.670.000,00 berupa jerjak dan mesin finger.
- d. Reklas ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp24.254.000,00 yakni pada Kantor Camat Pangururan Rp8.000.000,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp16.254.000,00.
- e. Menjadi ekstrakomtabel sebesar Rp2.126.799.286,95 pada SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.41 Rincian Ekstrakomtabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2019**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat Daerah	72.170.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.950.000,00
3	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	12.000.000,00
4	Dinas kesehatan	297.965.874,50
5	Dinas Pendidikan	1.742.713.412,45
<b>Jumlah</b>		<b>2.126.799.286,95</b>

- f. Menjadi persediaan sebesar Rp65.925.442,52 yaitu pada Dinas Kesehatan berupa alat kesehatan sebesar Rp28.942,52, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa kabel, VGA dan jam dinding sebesar Rp8.575.000,00, Sekretariat Daerah berupa piring, gelas dan panci sebesar Rp45.631.500,00 dan pada Dinas Pendidikan (SD N 11 Hutagurgur) sebesar Rp11.690.000,00 berupa kabel, cat, rangka besi dan jerjak.
- g. Reklas ke aset tetap lainnya sebesar Rp2.800.000,00 pada Dinas Pendidikan akibat penerapan Permedagri Nomor 108 Tahun 2016.
- h. Terjadi kesalahan pencatatan sebesar Rp42.265.001,17 akibat double catat yaitu pada SMP N 3 Simanindo dan SMP N 2 Simanido sebesar Rp23.513.500,00, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp0,30 dan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp0,87.



**V.4.1.3.3 Gedung dan Bangunan**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**453.808.551.649,17****433.648.761.999,60**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Samosir per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp453.808.551.649,17 dan Rp433.648.761.999,60, atau meningkat sebesar Rp20.159.789.649,57 atau 4,65%, dengan rincian per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XXI**.

Perhitungan mutasi aset tetap gedung dan bangunan selama TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.42 Rincian Perhitungan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2019**

No	Rincian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	<b>Saldo Awal per 1 Januari 2019</b>		<b>433.648.761.999,60</b>
	<b>Mutasi Aset Tahun 2019</b>		
2	Mutasi Tambah		32.387.482.371,68
	Belanja Modal Tahun 2019	23.742.137.936,00	
	Reklas dari KIB E	2.660.826.142,86	
	Reklas dari barang dan jasa	440.081.987,39	
	Reklas dari KIB B	24.254.000,00	
	Hibah	4.848.141.870,00	
	Hutang	645.926.435,43	
	Kurang Catat	26.114.000,00	
3	Mutasi Kurang		12.227.692.722,11
	Penghapusan	664.780.514,00	
	Reklas ke KIB D	2.065.971.307,05	
	Reklas ke Aset lain-lain	24.560.000,00	
	Ekstrakomtable	219.644.203,00	
	Pelunasan Hutang	757.608.480,00	
	KDP	1.889.271.430,10	
	Piutang	59.417.803,00	
	KIB B	6.336.777.360,94	
	Reklas ke barang dan jasa	209.661.622,65	
	Lebih catat	1,37	
4	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2019</b>		<b>453.808.551.649,17</b>

Sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Mutasi Tambah**

Penambahan gedung dan bangunan pada tahun 2019 sebesar Rp30.545.547.068,68 berasal dari:

- a) Belanja Modal selama tahun 2019 senilai Rp23.742.137.936,00.
- b) Reklas aset Gedung dan Bangunan dari aset tetap lainnya sebesar Rp2.660.826.142,86 yakni pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.464.144.000,00 akibat renovasi di puskesmas yang rusak berat dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp196.682.142,86.
- c) Penambahan aset Gedung dan Bangunan reklas dari belanja barang dan jasa sebesar Rp440.081.987,39 yakni pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.761.400,00, pada Dinas Pariwisata sebesar Rp251.938.587,39, pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp120.900.000,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.592.000,00 dan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp51.890.000,00 yaitu perencanaan pasar tradisional Pangururan.
- d) Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp24.254.000,00 yakni pada Kantor Camat Pangururan. Sebesar Rp8.000.000,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp16.254.000,00,00.
- e) Penambahan aset gedung dan bangunan dari Hibah sebesar Rp4.848.141.870,00 yakni hibah dari Geopark sebesar Rp1.308.249.000 dan hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp3499892870 pada Dinas Pariwisata dan sebesar Rp40.000.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- f) Penambahan aset gedung dan bangunan dari hutang sebesar Rp645.926.435,43 yakni pada Dinas Pariwisata sebesar Rp142.157.864,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp503.768.571,43.
- g) Penambahan aset gedung dan bangunan karena kurang catat pada Tahun 2018 sebesar Rp26.114.000,00 pada Kantor Camat Pangururan.

## **2. Mutasi Kurang**

Pengurangan gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp10.385.757.419,11 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penghapusan aset gedung dan bangunan sebesar Rp664.780.514,00 yakni pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp209.850.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp288.716.514,00, Kantor Camat pangururan sebesar Rp26.114.000,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp14.0100.000,00.
- b) Reklas ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.065.971.307,05 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp589.100.000,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.476.871.307,05.
- c) Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp24.560.000,00 pada Sekretariat Daerah.
- d) Ekstrakomtabel aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp219.644.203,00 pada Kantor Camat Pangururan Rp8.000.000,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp211.644.203,00.
- e) Pelunasan Hutang Tahun sebelumnya dan tidak menjadi Aset KIB C sebesar Rp757.608.480,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- f) Kontruksi Dalam Pengerjaan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp47.336.127,10 dan Rp1.841.935.303,00 yaitu pembangunan jalan setapak dan/atau jalur sepeda di kawasan wisata alam objek wisata aek natonang Kec. Simanindo pada Dinas Pariwisata.
- g) Piutang konstruksi dalam pengerjaan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp59.417.803,00 pada Dinas Pariwisata.
- h) Pengurangan ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp4.791.517.659,00 pada Dinas perhubungan.
- i) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan menjadi barang dan jasa sebesar Rp209.661.622,65 pada Dinas Pendidikan.
- j) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan akibat lebih catat sebesar Rp1,37 pada Dinas Pendidikan.

#### V.4.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**1.261.727.201.399,37****1.141.597.829.107,86**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Samosir per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.261.727.201.399,37 dan Rp1.141.597.829.107,86 atau meningkat sebesar Rp120.129.372.291,51 atau 10,52%. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XXII**. Perhitungan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.43 Perhitungan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019**

No	Rincian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>Saldo Awal per 1 Januari 2019</b>		<b>1.141.597.829.107,86</b>
	Mutasi Aset Tahun 2019		
<b>2</b>	<b>Mutasi Tambah</b>		<b>133.736.822.694,98</b>
	Belanja Modal Tahun 2019	113.030.134.184,00	
	Reklas dari Barang dan Jasa	4.019.154.898,12	
	Reklas dari KDP	5.452.823.680,00	
	Reklas dari Hutang	6.251.408.660,57	
	Reklas dari KIB E	2.664.612.857,14	
	Piutang Uang Muka	33.795.108,00	
	Hibah	218.922.000,00	
	Reklas dari KIB C	2.065.971.307,05	
	Kurang Catat	0,1	
<b>3</b>	<b>Mutasi Kurang</b>		<b>13.607.450.403,47</b>
	Pembayaran Hutang	12.434.743.532,00	
	Reklas menjadi KDP	402.120.103,00	

No	Rincian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
	Penghapusan	247.802.086,28	
	Reklas menjadi Persediaan	517.038.300,00	
	Reklas menjadi barang/jasa	5.746.382,19	
4	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2019</b>		<b>1.261.727.201.399,37</b>

Sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2019 sebesar Rp133.350.499.591,98 berasal dari:

- a) Belanja Modal selama tahun 2019 senilai Rp113.030.134.184,00.
- b) Penambahan dari Kapitalisasi belanja Barang/Jasa sebesar Rp4.019.154.898,12 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.989.633.701,00, pada Dinas Pariwisata sebesar Rp19.461.197,12 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.060.000,00.
- c) Mutasi Tambah dari KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.452.823.680,00.
- d) Penambahan aset dari Hutang sebesar Rp6.251.408.660,57 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.985.112.482,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.076.572.428,57, Dinas Perhubungan sebesar Rp7.823.750,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp181.900.000,00.
- e) Reklas dari aset tetap KIB E pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp2.664.612.857,14.
- f) Mutasi Tambah dari Piutang Uang Muka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp33.795.108,00.
- g) Mutasi tambah dari Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp218.922.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
- h) Mutasi tambah dari Aset Tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.065.971.307,05 yakni pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp589.100.000,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.476.871.307,05.
- i) Mutasi tambah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan akibat kurang catat sebesar Rp0,01.

### 2. Mutasi Kurang

Pengurangan gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp13.221.127.300,47 atas:

- a) Pengurangan Aset Tetap Jalan, jaringan, Irigasi dari Pekerjaan atas aset yang sudah dimasukkan ke dalam aset tetap tetapi belum dibayarkan sebesar Rp Rp12.434.743.532,00 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar sebesar Rp11.358.564.832,00 dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.076.178.700,00.

- b) Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, jaringan, Irigasi Reklas ke KDP sebesar Rp15.797.000,00 pada Dinas Perhubungan dan sebesar Rp386.323.103,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c) Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, jaringan, Irigasi karena penghapusan sebesar Rp247.802.086,28 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- d) Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, jaringan, Irigasi menjadi persediaan sebesar Rp517.038.300,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- e) Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan, Irigasi menjadi barang/jasa sebesar Rp5.746.382,19 pada Dinas Pendidikan.

**V.4.1.3.5 Aset Tetap Lainnya**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

**(Rp)****(Rp)****2.287.854.935,54****3.450.044.827,54**

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.287.854.935,54 dan Rp3.450.044.827,54 atau menurun sebesar Rp1.162.189.892,00 atau 33,69%, dengan rincian per SKPD pada **Lampiran XXIII**. Perhitungan mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.44 Perhitungan Aset Tetap Lainnya TA 2019**

No	Rincian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	<b>Saldo Awal</b>		<b>3.450.044.827,54</b>
2	Mutasi Aset Tahun 2019		
	Mutasi Tambah		12.862.074.041,00
	Belanja Modal Tahun 2019	8.602.358.111,00	
	Mutasi dari Belanja barang jasa	4.224.532.930,00	
	Hibah	31.183.000,00	
	Reklas dari KIB B	2.800.000,00	
	Ekstrakomtable	1.200.000,00	
	Mutasi Kurang		14.024.263.933,00
	Mutasi ke KIB B	1.435.575.992,00	
	Mutasi ke KIB C	2.660.826.142,86	
	Mutasi ke KIB D	2.664.612.857,14	
	Mutasi ke KIB F	69.784.000,00	
	Mutasi ke Aset lain-lain	326.753.900,00	
	Pembayaran hutang	386.103.000,00	
	Mutasi ke persediaan	199.600.000,00	
	Barang Extracomtable	6.281.008.041,00	
3	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya</b>		<b>2.287.854.935,54</b>

Sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap lainnya pada tahun 2019 sebesar Rp12.862.074.041,00 , dengan rincian sebagai berikut:

- a) Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sesuai LRA TA 2019 adalah sebesar Rp8.602.358.111,00.
- b) Reklas dari belanja barang jasa sebesar Rp4.224.532.930,00 yaitu sebesar Rp30.000.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, sebesar Rp517.622.000,00 pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, sebesar Rp16.900.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebesar Rp3.660.010.930,00 pada Dinas Pendidikan.
- c) Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp31.183.000,00 yakni Hibah dari Geopark kaldare toba dengan BAST NO: 556/175/DISPAR-I-VI/2019 sebesar Rp31.003.000,00 pada Dinas Pariwisata dan sebesar Rp180.000.000,00 pada Dinas Pendidikan hibah merupakan dari masyarakat.
- d) Penambahan aset tetap lainnya reklas dari Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.800.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- e) Penambahan aset tetap lainnya reklas dari ekstrakomtable sebesar Rp1.200.000,00 pada Dinas Pendidikan berupa alat musik kecapi.

### 2. Mutasi Kurang

Pengurangan aset tetap lainnya selama tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp14.024.263.933,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengurangan aset tetap lainnya reklasifikasi ke aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.435.575.992,00 yaitu pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp574.430.000,00, sebesar Rp2.750.000,00 pada Inspektorat Daerah, sebesar Rp3.000.000,00 pada Dinas Pariwisata, pada Sekretraiat Daerah sebesar Rp83.568.000,00 dan pada Dins Pendidikan (SMP N 1 Sianjur Mulamula sebesar Rp6.550.000,00 akibat dari penerapan Permendagri 108 Tahun 2016.
- b) Pengurangan aset tetap lainnya akibat reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.660.826.142,86 yaitu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebesar Rp196.682.142,86, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.464.144.000,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp765.277.992,00.
- c) Pengurangan aset tetap lainnya akibat reklasifikasi ke Jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp2.664.612.857,14
- d) Pengurangan aset tetap lainnya akibat reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp69.784.000,00
- e) Pengurangan aset tetap lainnya akibat reklasifikasi ke Aset lain-lain sebesar Rp326.753.900,00 yaitu pada Dinas Pariwisata sebesar Rp136.950.000,00,

pada Dinas Pendidikan sebesar Rp500.000,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp189.303.900,00

- f) Pengurangan aset tetap lainnya akibat pembayaran hutang 2019 sebesar Rp386.103.000,00 yakni pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- g) Pengurangan aset tetap lainnya akibat reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp199.600.000,00 yakni pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- h) Mutasi kurang dicatat sebagai Extracomtable Aset Tetap lainnya sebesar Rp6.281.008.041,00 yakni pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp14.984.765,00 dan sebesar Rp6.266.023.276,00 pada Dinas Pendidikan.

#### V.4.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**9.486.532.342,07**

**13.043.788.007,10**

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp9.486.532.342,07 dan Rp13.043.788.007,10 atau mengalami penurunan sebesar Rp3.557.255.665,03 atau 27,27%. Rincian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.45 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD TA 2019**

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	Persentase (%)
				(Rp)	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	320.314.500,00	0,00	320.314.500,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.393.179.341,10	7.381.133.065,10	(4.987.953.724,00)	(64,26)
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.388.447.751,00	2.550.551.450,00	(1.162.103.699,00)	(66,33)
4	Dinas Lingkungan Hidup	89.276.000,00	89.276.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Perhubungan	415.137.613,87	31.921.786,00	383.215.827,87	(15,79)
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	49.962.000,00	49.962.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Pariwisata	4.830.215.136,10	2.940.943.706,00	1.889.271.430,10	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9.486.532.342,07</b>	<b>13.043.788.007,10</b>	<b>(3.557.255.665,03)</b>	<b>(27,27)</b>

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XXIV**.

Perhitungan mutasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan selama TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel V.4.46 Perhitungan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2019

No	Rincian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	<b>Saldo Awal per 1 Januari 2019</b>		<b>13.043.788.007,10</b>
	<b>Mutasi 2019</b>		
2	Mutasi Kurang		<b>6.913.720.380,00</b>
	Reklas menjadi Aset Tetap	5.452.823.680,00	
	Reklas menjadi Persediaan	1.460.896.700,00	
	Mutasi tambah		<b>3.356.464.714,97</b>
	Belanja Modal Tahun 2019	2.528.224.283,10	
	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019	328.948.853,00	
	Hutang 2019	499.291.578,87	
3	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2019</b>		<b>9.486.532.342,07</b>

Sesuai dengan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Mutasi Kurang

- a. Terdapat Pekerjaan yang masih dalam Pekerjaan Pembangunan Tahun sebelumnya dan masih belum selesai per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.130.067.627,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.47 Konstruksi Dalam Pekerjaan TA. 2018 yang Belum Selesai

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Rekanan	Jumlah Yang Dibayarkan TA 2018 (Rp)	Progres Fisik		Saldo KDP 2017 (Rp)	Ket
					persentase (%)	Nilai (Rp)		
<b>I DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
1	Pembangunan jalan holbung sabulan Kec. Silitio	2.429.900.208,00	CV. Bratama Engineering	1.610.452.730,00	69,76	1.695.098.385,10	1.695.098.385,10	KDP 2017, belum selesai
2	Belanja Penyusunan Dokumen Lingkungan dan perizinan pembukaan jalan Janji Maria - Parsingguran II Kec. Silitio.	388.685.000,00	CV. Multi System	0	60,00	233.211.000,00	233.211.000,00	KDP 2017, belum selesai
	<b>JUMLAH</b>	2.818.585.208,00		1.610.452.730,00		1.928.309.385,10	1.928.309.385,10	
<b>II DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>								
1	DED Lapangan Sepakbola Ambarita Kec. Simanindo	49.962.000,00	CV. Borisma Karya	49.962.000,00	100	49.962.000,00	49.962.000,00	KDP 2017
	<b>JUMLAH</b>	49.962.000,00		49.962.000,00		49.962.000,00	49.962.000,00	
<b>III DINAS PERHUBUNGAN</b>								



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR LKPD TAHUN 2019 - AUDITED

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Rekanan	Jumlah Yang Dibayarkan TA 2018 (Rp)	Progres Fisik		Saldo KDP 2017 (Rp)	Ket
					persentase (%)	Nilai (Rp)		
1	Perencanaan Pembangunan Dermaga Sitiotio	5.987.143,00		5.987.143,00	100	5.987.143,00	5.987.143,00	KDP 2017, pekerjaan fisik belum terlaksana
2	Perencanaan Pembangunan Dermaga Harian Kec. Harian	5.987.143,00		5.987.143,00	100	5.987.143,00	5.987.143,00	KDP 2017, pekerjaan fisik belum terlaksana
3	Perencanaan Pembangunan Dermaga Aek Rangat	9.973.750,00		9.973.750,00	100	9.973.750,00	9.973.750,00	KDP 2017, pekerjaan fisik belum terlaksana
4	Perencanaan Pembangunan Dermaga Lopo Parindo	9.973.750,00	CV. Hosi Tormarbue	9.973.750,00	100	9.973.750,00	9.973.750,00	KDP 2017, pekerjaan fisik belum terlaksana
	<b>JUMLAH</b>	<b>31.921.786,00</b>		<b>31.921.786,00</b>		<b>31.921.786,00</b>	<b>31.921.786,00</b>	
<b>IV</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>							
1	Perencanaan pembangunan hotel dan landscape	617.100.000,00	PT. Artek Utama	617.100.000,00	100	617.100.000,00	617.100.000,00	KDP 2017
2	Perencanaan Kantor BAPPEDA	49.800.000,00	CV. Permata Phytagoras Abadi	0	100	49.800.000	49.800.000	KDP 2017
3	Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati dan Lanscap perkantoran Parbaba		PT. Artek Utama	422.754.750,00	100	422.754.750,00	422.754.750,00	KDP 2018
	<b>JUMLAH</b>	<b>666.900.000,00</b>		<b>1.039.854.750,00</b>		<b>1.089.654.750,00</b>	<b>1.089.654.750,00</b>	
<b>V</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>							
1	Perencanaan Taman Tele	49.621.000,00	PT. Tata Prima	496.210.000,00	100	49.621.000,00	49.621.000,00	KDP 2017
2	Perencanaan Taman Liberty	39.655.000,00	CV. Permata Phytagoras Abadi	39.655.000,00	100	39.655.000,00	39.655.000,00	KDP 2017
	<b>JUMLAH</b>	<b>89.276.000,00</b>		<b>535.865.000,00</b>		<b>89.276.000,00</b>	<b>89.276.000,00</b>	
<b>VII</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>							
1	Pembangunan Dermaga di pasir putih parbaba kec. pangururan	2.966.044.217,85		2.824.804.017,00	100	2.824.804.017,00	2.940.943.706,00	KDP 2018
	<b>Jumlah</b>	<b>2.966.044.217,85</b>		<b>2.824.804.017,00</b>		<b>2.824.804.017,00</b>	<b>2.940.943.706,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.622.689.211,85</b>		<b>6.092.860.283,00</b>		<b>6.013.927.938,10</b>	<b>6.130.067.627,10</b>	

b. Terdapat mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun sebelumnya telah selesai dikerjakan dengan rincian sebagai berikut :

1. Menjadi Aset tetap Jalan, Jaringan Irigasi sebesar Rp5.452.823.680,00 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Menjadi barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga pada Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp1.460.896.700,00

Rincian Pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.4.48 Konstruksi Dalam Pekerjaan TA 2018 yang telah selesai TA 2019**

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Rekanan	Jumlah Yang Dibayarkan TA 2018 (Rp)	Progres Fisik		Saldo KDP 2018 (Rp)
					Persentase (%)	Nilai (Rp)	
<b>I DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							
1	Pembangunan jalan Sp. Pangiribuan Sijambur Desa Pardomuan Nauli Kec. Palipi	692.921.000,00	CV. Trya	554.337.000,00	80	554.337.000,00	572.385.232,00
2	Peningkatan jalan Ring Road Pelabuhan Ambarita Kec. Simanindo (DAK)	5.381.658.000,00	PT. Manel Star	4.547.402.000,00	84,5	4.547.402.000,00	4.597.364.000,00
3	Peningkatan jalan Sp. Boho-Peabang Kec. Sianjur Mulamula	989.818.713,00	CV. Tumpak	296.945.613,00	26,59	263.150.505,00	283.074.448,00
<b>SUB JUMLAH</b>		<b>7.064.397.713,00</b>		<b>5.398.684.613,00</b>		<b>5.364.889.505,00</b>	<b>5.452.823.680,00</b>
<b>II DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>							
1	Pengembangan Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan air minum Kota Nainggolan (DAK)	1.421.346.234,00	CV. Parsaoran	617.100.000,00	98	1.393.476.700,00	1.460.896.700,00
<b>SUB JUMLAH</b>		<b>1.421.346.234,00</b>		<b>617.100.000,00</b>		<b>1.393.476.700,00</b>	<b>1.460.896.700,00</b>
<b>JUMLAH</b>							<b>6.913.720.380,00</b>

## 2. Mutasi Tambah:

Terdapat Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pekerjaan selama Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Modal 2019 sebesar Rp2.528.224.283,10 yang belum dicatat sebagai asset tetap yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pada Dinas Pariwisata sebesar Rp1.889.271.430,10 , belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp386.323.103,00 dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp23.620.750,00 dan belanja modal asset tetap lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp229.009.000,00

- b) Konstruksi Dalam Pekerjaan yang berasal dari Belanja pada Badan Perencanaan Daerah sebesar Rp320.314.500,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp8.634.353,00
- c) Konstruksi Dalam Pekerjaan atas pekerjaan yang belum dibayarkan Tahun 2019 sebesar Rp69.912.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, sebesar Rp69.784.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan sebesar Rp359.595.078,87 pada Dinas Perhubungan.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.4.49 Konstruksi Dalam Pekerjaan TA 2019**

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Rekanan	Jumlah Yang Dibayarkan TA 2019 (Rp)	Progres Fisik		Saldo KDP 2019 (Rp)
					Persentase(%)	Nilai (Rp)	
<b>I DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							
1.	Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Sp. Rapusan Kec. Siotio	592.519.386,00	CV. SITANGGORNAULI	394.957.456,00	65,22	394.957.456,00	KDP 2019
2.	Lanjutan Peningkatan Jalan Menuju Sijambur Desa Pardomuan Nauli Kec. Palipi	199.750.000,00	CV. SARDOSAHAT TUA	69.912.500,00	35,00	69.912.500,00	KDP 2019
<b>JUMLAH</b>		792.269.386,00		464.869.956,00		464.869.956,00	
<b>II DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>							
1	Perencanaan Lanjutan Penataan Kawasan Menara Pandang Tele Kec. Harian	69.784.000	CV. BETHALINK INTERNUSA PERSADA	0,00	100,00	69.784.000	KDP 2019
2	Perencanaan Gedung			199.144.000	100,00	99.561.000	KDP 2019
3	Perencanaan Pembangunan PONEK RSUD Dr. Hadrianus Pangururan					99.583.000	KDP 2019
4	Perencanaan Penataan Kawasan PIS			29.865.000	100,00	29.865.000	KDP 2019
<b>JUMLAH</b>						298.793.000,00	
<b>III DINAS PARIWISATA</b>							
1	Pembangunan Dermaga di Pasir Putih Parbaba Kec. Pangururan	1.980.575.000,00	CV. BATU SAWAN	1.752.471.430,10	100,00	1.752.471.430,10	KDP 2019
2	Perencanaan Pembangunan Titik Labuh/singgah Kapal Yacht dikawasan Objek Wisata Pantai Batu Hoda, dll	89.900.000,00	PT. ASTERIX ANUGRAH	89.900.000,00	100,00	89.900.000,00	KDP 2019
3	Perencanaan Pembangunan Titik Labuh/singgah Kapal Yacht dikawasan Objek Wisata Pantai Batu Hoda, dll	46.900.000,00	PT. MARCELINO SUKSES MANDIR	46.900.000,00	100,00	46.900.000,00	KDP 2019
<b>JUMLAH</b>		<b>2.117.375.000,00</b>				1.889.271.430,10	
<b>IV Dinas Perhubungan</b>							
1	Peningkatan Dermaga Aek Rangat di Kecamatan Pangururan	359.595.078,87	CV. SITANGGOR NAULI	0	100,00	359.595.078,87	KDP 2019
2	Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan	23.620.750,00	CV. PRESISI TAMA	0	100,00	23.620.750,00	KDP 2019

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Rekanan	Jumlah Yang Dibayarkan TA 2019 (Rp)	Progres Fisik		Saldo KDP 2019 (Rp)
					Persentase(%)	Nilai (Rp)	
	Dermaga/Pelabuhan Kab. Samosir						
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.117.375.000,00</b>				383.215.828,87	
V	<b>Bappeda</b>						
1	Perencanaan Master Plan Kawasan Wisata		CV. SITANGGOR NAULI	0	320.314.500,00	320.314.500,00	KDP 2019
	<b>JUMLAH</b>					320.314.500,00	
	<b>TOTAL</b>					<b>3.356.464.714,97</b>	

#### V.4.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**(994.751.111.216,74)**

**(869.298.589.050,07)**

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp994.751.111.216,74) dan (Rp869.298.589.050,07), atau mengalami kenaikan sebesar Rp125.452.522.166,67 atau 14,43%. Perhitungan mutasi saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.50 Perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Penyusutan 2018 (Rp)	Koreksi Penyusutan 2019 (Rp)		Beban Penyusutan 2019 (Rp)	Penyusutan 2019 (Rp)
			Koreksi Tambah	Koreksi Kurang		
1	Peralatan dan Mesin	144.896.638.803,77	4.952.345.940,47	6.124.104.270,89	22.393.393.628,20	166.118.274.101,55
2	Gedung dan Bangunan	236.772.263.527,30	117.013.276,86	2.515.109.904,83	15.828.976.784,23	250.203.143.683,55
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	484.802.763.832,00	0,27	148.681.251,79	92.422.112.057,16	577.076.194.637,64
4	Aset Tetap Lainnya	2.826.922.887,00	14.017.800,20	1.674.480.892,00	187.038.998,80	1.353.498.794,00
	<b>Jumlah</b>	<b>869.298.589.050,07</b>	<b>5.083.377.017,80</b>	<b>10.462.376.319,51</b>	<b>130.831.521.468,39</b>	<b>994.751.111.216,74</b>

Penghitungan penyusutan aset tetap sebesar Rp(994.751.111.216,74) dapat dilihat sebagai berikut:

#### V.4.1.3.7.1 Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**(166.118.274.101,55)**

**(144.896.638.803,77)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Samosir per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp166.118.274.101,55) dan (Rp144.896.638.803,77) atau mengalami kenaikan sebesar (Rp21.221.635.297,78) atau

14,65%. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XXV**.

#### V.4.1.3.7.2 Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>(250.203.143.683,55)</b>	<b>(236.772.263.527,30)</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Samosir per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp250.203.143.683,55) dan (Rp236.772.263.527,30) atau mengalami kenaikan sebesar (Rp13.430.880.156,25) atau 5,67%. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XXVI**.

#### V.4.1.3.7.3 Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>(577.076.194.637,64)</b>	<b>(484.802.763.832,00)</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp577.076.194.637,64) dan (Rp484.802.763.832,00), atau mengalami kenaikan sebesar (Rp92.273.430.805,64) atau 19,03%. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XXVII**.

#### V.4.1.3.7.4 Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>(1.353.498.794,00)</b>	<b>(2.826.922.887,00)</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp1.353.498.794,00) dan (Rp2.826.922.887,00), atau mengalami penurunan sebesar (Rp1.473.424.093,00) atau 52,12%. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran XXVIII**.

#### V.4.1.3.8 Dana Cadangan

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pemerintah Kabupaten Samosir tidak memiliki dana cadangan per 31 Desember 2019 dan 2018.

#### V.4.1.3.9.2 Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>231.957.000,00</b>	<b>333.034.700,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tak Berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp231.957.000,00 dan Rp333.034.700,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp101.077.700,00 atau 30,35%. Perhitungan mutasi aset tidak berwujud selama TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.51 Perhitungan Mutasi Aset Tidak Berwujud TA 2019**

No	Rincian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Des 2019 sebelum amortisasi		<b>1.402.602.500,00</b>
2	Jumlah Aset tidak berwujud		1.402.602.500,00
3	Amortisasi Aset Tak Berwujud		1.170.645.500,00
4	Saldo Akhir Aset Tak Berwujud		<b>231.957.000,00</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa saldo awal aset tak berwujud per 1 Januari 2019 sebesar Rp1.402.602.500,00. Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XXIX** dan amortisasi aset tidak berwujud pada **Lampiran XXX**.

#### V.4.1.3.9.1 Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>14.456.239.020,52</b>	<b>16.823.466.590,14</b>

Aset Lain-Lain berupa Aset Rusak Berat dan aset hilang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp14.456.239.020,52 dan Rp16.823.466.590,14 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.367.227.569,62 atau 16,38%. Rincian perhitungan saldo aset aset lain-lain per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.52 Perhitungan Mutasi Aset Lain-Lain berupa Aset Rusak Berat TA 2019**

No	Rincian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Des 2019 Sebelum Penyusutan		68.055.448.735,53
2	Mutasi Aset Tahun 2019		
	Mutasi Tambah :		4.846.416.292,22
	Reklas dari KIB B	4.421.294.391,86	
	ATB		

No	Rincian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
	KIB C	24.560.000,00	
	KIB E	326.253.900,00	
	Kurang Catat	74.308.000,36	
	Mutasi Kurang :		6.724.757.215,22
	Pelelangan	243.671.071,00	
	Penghapusan	6.443.583.143,45	
	KIB B	18.751.500,00	
	Lebih Catat	18.751.500,77	
	Reklas ke ATB		
3	Jumlah Aset Lain-lain		66.177.107.812,53
4	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain		51.720.868.792,01
5	<b>Jumlah aset lain-lain setelah penyusutan</b>		<b>14.456.239.020,52</b>

Rincian aset lain-lain per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XXXI**. Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal per 1 Januari 2019 sebesar Rp68.055.448.735,53 merupakan saldo awal aset rusak berat per 1 Januari 2019 sebelum dikurangi Akumulasi Penyusutan;
2. Mutasi Tambah:

Penambahan aset lain-lain sebesar Rp4.846.416.292,22 selama Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Reklas aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp4.421.294.391,86 merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin (kondisi baik/rusak ringan) menjadi aset lainnya (kondisi rusak berat). Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil pengecekan/laporan dari pengurus barang dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel V.4.53 Jumlah Aset Lain-lain Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2019**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.498.000,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	417.843.712,00
3	Kantor Camat Sianjur Mulamula	42.277.000,00
4	Kebun Raya Samosir	52.601.025,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	94.881.100,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	101.336.750,00
7	Sekretariat Daerah	226.418.500,00
8	Dinas Pariwisata	258.761.206,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	827.045.571,50
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	103.341.579,42
11	Dinas Pertanian	248.805.165,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	308.132.008,94
13	Dinas Pendidikan	206.312.644,00

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
14	Rumah Sakit Umum Daerah	195.250.000,00
15	Dinas Kesehatan	1.311.695.130,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.095.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.421.294.391,86</b>

- b. Penambahan aset lain-lain dari aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp24.560.000,00 pada Sekretariat Daerah.
- c. Penambahan aset lain-lain dari aset tetap lainnya sebesar Rp326.253.900,00 yakni pada Dinas Pariwisata sebesar Rp136.950.000,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp189.303.900,00.
- d. Penambahan aset lain-lain akibat kurang catat sebesar Rp74.308.000,36 yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp36.805.000,00 yakni sepeda motor yang tidak laku dilelang, pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp37.503.000,00 dan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp0,36
3. Mutasi Kurang:

Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp6.724.757.215,22 selama tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelelangan aset lain lain sebesar Rp243.671.071,00, dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel V.4.54 Jumlah Aset Lainnya yang dilelang atau tanpa lelang di per SKPD TA 2019**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.843.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa	11.436.000,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.501.000,00
4	Dinas Pariwisata	17.987.500,00
5	Dinas Kesehatan	193.903.571,00
	<b>Jumlah</b>	<b>243.671.071,00</b>

Rincian aset lain-lain yang dilelang dapat dilihat pada **Lampiran IV**

- b. Penghapusan aset lain-lain sesuai dengan Surat Keputusan Sekeretaris Daerah Kabupaten Samosir Nomor 29 Tahun 2019 sebesar Rp6.443.583.143,45 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel V.4.55 Jumlah Aset Lain-lain yang dihapus per SKPD TA 2019**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Kepegawaian Daerah	148.590.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.756.401,00
3	Inspektorat Daerah	133.109.191,94
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	424.094.000,00
5	Sekretariat DPRD	19.885.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.947.900,00
7	Badan Pendapatan Daerah	32.479.677,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	225.767.723,43
9	Sekretariat Daerah	901.969.000,00



No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	345.635.726,28
11	Dinas Pendidikan	3.753.730.756,85
12	Dinas Kesehatan	350.617.766,95
	<b>Jumlah</b>	<b>6.443.583.143,45</b>

- c. Reklas ke KIB B (kondisi baik) sebesar Rp18.751.500,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Terdapat lebih catat aset lain-lain sebesar Rp18.751.500,77 yakni pada Dinas Kesehatan sebesar Rp0,77 dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp18.751.500,00.

Rincian akumulasi penyusutan aset lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran XXXII**.

#### V.4.2 KEWAJIBAN

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**11.620.093.575,05**

**18.924.609.866,06**

Akun Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Samosir. Sampai dengan 31 Desember 2019. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Samosir per 31 Desember 2019 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp11.620.093.575,05 dan Tahun 2018 sebesar Rp15.501.720.154,77 mengalami penurunan sebesar Rp7.304.516.291,01 atau sebesar Rp38,60%.

##### V.4.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**11.620.093.575,05**

**18.924.609.866,06**

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.620.093.575,05, dan Rp18.924.609.866,06 atau mengalami kenaikan sebesar Rp7.304.516.291,01 atau 38,60%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.4.56 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek TA 2019 dan 2018**

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Peningkatan/ (Penurunan)	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.591.458,00	281.982.384,96	(278.390.926,96)	(98,73)
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Pendapatan Diterima Dimuka	916.667,00	1.625.000,00	(708.333,00)	(43,59)
5	Utang Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.615.585.450,05	18.641.002.481,10	(7.025.417.031,05)	(37,69)
<b>Jumlah</b>		<b>11.620.093.575,05</b>	<b>18.924.609.866,06</b>	<b>(7.304.516.291,01)</b>	<b>(38,60)</b>

**V.4.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**3.591.458,00****281.982.384,96**

Utang perhitungan Pihak Ketiga Ketiga (PFK) TA 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp3.591.458,00 dan Rp281.982.384,96 atau mengalami penurunan sebesar Rp278.390.926,96 atau 98,73%. Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada SD dan SMP Pengelola Dana BOS yang belum dibayarkan pada tahun 2019. Rincian utang perhitungan PFK dapat dilihat pada **Lampiran XIV**.

**V.4.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**0,00****0,00**

Tidak terdapat bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2019 dan 2018

**V.4.2.1.3 Utang Bunga**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**0,00****0,00**

Tidak terdapat Utang Bunga per 31 Desember 2019 dan 2018.

**V.4.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**916.667,00****1.625.000,00**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.625.000,00 dan Rp1.625.000,00. Pendapatan diakui sebagai kewajiban karena pembayaran atas Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan untuk masa kontrak yang melebihi dari tahun periode pelaporan. Adapun rincian penerimaan pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut:

**Tabel V.4.57 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka TA 2019**

NO	JENIS KERJA SAMA	NOMOR PERJANJIAN KERJASAMA	NAMA PIHAK KETIGA	TMT	JUMLAH RETRIBUSI	2019	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
1	Pemanfaatan/ Pengelolaan Area Kosong dalam Terminal Onan Baru	550/552/DISHUB/ VII/2019, tanggal 08 Juli 2019	Nurhaya Sagala	02 Mei 2019 s/d 01 Mei 2020	1.000.000,00	666.667,00	333.333,00
2	Pemanfaatan/ Pengelolaan Area Kosong dalam Terminal Onan Baru	550/551/DISHUB/ VII/2019, tanggal 08 Juli 2019	Emri Simbolon	02 Maret 2019 s/d 02 Maret 2020	1.000.000,00	833.333,00	166.667,00
3	Pemanfaatan/ Pengelolaan Area Kosong dalam Terminal Onan Baru	550/549/Dishub/VII /2019, tanggal 08 Juli 2019	Lamtukko Simbolon	02 Juli 2019 s/d 01 Juli 2020	500.000,00	250.000,00	250.000,00
4	Pemanfaatan/ Pengelolaan Area Kosong dalam Terminal Onan Baru	550/550/Dishub/VII /2019, tanggal 08 Juli 2019	Tiara Sinurat	02 Maret 2019 s/d 02 Maret 2020	1.000.000,00	833.333,00	166.667,00
<b>Jumlah</b>					<b>3.500.000</b>	<b>2.583.333,00</b>	<b>916.667 ,00</b>

**V.4.2.1.5 Utang Beban**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**0,00****0,00**

Tidak terdapat Utang Beban per 31 Desember 2019 dan 2018.

**V.4.2.1.6 Utang Jangka Pendek lainnya**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**11.615.585.450,05****18.641.002.481,10**

Akun utang jangka pendek lainnya merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Samosir yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.615.585.450,05 dan Rp18.641.002.481,10 atau mengalami kenaikan sebesar Rp7.025.417.031,05 atau 37,69%. Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari:

- Terdapat pekerjaan yang merupakan belanja tahun 2019 yang belum dibayarkan sebesar Rp5.218.819.248,27 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran XXXV**.
- Terdapat hutang tahun sebelumnya yang belum dibayarkan hingga TA. 2019 sebesar Rp1.294.691.855,10 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran XXXIII**.
- Terdapat hutang retensi Tahun 2019 sebesar Rp5.102.074.346,68 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum tahun 2019 sebesar Rp4.913.773.242,00 dan Dinas Pariwisata tahun 2019 sebesar Rp188.301.104,68, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran XXXIV**.

**V.4.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)	(Rp)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Per 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Samosir tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

#### V.4.2.3 EKUITAS

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>1.593.466.997.470,17</b>	<b>1.549.460.434.496,07</b>

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Samosir selama tahun 2019. Nilai ekuitas berasal dari Laporan Perubahan Ekuitas. Akun Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.593.466.997.470,17 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.549.460.434.496,07 atau meningkat sebesar Rp44.006.562.974,10 atau 2,84%.

#### V.4.2.4 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>1.605.087.091.045,22</b>	<b>1.568.385.044.362,13</b>

Jumlah kewajiban dan ekuitas dana Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.605.087.091.045,22 dan jika dibandingkan dengan Tahun 2018 Rp1.568.385.044.362,13 maka mengalami peningkatan sebesar Rp36.702.046.683,09 atau 2,34%.

## V.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas Operasional, aktivitas Investasi, dan aktivitas transitoris. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Samosir menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menggunakan kas tersebut.

Selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Samosir mengalami peningkatan kas sebesar Rp25.819.576.647,13 yang berasal dari:

**Tabel V.5.1 Rincian Arus Kas per 31 Desember 2019 dan 2018**

No	Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Peningkatan/ (Penurunan)	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	193.563.835.155,09	184.616.661.228,36	8.947.173.926,73	4,85
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(163.465.867.581,00)	(185.814.128.902,00)	22.348.261.321,00	(12,03)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(4.000.000.000,00)	(6.366.593.272,00)	2.366.593.272,00	(37,17)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(278.390.926,96)	264.429.264,96	(542.820.191,92)	(205,28)
<b>Jumlah Kenaikan/ (Penurunan) Kas</b>		<b>25,819,576,647.13</b>	<b>(7.299.631.680,68)</b>	<b>33.119.208.327,81</b>	<b>(452,36)</b>

### V.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**193.563.835.155,09**

**184.616.661.228,36**

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Samosir selama TA 2019, yang merupakan realisasi Pendapatan Daerah setelah dikurangi Belanja Operasi kegiatan pemerintah. Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2019 sebesar Rp193.563.835.155,09 mengalami kenaikan sebesar Rp8.947.173.926,73 atau 4,85% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp184.616.661.228,36, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.5.2 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 dan 2018**

No	Uraian	per 31 Desember 2019	per 31 Desember 2018	Peningkatan/ (Penurunan)	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.1	Arus Kas Masuk				
	- Penerimaan Pajak Daerah	17.342.605.511,21	14.788.292.147,60	2.554.313.363,61	17,27
	- Penerimaan Retribusi Daerah	4.617.651.545,00	5.029.168.250,00	(411.516.705,00)	(8,18)
	- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.533.993.582,00	2.714.607.460,00	1.819.386.122,00	67,02

No	Uraian	per 31 Desember 2019	per 31 Desember 2018	Peningkatan/ (Penurunan)	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	- Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	33.375.232.526,88	24.446.834.531,76	8.928.397.995,12	36,52
	- Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	7.906.318.303,00	10.855.232.799,00	(2.948.914.496,00)	(27,17)
	- Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.155.106.279,00	3.688.724.037,00	(533.617.758,00)	(14,47)
	- Penerimaan Dana Alokasi Umum	465.249.052.000,00	453.737.230.000,00	11.511.822.000,00	2,54
	- Penerimaan Dana Alokasi Khusus	159.894.072.709,00	139.883.498.974,00	20.010.573.735,00	14,31
	- Penerimaan Dana Penyesuaian	39.966.258.330,00	21.756.756.000,00	18.209.502.330,00	83,70
	- Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.000.332.470,00	16.539.591.307,00	15.460.741.163,00	93,48
	- Penerimaan Hibah	7.698.069.000,00	0,00	7.698.069.000,00	0,00
	- Penerimaan Lainnya	108.744.499.000,00	108.778.597.553,00	(34.098.553,00)	(0,03)
	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>884.483.191.256,09</b>	<b>802.218.533.059,36</b>	<b>82.264.658.196,73</b>	<b>10,24</b>
1.2	Arus Kas Keluar				
	- Belanja Pegawai	342.377.031.205,00	311.222.108.400,00	31.154.922.805,00	10,01
	- Belanja Barang dan Jasa	179.025.657.358,00	158.554.370.923,00	20.471.286.435,00	12,91
	- Belanja Hibah	5.646.012.000,00	5.268.996.090,00	377.015.910,00	7,16
	- Belanja Bantuan Sosial	3.179.225.000,00	1.288.350.000,00	1.890.875.000,00	146,77
	- Belanja Bantuan Keuangan	157.590.921.998,00	138.498.749.418,00	19.092.172.580,00	13,79
	- Pembayaran Tak Terduga	972.101.000,00	1.511.382.000,00	(539.281.000,00)	(35,68)
	- Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.405.500.000,00	772.500.000,00	633.000.000,00	81,94
	- Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	722.907.540,00	485.415.000,00	237.492.540,00	48,93
	Jumlah Arus Kas Keluar	690.919.356.101,00	617.601.871.831,00	73.317.484.270,00	11,87
	<b>Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>193.563.835.155,09</b>	<b>184.616.661.228,36</b>	<b>8.947.173.926,73</b>	<b>4,85</b>

### V.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**(163.465.867.581,00)****(185.814.128.902,00)**

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Samosir selama TA 2019, yang merupakan Belanja Pemerintah Kabupaten Samosir untuk Belanja Modal berupa pengadaan Barang Inventaris Milik Daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk Pelayanan Publik. Belanja Modal yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir selama TA 2019, menjadi penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2018 yang bersangkutan. Arus kas bersih dari aktivitas investasi TA 2019 sebesar Rp(163.465.867.581,00) atau mengalami penurunan sebesar Rp22.348.261.321,00 atau 12,02% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp(185.814.128.902,00) dengan rincian atas Aktivitas Investasi Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel V.5.3 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	per 31 Desember 2019	per 31 Desember 2018	Peningkatan/ (Penurunan)	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas Masuk				
	- Penjualan atas kendaraan dinas roda empat	590.635.798,00	451.319.000,00	139.316.798,00	30,869
	- Penjualan atas bahan bangunan bekas	37.331.000,00	16.402.000,00	20.929.000,00	127,600
	Jumlah Arus Kas Masuk	627.966.798,00	467.721.000,00	160.245.798,00	34,261
2	Arus Kas Keluar				
	- Perolehan Tanah	6.359.404.776,00	1.213.201.921,00	5.146.202.855,00	424,18
	- Perolehan Peralatan dan Mesin	12.359.799.372,00	24.336.358.579,00	(11.976.559.207,00)	(49,21)
	- Perolehan Modal Gedung dan Bangunan	23.742.137.936,00	19.130.112.671,00	4.612.025.265,00	24,11
	- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.030.134.184,00	128.756.927.067,00	(15.726.792.883,00)	-12,21
	- Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.602.358.111,00	12.845.249.664,00	(4.242.891.553,00)	(33,03)
	Jumlah Arus Kas Keluar	164.093.834.379,00	186.281.849.902,00	(22.188.015.523,00)	(11,91)
	<b>Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(163.465.867.581,00)</b>	<b>(185.814.128.902,00)</b>	<b>22.348.261.321,00</b>	<b>(12,03)</b>

### V.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**(4.000.000.000,00)****(6.366.593.272,00)**

Arus kas ini merupakan saldo dari penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Samosir pada PT Bank Sumut. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan TA 2019 sebesar (Rp4.000.000.000,00) yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar (Rp6.366.593.272,00).

### V.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**(278.390.926,96)****264.429.264,96**

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas non anggaran Pemerintah Kabupaten Samosir selama TA 2019 sebesar (Rp278.390.926,96) yang merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ditambah saldo sisa UP dan Kas Bendahara Penerimaan TA 2018 Rp264.429.264,96 setelah dikurangi Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ditambah Saldo Sisa UP. Arus kas ini mengalami penurunan sebesar Rp542.820.191,92 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.5.4 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	per 31 Desember 2019	per 31 Desember 2018	Peningkatan/ (Penurunan)	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Arus Kas Masuk				
	- Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	54.179.786.960,34	53.246.323.491,96	933.463.468,38	1,75
	- Saldo Sisa UP dan Kas di Bendahara Penerimaan TA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Koreksi Saldo Kas di Bendahara BOS 2018	0,00	2.884.522,00	(2.884.522,00)	(100,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk	54.179.786.960,34	53.249.208.013,96	930.578.946,38	1,75
2	Arus Kas Keluar				
	- Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	54.458.177.887,30	52.984.778.749,00	1.473.399.138,30	2,78
	- Saldo Sisa UP TA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	54.458.177.887,30	52.984.778.749,00	1.473.399.138,30	2,78
	<b>Jumlah Arus kas Transitoris</b>	<b>(278.390.926,96)</b>	<b>264.429.264,96</b>	<b>(542.820.191,92)</b>	<b>(205,28)</b>

### V.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

---

**25,819,576,647.13**


---

**(7.299.631.680,68)**

Kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode TA 2019 adalah sebesar Rp25,819,576,647.13 atau mengalami peningkatan sebesar Rp33.119.208.327,81 atau 453,71% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar (Rp7.299.631.680,68).

### V.5.6 Saldo Akhir Kas

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

---

**50.538.695.097,88**


---

**24.719.118.450,75**



Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp50.538.695.097,88 dan Rp24.719.118.450,75 atau mengalami peningkatan sebesar Rp25.819.576.647,13 atau 104,45%. Rincian Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel V.5.5 Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan/ Penurunan	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Saldo Akhir Kas di BUD	36.180.150.139,88	18.691.080.590,79	17.489.069.549,09	93,57
2	Kas di Bendahara Penerimaan	205.350.000,00	41.954.000,00	163.396.000,00	389,46
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	63.952,00	(63.952,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	5.244.810.678,00	4.365.562.861,00	879.247.817,00	20,14
5	Kas di Bendahara Bos	8.904.792.822,00	1.620.457.046,96	7.287.621.574,04	449,52
6	Kas Lainnya	3.591.458,00	0,00	3.591.458,00	100,00
7	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>50.538.695.097,88</b>	<b>24.719.118.450,75</b>	<b>25.819.576.647.13</b>	<b>104,45</b>

## V.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh SKPD di Kabupaten Samosir. Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel V.6.1 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018**

No	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018	Peningkatan/ Penurunan	Persentase (%)
1	Ekuitas Awal	1.549.460.434.496,07	1.461.638.959.550,33	87.821.474.945,74	6,01
2	Surplus/Defisit - LO	43.279.756.143,51	86.006.899.365,85	(42.727.143.222,34)	(49,68)
3	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koreksi Ekuitas Lainnya	726.806.830,59	1.814.575.579,89	(1.087.768.749,30)	(59,95)
	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>1.593.466.997.470,17</b>	<b>1.549.460.434.496,07</b>	<b>44.006.562.974,10</b>	<b>2,84</b>

### V.6.1 Ekuitas Awal

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**1.549.460.434.496,07**

**1.461.638.959.550,33**

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Samosir per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.549.460.434.496,07 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2018. Saldo Ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp1.549.460.434.496,07, mengalami kenaikan sebesar Rp87.821.474.945,74 atau 6,01% bila dibandingkan Saldo Ekuitas awal Tahun 2018 sebesar Rp1.461.638.959.550,33.

### V.6.2 Surplus/Defisit - LO

Saldo 2019

Saldo 2018

(Rp)

(Rp)

**43.279.756.143,51**

**86.006.899.365,85**

Operasional Pemerintah Kabupaten Samosir mengalami surplus tahun TA 2019 sebesar Rp43.279.756.143,51, yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Jika dibandingkan TA 2018 sebesar Rp86.006.899.365,85, terjadi penurunan sebesar Rp42.727.143.222,34 atau 49,68%.

**V.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
<b>726.806.830,59</b>	<b>1.814.575.579,89</b>

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Samosir per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp726.806.830,59 dan Rp1.814.575.579,89. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2019 sebesar Rp726.806.830,60 mengalami penurunan bila dibandingkan Saldo koreksi Ekuitas Tahun 2018 sebesar Rp1.814.575.579,89 sebesar Rp(1.087.768.749.30) atau 59,95%.

**V.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak terdapat koreksi nilai persediaan selama Tahun 2019 dan tahun 2018

**V.6.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap selama tahun 2019 dan 2018.

**V.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya**

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
<b>726.806.830,59</b>	<b>1.814.575.579,89</b>

Koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp726.806.830,59 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.814.575.579,89 atau mengalami penurunan sebesar Rp(1.087.768.749.30) atau 59,95% merupakan koreksi atas saldo awal, kesalahan pencatatan pembulatan dan akibat penerapan Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah, dengan rincian disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel V.6.2 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2019**

No	URAIAN		JUMLAH (Rp)
1	Koreksi hutang		470
2	Koreksi aset		2.567.145.685,79
	KIB A	2.297.022.000,00	
	KIB B	495.648.886,83	
	KIB C	(1,37)	
	KIB D	0,10	
	aset lain-lain	(225.525.199,77)	
3	Koreksi akumulasi penyusutan		(1.412.425.034,20)
	Aset tetap (KIB B, C, D dan E)	(1.412.425.031,74)	
	aset lain-lain	(2,46)	
4	koreksi kesalahan pencatatan		(427.914.291,00)
	<b>TOTAL</b>		<b>726.806.830,59</b>

**V.6.4. Ekuitas Akhir**

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

**1.593.466.997.470,17****1.549.460.434.496,07**

Saldo ekuitas akhir Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.593.466.997.470,17 dan Rp1.549.460.434.496,07, atau mengalami kenaikan sebesar Rp44.006.562.974,10 atau 2,84%. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp1.549.460.434.496,07 ditambah surplus/ defisit-LO sebesar Rp43.279.756.143,50, dan ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp726.806.830,60.

## V.7 HAL-HAL LAIN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

### V.7.1 PENGELOLAAN APBD TANPA MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat pengelolaan dana APBD yang diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang diaturoleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dimana proses pengelolaan dana tersebut (penerimaan dan pengeluaran) tidak melalui Rekening Kas Daerah tetapi langsung kepada rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 12 Puskesmas di Kabupaten Samosir;
- 2) Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Samosir yang diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. dimana dana BLUD dikelola secara terpisah dari Rekening Kas Daerah;
- 3) Selain pengelolaan Dana JKN dan Dana BLUD, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Satuan Pendidikan Negeri juga mengelola Dana BOS yang merupakan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

### V.7.2 PENGELOLAAN KAS

Dalam melaksanakan pengelolaan kas Pemerintah Kabupaten Samosir menggunakan sebanyak 306 rekening dengan rincian pada **Lampiran XXXVI**.

Pada Tahun 2019 terdapat kas di rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang merupakan belanja dan telah diterbitkan SP2D namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Tabel V.7.1 Rincian Kas Bendahara yang merupakan belanja yang dibelum dibayarkan kepada Pegawai TA 2019**

No	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2019 (Rp)	No SP2D	Keterangan
1	SMP Negeri 1 Pangururan	16.350.875,00	5595/SP2D-LS/1.01.02/2019	Tambahan Penghasilan yang belum dibagikan kepada Pegawai
2	SMP Negeri 2 Pangururan	902.000,00	5998/SP2D-LS/1.01.02/2019	Kekurangan Tunjangan fungsional yang belum dibagikan kepada Pegawai
3	SMP Negeri 1 Ronggur Nihuta	8.814.875,00	6130/SP2D-LS/GAJI/1.01.03/2019	Kekurangan gaji yang belum dibagikan kepada Pegawai
4	SMP Negeri 1 Siotio	6.774.250,00	5783/SP2D-LS/1.01.05/2019	Tambahan Penghasilan yang belum dibagikan kepada Pegawai
5	SMP Negeri 3 Siotio	237.500,00	6149/SP2D-LS/GAJI/1.01.05/2019	Kekurangan gaji yang belum dibagikan kepada Pegawai
6	SMP Negeri 1 Simanindo	16.351.000,00	5790/SP2D-LS/1.01.07/2019	Tambahan Penghasilan yang belum dibagikan kepada

No	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2019 (Rp)	No SP2D	Keterangan
				Pegawai
7	SMP Negeri 3 Simanindo	8.354.000,00	6147/SP2D-LS/GAJI/1.01.09/2019	Kekurangan gaji yang belum dibagikan kepada Pegawai
8	SMP Negeri 1 Palipi	946.000,00	5802/SP2D-LS/1.01.10/2019	Tambahan Penghasilan yang belum dibagikan kepada Pegawai
9	SMP Negeri 2 Harian	6.962.500,00	6129/SP2D-LS/GAJI/1.01.10/2019	Kekurangan gaji yang belum dibagikan kepada Pegawai
10	SMP Negeri 1 Nainggolan	13.655.500,00	5796/SP2D-LS/1.01.12/2019	Tambahan Penghasilan yang belum dibagikan kepada Pegawai
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	239.900,00	6145/SP2D-LS/GAJI/1.01.14/2019	Kekurangan gaji yang belum dibagikan kepada Pegawai
12	BOK Puskesmas Lontung	570	5862/SP2D-LS/1.01.16/2019	Tambahan Penghasilan yang belum dibagikan kepada Pegawai
	<b>Total</b>	<b>79.588.970,00</b>		

## **BAB VI**

### **INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **VI.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

Kabupaten Samosir berdiri sejak tanggal 7 Januari 2004 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 2003 dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir. Kabupaten Samosir mempunyai luas wilayah  $\pm 2.069,05$  km<sup>2</sup>, terdiri dari  $\pm 1.444,25$  km<sup>2</sup> daratan atau sebesar 69,80% yaitu seluruh Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba dan sebagian wilayah daratan Pulau Sumatera dengan wilayah danau  $\pm 624,80$  km<sup>2</sup> atau sebesar 30,20%. Wilayah administrasi pemerintahan terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 128 (seratus dua puluh delapan) desa dan 6 (enam) kelurahan, dimana batas wilayah administratifnya berbatasan dengan Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat.

Menurut kecamatan, wilayah daratan yang paling luas adalah Kecamatan Harian dengan luas  $\pm 560,45$  km<sup>2</sup> (38,81 persen), diikuti oleh Kecamatan Simanindo  $\pm 198,20$  km<sup>2</sup> (13,72 persen), Kecamatan Sianjur Mulamula  $\pm 140,24$  km<sup>2</sup> (9,71 persen), Kecamatan Palipi  $\pm 129,55$  km<sup>2</sup> (8,97 persen), Kecamatan Pangururan  $\pm 121,43$  km<sup>2</sup> (8,41 persen), Kecamatan Ronggurnihuta  $\pm 94,87$  km<sup>2</sup> (6,57 persen), Kecamatan Nainggolan  $\pm 87,86$  km<sup>2</sup> (6,08 persen), Kecamatan Onanrunggu  $\pm 60,89$  km<sup>2</sup> (4,22 persen), dan Kecamatan Sitiotio  $\pm 50,76$  km<sup>2</sup> (3,51 persen). Penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2018 adalah sebanyak 125.816 jiwa, dan angka kepadatan penduduk mencapai 87,12 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### **VI.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membawa perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah. Perubahan ini menyangkut perubahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diikuti dengan perubahan struktur organisasi dan mulai berlaku sejak tahun 2019. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Perubahan struktur organisasi lebih jelasnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah dan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pembentukan perangkat daerah menetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah

yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Rumah Sakit dr. Hadrianus Sinaga, 1 (satu) Kantor Daerah, 19 (sembilan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan Daerah, 9 (sembilan) Kecamatan dan 2 (dua) UPTD dengan perincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Kabupaten
4. Rumah Sakit Umum dr. Hadrianus Sinaga
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Dinas Daerah terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan
  - 2) Dinas Kesehatan
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  - 5) Satuan Polisi Pamong Praja
  - 6) Dinas Sosial
  - 7) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
  - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa
  - 9) Dinas Ketahanan Pangan
  - 10) Dinas Lingkungan Hidup
  - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 12) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 13) Dinas Perhubungan
  - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
  - 16) Dinas Pariwisata
  - 17) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
  - 18) Dinas Pertanian
  - 19) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
7. Badan Daerah terdiri dari :
  - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - 3) Badan Pendapatan Daerah
  - 4) Badan Kepegawaian Daerah



- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kecamatan terdiri atas :
- 1) Kecamatan Pangururan
  - 2) Kecamatan Simanindo
  - 3) Kecamatan Ronggurnihuta
  - 4) Kecamatan Palipi
  - 5) Kecamatan Nainggolan
  - 6) Kecamatan Onan Runggu
  - 7) Kecamatan Harian
  - 8) Kecamatan Sianjur Mulamula
  - 9) Kecamatan Siotio
9. UPTD terdiri dari:
- 1) UPTD Balai Latihan Kerja
  - 2) UPTD Kebun Raya Samosir

### **VI.3 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019, Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Rekapitulasi APB Desa se Kabupaten Samosir dapat dilihat pada **Lampiran XXXVII**.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1971) serta Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 telah diserahkan kepada 128 (seratus dua puluh delapan) desa di wilayah Kabupaten Samosir. bantuan keuangan ke desa yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintah Desa Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

**VI.3.1 Pendapatan**

Penyerahan Bantuan Keuangan Desa terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel VI.1 Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Desa  
Kabupaten Samsir Tahun 2019**

No	Uraian	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Pajak	Retribusi	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tahap I (20%)	21.748.899.800,00	9.626.455.340,00	0,00	0,00	31.375.355.140,00
2	Tahap II (40 %)	43.497.799.600,00	19.252.910.680,00	0,00	0,00	62.750.710.280,00
3	Tahap III (40 %)	43.497.799.600,00	19.252.910.680,00	1.405.500.000,00	722.907.540,00	64.879.117.820,00
<b>Jumlah</b>		<b>108.744.499.000,00</b>	<b>48.132.276.700,00</b>	<b>1.405.500.000,00</b>	<b>722.907.540,00</b>	<b>159.005.183.240,00</b>

**Tabel VI.2 Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Samsir Tahun 2019 per Tahap**

No	Kecamatan	Tahap 1 (20%)	Tahap 2 (40%)	Tahap 3 (40%)	Jumlah
1	Kecamatan Simaindo	4.728.654.400,00	9.457.308.800,00	9.806.731.800,00	23,992,695,000,00
2	Kecamatan Onanrunggu	2.860.095.870,00	5.720.191.740,00	5.914.126.740,00	14,494,414,350,00
3	Kecamatan Nainggolan	3.390.218.220,00	6.780.436.440,00	6.998.153.440,00	17,168,808,100,00
4	Kecamatan Palipi	3.967.714.750,00	7.935.429.500,00	8.205.074.500,00	20,108,218,750,00
5	Kecamatan Harian	3.334.542.980,00	6.669.085.960,00	6.871.627.960,00	16,875,256,900,00
6	Kecamatan Sianjur Mulamula	2.896.689.480,00	5.793.378.960,00	5.978.201.960,00	14,668,270,400,00
7	Kecamatan Ronggurnihuta	2.013.682.920,00	4.027.365.840,00	4.156.424.840,00	10,197,473,600,00
8	Kecamatan Pangururan	6.089.682.200,00	12.179.364.400,00	12.633.675.400,00	30,902,722,000,00
9	Kecamatan Sitiotio	2.094.074.320,00	4.188.148.640,00	4.315.101.180,00	10,597,324,140,00
<b>Jumlah</b>		<b>31.375.355.140,00</b>	<b>62.750.710.280,00</b>	<b>64.879.117.820,00</b>	<b>159.005.183.240,00</b>

1. Penggunaan Bantuan Keuangan Desa baik pendapatan dan belanja disajikan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

**Tabel VI.3 Perhitungan Mutasi Bantuan Keuangan Desa Tahun 2019**

Uraian	Jumlah
<b>1 PENDAPATAN</b>	<b>159.017.433.988,00</b>
ALOKASI DANA DESA	48.132.276.700,00
DANA DESA	108.744.499.000,00
PBH	2.128.407.540,00
BUNGA BANK	12.250.748,00
<b>2 BELANJA</b>	<b>155.552.745.370,00</b>
1 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	45.418.383.601,00
2 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	92.378.882.910,00

Uraian	Jumlah
3 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	6.347.903.000,00
4 BIDANG PEMERINTAHAN DESA	11.299.633.439,00
5 BIDANG TIDAK TERDUGA	107.942.420,00

### VI.3.2 Belanja

Realisasi Belanja terbagi atas 5 (lima) bidang dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel VI.4 Realisasi Belanja Desa Berdasarkan Bidang Desa Kabupaten Samosir Tahun 2019**

No	Kecamatan/Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Masyarakat	Bidang Pemerintahan Desa	Bidang Tidakterduga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecamatan Simaindo	7.320.293.363,00	14.263.619.861,00	1.131.326.200,00	908.863.000,00	4.840.000,00	23.628.942.424,00
2	Kecamatan Onanrunggu	4.110.720.791,00	8.877.529.865,00	581.397.000,00	536.945.034,00	13.101.220,00	14.119.693.910,00
3	Kecamatan Nainggolan	4.627.797.880,00	11.361.452.180,00	632.940.000,00	352.562.000,00	3.000.000,00	16.977.752.060,00
4	Kecamatan Palipi	6.172.154.769,00	11.464.396.231,00	770.108.000,00	891.320.450,00	27.321.200,00	19.325.300.650,00
5	Kecamatan Harian	4.658.746.412,00	7.426.519.681,00	549.895.000,00	4.204.345.155,00	0,00	16.839.506.248,00
6	Kecamatan Sianjur Mulamula	4.445.298.260,00	9.182.639.566,00	572.195.000,00	684.647.300,00	45.790.000,00	14.930.570.126,00
7	Kecamatan Ronggurnihuta	2.771.674.532,00	5.951.071.544,00	302.910.800,00	452.346.000,00	0,00	9.478.002.876,00
8	Kecamatan Pangururan	8.285.154.218,00	19.229.017.060,00	1.328.306.000,00	1.049.573.000,00	4.750.000,00	29.896.800.278,00
9	Kecamatan Sitiotio	3.026.543.376,00	4.622.636.922,00	478.825.000,00	2.219.031.500,00	9.140.000,00	10.356.176.798,00
	Jumlah	45,418,383,601.00	92,378,882,910.00	6,347,903,000.00	11,299,633,439.00	107,942,420.00	155.552.745.370,00

### VI.3.2 Pembiayaan

Selisih antara total pendapatan jika dibandingkan dengan total belanja pada seluruh desa se Kabupaten Samosir menunjukkan adanya surplus sebesar Rp14.123.165.031,31. Aktivitas Pembiayaan Desa dapat dilihat seperti tabel berikut:

**Tabel VI.5 Aktivitas Pembiayaan Desa**

<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(12.655.305.476,65)</b>	<b>5.399.769.744,99</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>17.042.414.551,36</b>	<b>17.015.459.357,87</b>
SILPA Tahun Sebelumnya	17.041.932.244,36	17.014.977.050,87
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	482.307,00	482.307,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.389.222.074,72</b>	<b>2.225.511.354,00</b>
Penyertaan Modal Desa	4.289.110.720,72	2.135.400.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	100.111.354,00	90.111.354,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>12.653.192.476,64</b>	<b>14.789.948.003,87</b>
<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>(2.113.000,01)</b>	<b>20.189.717.748,86</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa Se-Kabupaten Samosir TA 2019 adalah sebesar Rp20.189.717.748,86. Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan per Desa dapat dilihat pada **Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX dan Lampiran XL.**

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

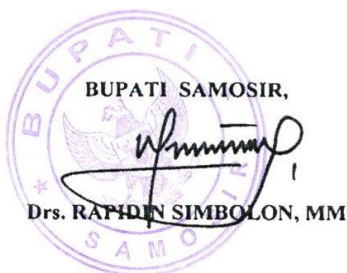
Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2019 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu LKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana buletin teknis merupakan bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

  
BUPATI SAMOSIR,  
Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM